



Terakreditasi
No 607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015

Vol 16 No 3 September 2017
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

Pengujian Standar Kompetensi Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial
Assessment of Social Assistant Competencies Standard on the Base of Social Work Systems
(Istiana Hermawati)

Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran
The Role of Social Service Office in the Implementation of National Health Insurance System for Recipients of Contribution Subsidy
(Rukmini, Ristrini, dan Oktarina)

Penumbuhan Fungsi Sosial Masyarakat Perdesaan melalui Kenthongan
The growing of Social Function of Rural Society through the usage of Kenthongan
(Warto and Chatarina Rusmiyati)

Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera
Implementation of Integrated Social Welfare Services and Caring Society Movement to Prosperous District or City
(Trilaksmi Udiati dan Sri Yuni Murtiwayanti)

Menggapai Hidup Sejahtera Kegiatan Off farm Petani Miskin di Perdesaan
Striving for Life Welfare: Poor Farmers off farm activity in Rural Areas
(Sunit Agus Tri Cahyono)

Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
Condition of Families Receiving Social Assistance to Persons With Severe Disabilities
(Ruaida Murni dan Mulia Astuti)

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat
Fulfillment of People With Severe Disabilities Rights
(Hari Harjanto Setiawan dan Bambang Pudjianto)

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Perbatasan
Strategy of Education Needs Fulfillment for Children of Indonesian Migrant Workers in the Inter-Country Border Area
(Tyas Eko Raharjo F.)

**Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(B2P3KS)**

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial	VOL 16	No 3	Hal 223 - 332	Yogyakarta September 2017	ISSN 1412-6451 E-ISSN 2528-0430
--	--------	------	---------------	---------------------------	------------------------------------

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Terakreditasi No 607/AU2/P2MI-LIPI/03/2015
Volume 16 No 3 September 2017, ISSN 1412-6451, E-ISSN 2528-0430

Terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 05 Tahun 2017)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Reviewer

Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial) Universitas Gadjah Mada
Drs. Latiful Khuluq, MA, BSw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga
Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi) Universitas Sumatera Utara
Dr. Tukino (Kesejahteraan Sosial) STKS Bandung

Editor in Chief

Dr. Gunanto Surjono, SH, M.Si (Kebijakan dan Perencanaan Sosial) B2P3KS

Section Editor/Copy Editor

1. Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
2. Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
3. Dr. Istiana Hermawati, S.Pd, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
4. Dr. Soetji Andari, Dra., M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
5. Tyas Eko Raharjo F. S.ST, MA (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
6. Irmawan, S.IP, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Layout Editor

A.Nururrochman Hidayatulloh, S.Sos

Sekretariat

Dra. Suhartanti
Sugiyarto, SH

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpkasy@yahoo.co.id
jpkasy.yogyakarta@kemsos.go.id
e-journal.kemsos.go.id/index.php/jpkas

Percetakan:

Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 16 No 3 September 2017
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

1. Pengujian Standar Kompetensi Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial 223 - 238
Assessment of Social Assistant Competencies Standard on the Base of Social Work Systems
Istiana Hermawati
2. Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran 239 - 250
The Role of Social Service Office in the Implementation of National Health Insurance System for Recipients of Contribution Subsidy
Rukmini, Ristrini, dan Oktarina
3. Penumbuhan Fungsi Sosial Masyarakat Perdesaan melalui *Kenthongan* 251 - 264
The growing of Social Function of Rural Society through the usage of Kenthongan
Warto dan Chatarina Rusmiyati
4. Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera 265 - 280
Implementation of Integrated Social Welfare Services and Caring Society Movement to Prosperous District or City
Trilaksmi Udiati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti
5. Menggapai Hidup Sejahtera Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Perdesaan 281 - 294
Striving for Life Welfare: Poor Farmers off farm activity in Rural Areas
Sunit Agus Tri Cahyono
6. Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat 295 - 310
Condition of Families Receiving Social Assistance to Persons With Severe Disabilities
Ruaida Murni dan Mulia Astuti
7. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat 311 - 322
Fulfillment of People With Severe Disabilities Rights
Hari Harjanto Setiawan dan Bambang Pudjianto

8. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Perbatasan 323 - 332
Strategy of Education Needs Fulfillment for Children of Indonesian Migrant Workers in the Inter-Country Border Area
Tyas Eko Raharjo F.

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) volume 16 nomor 3 ini dibuka dengan tulisan Istiana Hermawati berjudul Pengujian Standar Kompetensi Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial, diikuti tulisan Rukmini, Ristrini, dan Oktarina berjudul Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran. Topik lain ditulis Warto dan Chatarina Rusmiyati tentang Penumbuhan Fungsi Sosial Masyarakat Perdesaan melalui *Kenthongan*, sementara Trilaksmi Udiati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti membahas tentang Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera, Sunit Agus Tri Cahyono mengemukakan tentang Menggapai Hidup Sejahtera Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Perdesaan. Topik yang sama dibahas oleh Ruaida Murni dan Mulia Astuti tentang Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, serta tulisan Hari Harjanto Setiawan dan Bambang Pudjianto membahas tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat. Menutup volume 16, Nomor 3 September 2017 Tyas Eko Raharjo F. mengemukakan topik tentang Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Perbatasan.

Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 16 No 3 September 2017

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Istiana Hermawati (B2P3KS Yogyakarta)

Pengujian Standar Kompetensi Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial

Assessment of Social Assistant Competencies Standard on the Base of Social Work Systems

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 223 - 238

This research is aimed to describe social companion profiles; identifying social companion qualifications and the amount of incentives received per month; describing competences of the social companion; describing the development of social companion competence standards, and formulating standard hypothetical models of social companion on the base of social work systems. The research was conducted in five locations involving 150 respondents that were determined by proportional random sampling technique and a number of informants that were determined purposively. The data are collected through questionnaires, in-depth interviews, FGD and documents. The data are then analyzed quantitatively and qualitatively, which are both used simultaneously. The results of the study indicate that: 1) The majority of female companions are in the range of productive age, in married status, relatively well educated, coming from the local area and on average accompanying 48 PMKS, 2) From companion qualification, only 28 percent of social companions are qualified as professional social workers, the majority of companions (as many as 67 percent) have never attended the training of consolidation as social companions, and 75.33 percent of social companions received incentives of less than Rp. 500.000, - per month. Many companions function to accompany several PMKS programs and because of the little amount of the incentive they received, consequently they are less focused and their

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil pendamping sosial, mengidentifikasi kualifikasi pendamping sosial dan besarnya insentif yang diterima per bulan, mendeskripsikan kompetensi pendamping sosial, mendeskripsikan pengembangan standar kompetensi pendamping sosial, dan merumuskan model hipotetik standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial. Penelitian dilakukan di lima lokasi dengan melibatkan 150 responden yang ditentukan dengan teknik *proportional random sampling* dan sejumlah informan yang ditentukan secara *purposive*. Data dikumpulkan dengan angket, wawancara mendalam, FGD dan dokumen. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, keduanya digunakan secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Mayoritas pendamping berjenis kelamin perempuan, berada dalam rentang usia produktif, berstatus kawin, berpendidikan memadai, berasal dari daerah setempat dan rata-rata mendampingi 48 PMKS; 2) Dari kualifikasi pendamping, hanya 28 persen pendamping yang memiliki kualifikasi sebagai pekerja sosial profesional, mayoritas pendamping (67 persen) belum pernah mengikuti diklat pementapan tenaga pendamping, dan 75,33 persen pendamping menerima insentif kurang dari Rp. 500.000,- per bulan. Banyak pendamping merangkap tugas mendampingi beberapa program PMKS karena insentif yang diterima terlalu kecil, akibatnya mereka kurang fokus dan kinerjanya kurang optimal; 3) Berdasarkan pengujian

performance is less optimal; 3). Based on testing of contract model of social companion competence with confirmatory factor analysis (CFA) technique, it can be concluded that the competence of social companion was successfully reflected by certain knowledge, skill and values / attitude variable. Among the three variables tested, the factor content of the skill variable is merely the highest in forming competence; 4) The recruitment system of companions is identified in three ways, namely: a) direct recruitment system; b) election system; c) appointment system; 5) Developing social companion standard on the base of social work system, can be created by optimizing various components in the system including recruitment system, human resource management system, intervention system and training system. This research recommends that it is urgently needed to decide the related legislation to national standard of social companion so that the position of the companion is growing stronger and its competence is standardized; it is necessary to increase the competence of social companion, either through formal and nonformal education channels and it is also necessary to apply a hypothetical model of development of social companion standards based on the social work system as proposed.

Keywords: *standards competency; social assistant; social work system*

model kontrak kompetensi pendamping sosial dengan teknik *confirmatory factor analysis* (CFA) dapat disimpulkan, bahwa kompetensi pendamping sosial berhasil direfleksikan oleh variabel pengetahuan, keterampilan dan nilai/sikap tertentu. Di antara ketiga variabel yang diuji, muatan faktor variabel keterampilan ternyata paling tinggi dalam membentuk kompetensi; 4) Sistem rekrutmen pendamping teridentifikasi melalui tiga cara, yaitu: a) sistem rekrutmen langsung, b) sistem pemilihan dan c) sistem penunjukan; 5) Pengembangan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial, dapat diciptakan dengan mengoptimalkan berbagai komponen sistem yang meliputi sistem rekrutmen, manajemen SDM, intervensi dan sistem pelatihan. Penelitian ini merekomendasikan agar segera ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait standar nasional pendamping sosial sehingga posisi pendamping semakin kuat dan kompetensinya terstandar; perlu peningkatan kompetensi pendamping sosial, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal serta perlu diterapkan model hipotetik pengembangan standar pendamping sosial berbasis pekerjaan sosial sebagaimana diusulkan.

Kata kunci: *standart kompetensi; pendamping sosial; sistem pekerjaan sosial*

Rukmini, Ristrini, dan Oktarina (Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI)
Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penerima Bantuan Iuran
The Role of Social Service Office in the Implementation of National Health Insurance System for Recipients of Contribution Subsidy
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 239 - 250

This study is aimed to determine the role of Social Service Office in the implementation of National Health Insurance System (JKN) for recipients of contribution subsidy (PBI) including the aspects of membership determination, poverty criteria, verification, validation, and implementation

Penelitian bertujuan mengetahui peran dinas sosial dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi aspek penetapan kepesertaan, kriteria miskin, verifikasi, validasi dan kendala pelaksanaan. Jenis penelitian observasional dengan disain *cross sectional*,

obstacles. It was an observational study with cross sectional design, which was conducted in Blitar and Malang City in 2015. The data were collected by conducting in-depth interviews and focus group discussion with the authorities of Social Service Office, City Health Office and BPJS and also with secondary data on membership and policy documents investigation. Social Service Offices in Blitar city and Malang city have conducted the updating of the membership of central PBI based on the Integrated Data Base of Social Protection Program (PPLS) in 2011. Blitar Social Service Office had not completed the verification and validation processes for local PBI participants yet. In 2014 Malang Social Service Office only legalized the result of the verification activity. In 2015 Malang Health Office conducted the validation and the Social Service Office also participated in. The verification and validation process of central PBI was conducted by Social Service Office and by Sub-district Social Welfare workers, assisted by social worker community (in Blitar City) and the village team (in Malang City). The obstacles in conducting verification and validation for central PBI are the limited allocation of district budget (APBD) and the limited number of human resources in the Social Service Office to get the society poverty data. It is needed the extended role of the Social Services Office, that does not lay only on the verification and validation of the center PBI but also on that of local District PBI.

Keywords: *social service office; verification; validation; recipient of contribution subsidy (PBI); national health insurance (JKN)*

dilaksanakan di Kota Blitar dan Malang tahun 2015. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan BPJS serta penelusuran data sekunder tentang kepesertaan dan dokumen kebijakan yang tersedia. Dinas Sosial Kota Blitar dan Malang telah berperan dalam melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBI pusat berdasarkan basis data terpadu (BDT) hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Dinas Sosial Kota Blitar belum berperan dalam proses verifikasi dan validasi PBI, Dinas Sosial Kota Malang tahun 2014 hanya melakukan legalisasi hasil verifikasi, dinas kesehatan tahun 2015 melaksanakan validasi dan dinas sosial turut berperan. Proses verifikasi dan validasi PBI pusat dilakukan oleh dinas sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dibantu pekerja sosial masyarakat (Kota Blitar) dan tim kelurahan (Kota Malang). Kendala yang ditemui terbatasnya anggaran APBD, jumlah SDM terbatas untuk kegiatan pendataan masyarakat miskin. Dinas sosial agar melakukan perluasan peran tidak hanya verifikasi dan validasi PBI Pusat tetapi juga PBI Daerah.

Kata kunci: *dinas sosial; verifikasi; validasi; PBI; JKN*

Warto dan Chatarina Rusmiyati (B2P3KS Yogyakarta)
Penumbuhan Fungsi Sosial Masyarakat Perdesaan melalui *Kenthongan*
The growing of Social Function of Rural Society through the usage of Kenthongan
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 251 - 264

This research is aimed to dig out the social function of Kenthongan for rural society. It uses qualitative descriptive approach for describing the meaning of kenthongan for

Penelitian ini bertujuan menggali keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat perdesaan. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif untuk

society. The research was conducted in Sleman district, especially done in the location of Argomulyo Village, Cangkringan sub-district, Sleman District of Yogyakarta Province. Data sources are purposively decided, namely male respondents, in the age of about 60 years old, and having sufficient knowledge of kenthongan, mainly knowing the code and its hitting rhythm, the meaning of sound agreed or understood by local society, and the social function of kenthongan for the society. The data collection is conducted by direct free unstructured interview, non-participants observation, and study on documents and literatures, under qualitative data analysis. The research shows that kenthongan socially functions as a social communication tool for local society and as a society existency. In the context of its function as a social communication, kenthongan plays its role as initial warning tool of calamity, invitation to gather for discussing and working together to help each other, showing society social defense and as a reminder tool for Moslem society to pray on time. In the positioning context as a local society identity, kenthongan functions as conserving media and actualization of social loyalty value, as an identity of Javanese society characters and also as symbol of society life. It is recommended to the Ministry of Social to synergize with the Ministry of Communication and Information to reconsider the role and the social functioning of kenthongan for local society. Authorized local parties, such as Social Body, Culture Body, and Tourism Body need to direct all society elements to enable kenthongan becomes one of icons of Yogyakarta Special Region.

Keywords: *the grow; social society function; rural society; kenthongan*

mengungkap makna *kenthongan* bagi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman dengan *setting* lokasi Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan. Sumber data ditetapkan secara *purposive*, berjenis kelamin laki-laki, minimal berusia 60 tahun, dan berpengetahuan memadai tentang *kenthongan*, terutama menyangkut kode dan irama pemukulan, makna bunyi yang disepakati warga setempat, dan keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas tidak berstruktur, observasi non partisipan, serta telaah dokumen dan kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *kenthongan* berfungsi secara sosial bagi warga setempat yakni sebagai wahana berkomunikasi sosial dan sebagai jati diri masyarakat. Dalam posisi menjadi wahana berkomunikasi sosial, *kenthongan* berfungsi sebagai sarana peringatan dini bencana, mengumpulkan warga untuk bermusyawarah dan bergotong-royong, mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, dan sebagai sarana mengajak umat Islam untuk beribadah tepat waktu. Dalam posisi menjadi jati diri masyarakat, *kenthongan* berfungsi sebagai media pelestari dan aktualisasi nilai kesetiakawanan sosial, ciri khas masyarakat Jawa, serta sebagai lambang kehidupan masyarakat. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengangkat kembali peran dan keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat. Pihak berkompeten di daerah seperti dinas sosial, dinas kebudayaan, dan dinas pariwisata perlu mendorong segenap elemen masyarakat agar *kenthongan* menjadi ikon keistimewaan DI Yogyakarta.

Kata kunci: *penumbuhan; fungsi sosial masyarakat; perdesaan; kenthongan*

Trilaksmi Udiati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti (B2P3KS Yogyakarta)
Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera
Implementation of Integrated Social Welfare Services and Caring Society Movement to Prosperous District or City
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 265 - 280

This study is aimed to identify and to describe the implementation of integrated social welfare services and caring society movement to district or city prosperous (Pandu Gempita). The research was conducted in Berau, East Kalimantan Province. The research data sources were gained from the managers of integrated services, regional authorized personnel working unit (SKPD), businesses, social organizations linked to poverty handling as many as 20 informants. Data collecting techniques were interview, observation and document studies. The data was analyzed in qualitative descriptive technique. The results showed that the implementation of UPTD-PTKS in Berau district was supported by related SKPD, by businesses, by society and by that of regional leaders' commitment through local government budget support. Some obstacles appeared in the processes of personnel placement legal aspects for those managed the UPTD-PTKS so that the service still remained as a reference which can not be solved in UPTD-PTKS. There haven't been Standard Operational Procedures (SOP) yet that regulate the work mechanism of SKPD concerned. There haven't been Internet network and integrated database so that the target, concerned SKPD programs haven't been unified to UPTD-PTKS as online, on the other hand UPTD-PTKS hasn't functioned online yet to distribute services to SKPD concerned as needed by clients. It is then recommended to the Ministry of Social Affairs: revising the General Guidelines and Technical Guidelines on the position of Pandu Gempita (UPTD-PTKS), up grading the managing human resources and that of Pandu Gempita service implementation companions.

Keywords: implementation; integrated services; social welfare

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan implementasi pelayanan kesejahteraan sosial terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera (Pandu Gempita). Lokasi penelitian di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data penelitian adalah pengelola pelayanan terpadu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dunia usaha, organisasi sosial yang berkait penanganan kemiskinan sebanyak 20 informan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan Pandu Gempita bernama UPTD-PTKS (Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Berau mendapat dukungan dari SKPD terkait, dunia usaha, masyarakat, dan komitmen pimpinan daerah melalui dukungan APBD. Hambatan yang dialami masih dalam proses legalitas penempatan personil pengelola UPTD-PTKS sehingga pelayanan masih bersifat rujukan belum bisa diselesaikan di UPTD-PTKS. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme kerja SKPD terkait. Belum ada jaringan internet dan database terpadu sehingga sasaran, program SKPD terkait belum tergabung secara *online* ke UPTD-PTKS, sebaliknya UPTD-PTKS belum secara *online* menyalurkan pelayanan ke SKPD terkait sesuai kebutuhan kelayan. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI: merevisi panduan umum dan panduan teknis tentang kedudukan Pandu Gempita (UPTD-PTKS), meningkatkan SDM pengelola dan pendampingan pelaksanaan pelayanan Pandu Gempita.

Kata kunci: implementasi; pelayanan terpadu; kesejahteraan sosial

Sunit Agus Tri Cahyono (B2P3KS Yogyakarta)

Menggapai Hidup Sejahtera: Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Pedesaan

Striving for Life Welfare: Poor Farmers off farm activity in Rural Areas

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 281 - 294

Viewed from the socio-economic aspect, rural farmer communities are less prosperous than other communities. This fact is concluded based on the results of the research on some farmers in Sendang Mulyo Village, Minggir Subdistrict, Sleman Regency. As an effort to overcome the difficulties of life and to improve social welfare, they make an alternative off farm job. The research on Striving for Life Welfare research, Poor Farmers Off farm activity in Rural Areas is aimed to identify the reasons of farmers in choosing off farm work, and to describe off farm work contributions to family welfare. Data collection drawn from informants was carried out purposively to 30 farmers who have off farm work. The data is analyzed in qualitative descriptive technique. The results of the research show that off-farm job selection is largely not only because of the high burden of family economy that is not proportional to the level of family income, but it has also created economic and psychological pressure. Off farm work is able to contribute to the social welfare of poor farmer families with an indication of the ability to improve the capability to meet the needs of family life. It is recommended to the Ministry of Social and local district government to empower the potential by creating employment opportunity strategies for poor farmers by considering the ability of poor farmers' families, the community needs, and that of potential of social welfare resources systems that can be developed into productive economic enterprises in rural areas.

Keywords: welfare; off farm; poor farmers; rural areas.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, komunitas petani di pedesaan dalam kondisi kurang sejahtera dibanding dengan komunitas masyarakat lain. Fakta ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian terhadap sebagian petani di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Sebagai upaya mengatasi kesulitan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial, mereka membuka pekerjaan alternatif *off farm*. Penelitian Menggapai Hidup Sejahtera, Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Pedesaan bertujuan mengidentifikasi alasan petani memilih pekerjaan *off farm*, dan mendeskripsikan sumbangan pekerjaan *off farm* terhadap kesejahteraan keluarga. Pengumpulan data terhadap informan dilakukan secara purposif terhadap 30 petani yang memiliki pekerjaan *off farm*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemilihan pekerjaan *off farm* sebagian besar tidak hanya dilatarbelakangi oleh tingginya beban ekonomi keluarga yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan keluarga, tetapi juga telah menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis. Pekerjaan *off farm* mampu memberi kontribusi terhadap kesejahteraan sosial keluarga petani miskin dengan indikasi adanya kemampuan perbaikan kemampuan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, perlunya pemberdayaan melalui strategi penciptaan peluang lapangan kerja kepada petani miskin dengan mempertimbangkan kemampuan keluarga petani miskin, kebutuhan masyarakat, dan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif di pedesaan.

Kata kunci: sejahtera; off farm; petani miskin; pedesaan.

Ruaida Murni dan Mulia Astuti (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat

Condition of Families Receiving Social Assistance to Persons With Severe Disabilities

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 295 - 310

This study is aimed to comprehend the condition of families receiving severe disability social assistant program (ASPDB), which is seen from the economy aspect and family competence aspect in caring for persons with severe disabilities (PDB). Data and information were collected through interviews with families of persons with disabilities, through the observation of the condition of persons with disabilities (PDB) and their families concerned and also through study of documentations. The research was conducted in Padang city and the results showed that the families economic condition of the persons with severe disabilities (PDB) generally made a living with income below Padang city regional minimum wage, which was obtained from permanent jobs and additional jobs. But within this condition, families of PDB said that they were able to fulfill the needs of persons with severe disabilities (PDB), although it still fulfilled at minimal needs as what it is. The families of persons with severe disabilities did not precisely know the specific need of persons with severe disabilities, even once there was a respondent who said that the needs of persons with severe disabilities are merely the same as that of normal people. The families of persons with severe disabilities know where to do the therapy, but the majority of persons with severe disabilities are not given therapy as one of the health care needs under certain reasons as follow: persons with severe disabilities have already been mature, it is difficult to take them to the therapist, and no improvement seen though undergoing therapy. The way the families bring the persons with severe disabilities taking shower reflects that the families concerned have not possessed sufficient knowledge of how to bathe them in accordance with their disabilities. Most of families have never felt disappointed or upset with the condition of their disabilities.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi keluarga penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas berat (ASPDB), dilihat dari aspek ekonomi dan aspek kompetensi keluarga dalam merawat PDB. Data dan informasi dihimpun melalui wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas, observasi terhadap kondisi PDB dan keluarga yang bersangkutan serta studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kota Padang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga PDB pada umumnya dibawah upah minimum regional Kota Padang, yang diperoleh dari pekerjaan tetap dan pekerjaan tambahan. Keluarga mengatakan mampu memenuhi kebutuhan PDB, walau masih pada tahap apa adanya. Keluarga PDB belum mengetahui benar kebutuhan PDB secara spesifik, bahkan ada responden yang mengatakan kebutuhan PDB sama dengan kebutuhan orang normal. Keluarga mengetahui tempat terapi, tetapi sebagian besar PDB tidak diberi terapi sebagai salah satu kebutuhan pemeliharaan kesehatan, dengan alasan sudah dewasa, sulit dibawa ke tempat terapi, dan tidak ada perubahan meski diterapi. Cara keluarga memandikan mencerminkan bahwa keluarga belum memahami bagaimana cara memandikan yang sesuai dengan kondisi PDB. Sebagian besar keluarga tidak pernah merasa kecewa atau kesal dengan kondisi PDB. Berdasar hasil penelitian disarankan bahwa keluarga terkait perlu melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan perawatan bagi PDB.

Kata kunci: kondisi keluarga; asistensi sosial; penyandang disabilitas berat

Based on the research, it is recommended that families concerned need to enhance the knowledge and skills in providing care and services to persons with severe disabilities.

Keyword : *family condition; social assistants; people with severe disabilities.*

Hari Harjanto Setiawan dan Bambang Pudjianto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat
Fulfillment of People With Severe Disabilities Rights
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 311 - 322

Persons with severe disabilities (PDB) as a matter of fact are disabled indeed and their disabilities are not possible to be rehabilitated, thus they can not perform their daily life activities and or throughout their life they depend on the help of others, and they are unable to support their own life by themselves. It describes that persons with severe disabilities depend on and need the help of others along their life in fulfilling their rights. Fulfillment of their rights is somewhat expected much from their family. This study is quantitative research that will address the fulfillment of their rights from their family can be measured by two important indicators, namely the family economy and the family competence. This research was conducted in Jepara which is one of the ASPDB beneficiaries region. The results of this study answer the hypothesis that the influence of family economic condition towards the fulfillment of the persons with severe disabilities rights (PDB) is very little compared to the influence of family competences towards the fulfillment of the PDB rights.

Keywords: *persons with severe disabilities (PDB); family economic, family competence*

Penyandang disabilitas berat (PDB) adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa PDB tergantung dan membutuhkan orang lain seumur hidup dalam memenuhi haknya. Pemenuhan hak PDB diharapkan adalah dari keluarga. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan mengemukakan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh keluarga diukur dari dua indikator penting yaitu ekonomi keluarga dan kompetensi keluarga. Penelitian ini dilakukan di Jepara yang merupakan salah satu wilayah penerima bantuan Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Hasil penelitian ini menjawab hipotesis bahwa pengaruh ekonomi keluarga terhadap pemenuhan hak PDB sangat kecil dibandingkan pengaruh kompetensi keluarga terhadap pemenuhan hak PDB.

Kata kunci: *penyandang disabilitas berat; ekonomi keluarga; kompetensi keluarga*

Tyas Eko Raharjo F. (B2P3KS Yogyakarta)

**Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia
di Daerah Perbatasan**

*Strategy of Education Needs Fulfillment for Children of Indonesian Migrant Workers in the
Inter-Country Border Area*

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 September 2017, hal 323 - 332

This study describes the strategy of fulfilling the children educational needs of Indonesian Migrant Workers (TKI) in the country-to-country border areas. The research was conducted in Sebatik Tengah sub-district, a border area facing directly to Malaysia. The strategy of fulfilling the children educational needs of TKI is both beneficial either for parents who work as TKI and for local government policy makers in formulating programs to meet the educational needs of children. This study used a qualitative approach and was based on inductive pattern of thinking. The qualitative approach emphasized more on the meaning rather than that of generalization, data was collected through observation, interview, and documentation techniques. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that there were three strategies of fulfilling the children educational needs of Indonesian Workers (TKI) in the border areas of Sebatik Tengah sub-districts, namely the strategy of fulfilling the needs of institution-base education, of family-base, and that of community-base. These three strategies can provide the services for Indonesian Workers (TKI) children in fulfilling their educational needs. It is hoped that the local government is able to construct and to formulate children protection program for Indonesian migrant labor by considering their educational needs and rights.

Keywords: protection strategy; children migrant labor; country-to-country border areas

Penelitian ini menggambarkan strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah perbatasan antarnegara. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sebatik Tengah, daerah perbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut bermanfaat bagi orang tua yang bekerja sebagai TKI dan pemangku kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan program. Pendekatan penelitian secara kualitatif dan berdasarkan pola berpikir secara induktif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, ada tiga strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak TKI di perbatasan antarnegara Kecamatan Sebatik Tengah yaitu strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan berbasis kelembagaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Ketiga strategi tersebut dapat memberikan layanan bagi anak TKI dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Berdasar ketiga strategi tersebut diharapkan pemerintah setempat dapat menyusun dan merumuskan program perlindungan anak TKI dengan memperhatikan kebutuhan dan hak anak.

Kata kunci: strategi perlindungan; anak TKI; daerah perbatasan antarnegara.

Pengujian Standar Kompetensi Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial *Assessment of Social Assistant Competencies Standard on the Base of Social Work Systems*

Istiana Hermawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp (0274) 377265

E-mail: istianahermawati@yahoo.co.id. HP 085228716070.

Diterima 15 September 2017, diperbaiki 2 Oktober 2017, disetujui 4 Oktober 2017

Abstract

This This research is aimed to describe social companion profiles; identifying social companion qualifications and the amount of incentives received per month; describing competences of the social companion; describing the development of social companion competence standards, and formulating standard hypothetical models of social companion on the base of social work systems. The research was conducted in five locations involving 150 respondents that were determined by proportional random sampling technique and a number of informants that were determined purposively. The data are collected through questionnaires, in-depth interviews, FGD and documents. The data are then analyzed quantitatively and qualitatively, which are both used simultaneously. The results of the study indicate that: 1) The majority of female companions are in the range of productive age, in married status, relatively well educated, coming from the local area and on average accompanying 48 PMKS, 2) From companion qualification, only 28 percent of social companions are qualified as professional social workers, the majority of companions (as many as 67 percent) have never attended the training of consolidation as social companions, and 75.33 percent of social companions received incentives of less than Rp. 500.000, - per month. Many companions function to accompany several PMKS programs and because of the little amount of the incentive they received, consequently they are less focused and their performance is less optimal; 3). Based on testing of contract model of social companion competence with confirmatory factor analysis (CFA) technique, it can be concluded that the competence of social companion was successfully reflected by certain knowledge, skill and values / attitude variable. Among the three variables tested, the factor content of the skill variable is merely the highest in forming competence; 4) The recruitment system of companions is identified in three ways, namely: a) direct recruitment system; b) election system; c) appointment system; 5) Developing social companion standard on the base of social work system, can be created by optimizing various components in the system including recruitment system, human resource management system, intervention system and training system. This research recommends that it is urgently needed to decide the related legislation to national standard of social companion so that the position of the companion is growing stronger and its competence is standardized; it is necessary to increase the competence of social companion, either through formal and nonformal education channels and it is also necessary to apply a hypothetical model of development of social companion standards based on the social work system as proposed.

Keywords: *standards competency; social assistant; social work system*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil pendamping sosial, mengidentifikasi kualifikasi pendamping sosial dan besarnya insentif yang diterima per bulan, mendeskripsikan kompetensi pendamping sosial, mendeskripsikan pengembangan standar kompetensi pendamping sosial, dan merumuskan model hipotetik standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial. Penelitian dilakukan di lima lokasi dengan melibatkan 150 responden yang ditentukan dengan teknik *proportional random sampling* dan sejumlah informan yang ditentukan secara *purposive*. Data dikumpulkan dengan angket, wawancara mendalam, FGD dan dokumen. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, keduanya digunakan secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Mayoritas pendamping berjenis kelamin perempuan, berada dalam rentang usia produktif, berstatus kawin, berpendidikan memadai, berasal dari daerah setempat dan rata-rata mendampingi 48 PMKS; 2) Dari kualifikasi pendamping, hanya 28 persen pendamping yang memiliki kualifikasi sebagai pekerja sosial profesional, mayoritas pendamping (67 persen) belum pernah mengikuti diklat pemantapan tenaga

pendamping, dan 75,33 persen pendamping menerima insentif kurang dari Rp. 500.000,- per bulan. Banyak pendamping merangkap tugas mendampingi beberapa program PMKS karena insentif yang diterima terlalu kecil, akibatnya mereka kurang fokus dan kinerjanya kurang optimal; 3) Berdasarkan pengujian model kontrak kompetensi pendamping sosial dengan teknik *confirmatory factor analysis* (CFA) dapat disimpulkan, bahwa kompetensi pendamping sosial berhasil direfleksikan oleh variabel pengetahuan, keterampilan dan nilai/sikap tertentu. Di antara ketiga variabel yang diuji, muatan faktor variabel keterampilan ternyata paling tinggi dalam membentuk kompetensi; 4) Sistem rekrutmen pendamping teridentifikasi melalui tiga cara, yaitu: a) sistem rekrutmen langsung, b) sistem pemilihan dan c) sistem penunjukan; 5) Pengembangan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial, dapat diciptakan dengan mengoptimalkan berbagai komponen sistem yang meliputi sistem rekrutmen, manajemen SDM, intervensi dan sistem pelatihan. Penelitian ini merekomendasikan agar segera ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait standar nasional pendamping sosial sehingga posisi pendamping semakin kuat dan kompetensinya terstandar; perlu peningkatan kompetensi pendamping sosial, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal serta perlu diterapkan model hipotetik pengembangan standar pendamping sosial berbasis pekerjaan sosial sebagaimana diusulkan.

Kata kunci: standart kompetensi; pendamping sosial; sistem pekerjaan sosial

A. Pendahuluan

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial secara tegas mengamanatkan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan sosial (hak warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara). Kenyataan empiris menunjukkan, banyak warga negara Indonesia belum terpenuhi haknya untuk hidup sejahtera (mengalami hambatan atau permasalahan dalam mencapai kesejahteraan sosial). Hal ini tercermin dari masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia.

Menurut Data Pusdatin Kesejahteraan Sosial tahun 2013, jenis masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi tujuh sasaran yang terdiri dari 24 PMKS, yaitu: kemiskinan, meliputi dua PMKS yaitu fakir miskin dan warga rawan sosial ekonomi, dengan sasaran sebanyak 2,5 juta RTSM); keterlantaran, meliputi tiga PMKS yaitu anak terlantar, anak balita terlantar dan lanjut usia terlantar dengan sasaran sebanyak 7.191.551 jiwa; kecacatan, meliputi dua PMKS yaitu orang dengan kecacatan dan anak dengan kecacatan dengan sasaran sebanyak 2.126.785 jiwa; keterpencilan, meliputi satu PMKS yaitu KAT dengan sasaran sebanyak 213.080 KK; ketunaan dan penyimpangan perilaku, meliputi enam PMKS yaitu tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lapas, ODHA dan korban NAPZA, dengan sasaran sebanyak

3.872.287 jiwa; bencana, meliputi dua PMKS yaitu korban bencana alam dan korban bencana sosial dengan sasaran sebanyak 1.416.744 jiwa; dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi dua PMKS, yaitu korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial dengan sasaran 889.987 jiwa.

Kondisi PMKS dengan segala keterbatasannya mengakibatkan aksesibilitas mereka terhadap sumber pelayanan kebutuhan dasar terbatas sehingga mengakibatkan kualitas dan tingkat kesejahteraan mereka relatif rendah. Berkembangnya masalah kemiskinan dan masalah sosial lain akibat krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pemecahan masalah sosial, maka pemerintah khususnya Kementerian Sosial meluncurkan berbagai program. Upaya mengawal pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan menangani masalah sosial yang semakin kompleks, diperlukan tenaga pekerja sosial profesional dan atau pendamping sosial yang kompeten (terstandar).

Dalam ilmu pekerjaan sosial terdapat beberapa istilah yang terkait dengan pendamping, seperti Rex A. Skidmore (1994) memberi istilah *community organizer*, Jim Ife (1995) memberi istilah *community worker*, Cox (2001) member istilah *frot line worker* untuk maksud yang sama.

Di kalangan LSM/NGO, pendamping lebih populer dengan istilah fasilitator, yaitu tenaga khusus yang bertugas untuk melakukan intervensi atau dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau institusi dalam masyarakat.

Pendamping sosial menurut Edi Suharto (2006) adalah agen atau seseorang yang bertugas untuk mendampingi masyarakat/ PMKS yang tidak berdaya karena hambatan internal dan eksternal. Pendamping sosial bertugas untuk menciptakan interaksi dinamis di antara kelompok miskin dan petugas untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan. Pendamping sosial menurut *draf Permensos tentang Standar Nasional Pendamping Sosial* tahun 2013 adalah seseorang yang telah dididik dan atau dilatih untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (*draf Permensos tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*).

Dalam konteks pembangunan masyarakat, kegiatan pendampingan dilakukan oleh tenaga khusus yang bertugas untuk: (1) membina kelompok masyarakat yang terkena krisis sehingga menjadi kebersamaan tujuan dan kegiatan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan, (2) sebagai pemandu atau fasilitator, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing kegiatan kelompok. Dalam upaya mewujudkan otonomi dan kemandirian masyarakat perlu bimbingan atau pendampingan. Fasilitator identik dengan tugas pendampingan (Wahyudin, 2004: 1-2).

Payne (1986) menambahkan, bahwa prinsip utama pendampingan adalah *'making the best of client resources'*. Dalam konteks pekerjaan sosial ini dapat dimaknai, bahwa pekerja sosial

tidak melihat klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa, mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki nilai positif dan berkontribusi bagi proses pemecahan masalah.

Pendamping sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki peran yang strategis dalam menyukseskan program pembangunan kesejahteraan sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa: (1) masih terdapat tenaga pendamping program kesejahteraan sosial yang sangat beragam dengan kompetensi yang berbeda-beda, sehingga proses pendampingan yang diberikan sangat beragam dan tidak terstandar; (2) banyak tenaga pendamping yang merangkap beberapa program kesejahteraan sosial; (3) kinerja pendamping sulit diukur tingkat efektivitasnya; (4) terjadi keragaman besarnya insentif yang diterima oleh pendamping, antara program yang satu dengan program yang lain. Kesenjangan besarnya insentif ini sering menimbulkan kecemburuan sosial di antara para pendamping dan dapat merusak iklim kerja di lapangan serta mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan pendamping kepada masyarakat yakni PMKS.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka kajian terhadap pengembangan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial *urgen* untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan profil pendamping sosial, mengidentifikasi kualifikasi pendamping sosial dan besarnya insentif yang diterima per bulan, mendeskripsikan kompetensi pendamping sosial, mendeskripsikan pengembangan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial dilihat dari sistem rekrutmen, sistem manajemen SDM, sistem intervensi sosial dan sistem pelatihan serta pengembangan kapasitas tenaga pendamping sosial, serta merumuskan model hipotetik standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial.

Manfaat penelitian secara praktis, hasil penelitian dapat memberi masukan atau rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI, khususnya

Biro Kepegawaian dan Organisasi, Direktorat terkait serta pengambil kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial pada lembaga/instansi terkait dalam upaya mengembangkan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian yang relevan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan, yaitu memadukan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Fokus penelitian adalah: (a) pendamping sosial berbagai program Kementerian Sosial dan program terkait lain, baik yang bersifat program asistensi, program pemberdayaan, program perlindungan maupun program pendukung lain yang bersifat lintas sektoral; (b) kompetensi pendamping sosial; (c) kualifikasi pendamping sosial dan besar insentif pendamping per bulan; (d) sistem rekrutmen tenaga pendamping sosial; (e) sistem manajemen SDM pendamping sosial; (f) sistem intervensi sosial; dan (g) sistem pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping sosial.

Penelitian ini mengambil sampel lima lokasi yang merupakan wilayah kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), yaitu Kota Padang (Sumbar), Kabupaten Bandung (Jabar), Kabupaten Gunungkidul (DIY), Kota Banjarbaru (Kalsel), dan Kota Makassar (Sulsel). Subyek atau informan utama dalam penelitian ini adalah para pendamping sosial yang bertugas mendampingi berbagai program Kementerian Sosial dan program terkait lain di lokasi penelitian. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Informan lain yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: (1) pengambil kebijakan dari instansi pemerintah: Dinso TK I dan II, Pemda/Bappeda, B2P2KS, BPS, Perguruan Tinggi, Pos, Camat & Lurah; (2) Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki program pendampingan; (3) dunia usaha (yang menyelenggarakan program CSR); dan

(4) sasaran program (masyarakat/PMKS). Secara teknis masing-masing lokasi akan diambil 30 orang pendamping sosial, 18 orang perwakilan dari pengambil kebijakan/ *stakeholder* (Dinso Provinsi, Dinso TK II, Asisten II (Kesbang), Asisten III (Aset & Keuangan), Bappeda, dua orang dari LSM & dunia usaha, 10 orang penerima program (masyarakat, PMKS). Dengan demikian, untuk kepentingan analisis, setiap lokasi dibutuhkan sekitar 60 subyek penelitian sebagai informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (1) pengisian instrumen (angket & questioner), (2) wawancara mendalam (*in depth interview*), (3) diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion*), (4) studi dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah untuk data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif (melihat gambaran subyek penelitian) dan pengujian konstruk kompetensi pendamping sosial digunakan statistik inferensial dengan teknik *confirmatory factor analysis/CFA* (Joreskog, K.G & Sorbom, D., 1996; Kline, 2005). Data kualitatif dianalisis secara deskriptif interpretatif (pemaknaan/interpretasi data secara naratif).

C. Standar Kompetensi Pendamping Sosial

1. Gambaran Umum Pendamping Sosial di Lima Lokasi Penelitian

Dari hasil eksplorasi terhadap 150 responden yang tersebar di lima lokasi penelitian dapat diidentifikasi sembilan jenis program dampingan yaitu: asuransi lanjut usia (ASLUT), program keluarga harapan (PKH), program kesejahteraan sosial anak (PKSA), asuransi sosial orang dengan kecacatan (ASODK), kelompok usaha (KUBE) Fakir Miskin, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), pendampingan korban Napza, penanganan korban bencana alam, dan rumah tidak layak huni (RTLH)/bedah rumah. Rata-rata setiap pendamping sosial mendampingi 48 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Mayoritas responden (59,33 persen) berjenis kelamin perempuan, 65,33 persen berada pada rentang usia produktif

(31-50 tahun) dengan rentang usia terendah 18 tahun, tertinggi 67 tahun dan rata-rata 43 tahun, 84,67 persen responden berstatus kawin. Di lihat dari daerah asal, mayoritas responden (88,67 persen) adalah penduduk asli. Ini berarti, bahwa dalam rekrutmen pendamping sosial di lokasi penelitian lebih memprioritaskan penerimaan penduduk asli daerah. Dilihat dari tingkat pendidikan, responden terbanyak berpendidikan D IV /S1 (44,67 persen) dan terbanyak kedua (42 persen) berpendidikan SLTA. Hal tersebut menunjukkan, bahwa pendidikan responden relatif memadai.

2. Kualifikasi Pendamping Sosial dan Besarnya Insentif yang Diterima

Kualifikasi pendamping sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki dan pengalaman kerja sebelumnya. Dari aspek pendidikan mayoritas responden (53,33 persen) berpendidikan relatif tinggi, yaitu D3 s.d S2. Mayoritas pendamping sosial berkualifikasi sebagai tenaga kesejahteraan sosial (67,33 persen), 65 persen dari tenaga kesejahteraan yang ada merupakan asisten pekerjaan sosial (lulus SMA-D3).

Tenaga pendamping sosial yang berkualifikasi sebagai pekerja sosial profesional (berpendidikan D4/S1 pekerjaan sosial/IlmU Kesejahteraan Sosial) hanya sebesar 28 persen, terdiri dari asisten pekerja sosial (5,33 persen) dan pekerja sosial profesional dasar (22,67 persen). Terdapat 4,67 persen pendamping sosial yang bukan tergolong dalam kualifikasi pendamping sosial karena mereka berpendidikan rendah (SD-SMP).

Dilihat dari aspek pengabdian sebagai pendamping, 87 persen responden memiliki masa pengabdian antara satu hingga lima tahun, 61,33 persen responden pernah mengikuti diklat dan atau bimtek terkait kegiatan pendamping sosial antara satu sampai lima kali dan mayoritas responden (36 persen) pernah mengikuti pelatihan/ bimtek satu hingga dua kali yaitu setelah lolos rekrutmen (dalam penyiapan tenaga pendamping).

Sebanyak 67 persen responden menyatakan sejak menjadi pendamping sosial belum pernah mengikuti pendidikan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknik (bimtek) lanjutan, sehingga kebutuhan diklat pemantapan tenaga pendamping sosial bagi responden merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas pendamping. Dilihat dari pengalaman sebagai pendamping sosial, 66,67 persen responden memiliki pengalaman mendampingi satu sampai tujuh jenis program Kementerian Sosial. Ini menunjukkan, bahwa pekerjaan sebagai pendamping adalah pekerjaan yang sudah cukup dikenal bagi responden.

Menurut status pekerjaan responden, 56 persen responden menjadikan pendamping sosial sebagai pekerjaan pokok dan 44 persen sebagai pekerjaan sampingan. Rata-rata penghasilan responden Rp.957.720,- per bulan. Dilihat dari besar insentif yang diterima responden per bulan, 75,33 persen responden menerima insentif kurang dari Rp. 500.000,- dan rata-rata Rp. 683.610,- per bulan.

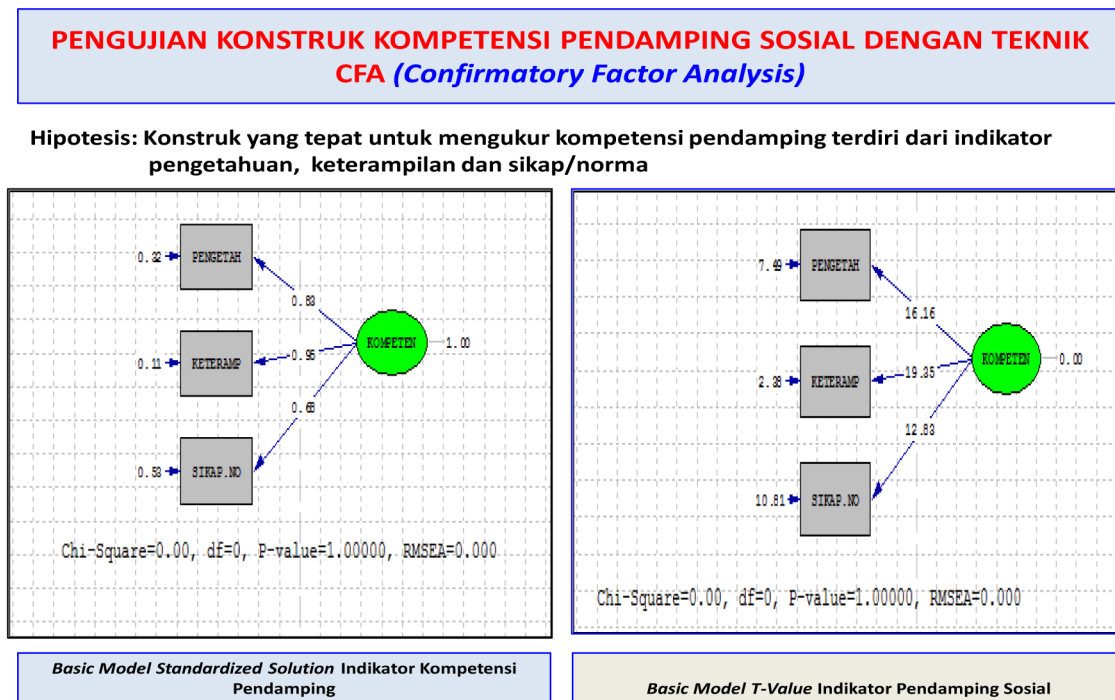
3. Kompetensi Pendamping Sosial

Kompetensi pendamping sosial menurut persepsi responden adalah kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh pendamping sosial agar dapat menjalankan tugas di bidang pekerjaan sosial (menangani permasalahan sosial yang dialami oleh PMKS dan mengembangkan potensi sumber yang ada secara optimal dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan). Responden yang lain merumuskan pendamping sosial adalah kemampuan, kapasitas, keahlian di bidang pekerjaan sosial yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas pendampingan. Pendamping sosial juga dimaknai responden sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai pendamping sosial di masyarakat.

Secara eksploratif penggalan indikator kompetensi pendamping sosial di lima lokasi

penelitian teridentifikasi 22 item pengetahuan, 26 item keterampilan, dan 23 item nilai/sikap. Hasil pengujian model konstrak (dengan teknik *confirmatory factor analysis*) menunjukkan, bahwa *kompetensi pendamping sosial berhasil direfleksikan oleh indikator pengetahuan, keterampilan dan sikap* ($\chi^2 = 0,00$, P-value: 1 (menurut parameter *goodness of fit index model* (GOFI)

sangat sempurna (*perfect*). Semua manifes memiliki t hitung > 2, dan nilai reliabilitas konstrak = $0,863 > 0,70$, sehingga dapat dikatakan, bahwa konstrak yang dihipotesiskan pada penelitian ini cocok dengan data empiris (hipotesa diterima). Ini berarti, kompetensi pendamping dapat direfleksikan oleh indikator pengetahuan, keterampilan, sikap dan norma.



Gambar 1. Model Pengukuran Konstrak Kompetensi Pendamping Sosial

Hasil pengujian model konstrak kompetensi pendamping sosial menunjukkan, bahwa ketiga indikator (pengetahuan, keterampilan, sikap/norma) memiliki kontribusi yang relatif besar dalam membentuk kompetensi pendamping. Dari ketiga variabel yang diuji, variabel keterampi-

lan memiliki muatan faktor standar (λ) terbesar (0,95), menyusul pengetahuan (0,83). Ini berarti, kompetensi pendamping banyak dibentuk oleh variabel keterampilan dan pengetahuan. Ringkasan hasil pengukuran konstrak kompetensi pendamping sosial dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengukuran Konstrak Pendamping Sosial

<i>Manifest</i>	λ Standar	t-hitung	<i>Construct Reliability (CR)</i>	<i>Variance Extracted (VE)</i>	Keterangan
Pengetahuan	0,83	16,16	0,863 $\geq$ 0,70	0,675 $\geq$ 0,50	Validitas: $t\text{-test} > 2$; λ Standard $\geq$ 0,7 atau $\geq$ 0,50 Reliabilitas: CR $\geq$ 0,70; VE $\geq$ 0,50
Keterampilan	0,95	19,35			
Sikap/Norma	0,68	12,82			

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam membentuk pendamping sosial yang kompeten hendaknya pendamping diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, bimtek yang relevan sehingga kapasitasnya meningkat (sesuai fakta di lapangan, mayoritas pendamping tidak berlatar belakang ilmu pekerjaan sosial dan jarang memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan, bimtek yang relevan). Implikasi kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan peran & fungsi lembaga penyelenggara diklat di Kementerian Sosial (Pusdiklat & BBPPKS) dalam menyelenggarakan pelatihan, bimtek pengembangan kapasitas tenaga pendamping sosial.

4. Sistem Pekerjaan Sosial

Sistem Rekrutmen

Menurut hasil riset, ada tiga sistem terkait rekrutmen tenaga pendamping sosial: a) Mengajukan lamaran langsung ke Kementerian Sosial, ditemukan pada 37 orang responden dari program kesejahteraan sosial anak (PKSA) dan program keluarga harapan (PKH). b) Dipilih dari orang-orang yang aktif dalam bidang, kegiatan sosial, sebanyak 106 orang responden dari program kelompok usaha bersama (Kube), asistensi orang dengan kecacatan (ASODK), dan asistensi lanjut usia (ASLUT). c) Menerima tunjangan langsung karena memiliki relasi dengan aparat pemerintah, pemrakarsa program (kementerian, dinas sosial provinsi/kabupaten/kota), sebanyak tujuh orang responden dari program penanganan korban bencana alam, bedah rumah/rumah tidak layak huni (RTLH), wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), dan RBM korban napza.

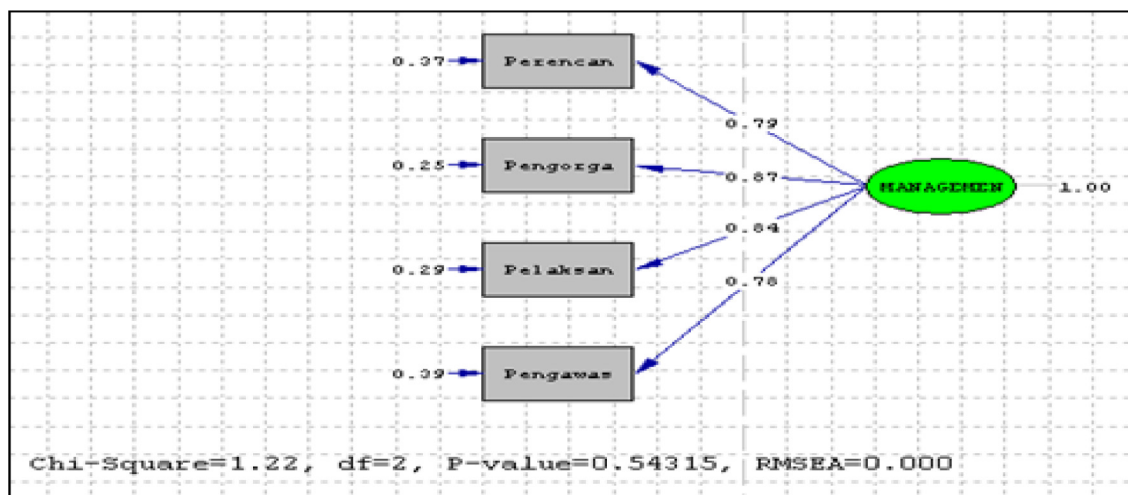
Prosedur umum yang ditempuh untuk melakukan rekrutmen pendamping adalah: a) calon pendamping melihat pengumuman tentang rekrutmen pendamping melalui Website Kemensos/Dinso TK I/II; b) menyiapkan berkas yang dibutuhkan/melengkapi administrasi; c)

mengirimkan berkas melalui website Kemensos/Dinso setempat; d) mengikuti seleksi berkas; e) mengikuti seleksi tertulis; f) mengikuti Test Psikologi (*Psikotest*) untuk formasi Pekerja Sosial; g) mengikuti seleksi lisan dan test wawancara; h) pengumuman kelulusan dari penyelenggara dapat diakses melalui website Kemensos/Dinso setempat atau melalui surat pemberitahuan; i) calon pendamping terseleksi akan diikutkan dalam program sambil menunggu surat panggilan untuk mengikuti diklat calon pendamping; j) setelah selesai mengikuti diklat mendapatkan penugasan sebagai pendamping sosial di wilayah kerja tertentu.

Prosedur khusus yang ditempuh untuk melakukan rekrutmen pendamping adalah: 1) tergantung kebijakan pada masing-masing program; 2) untuk PKH dan Sakti Peksos seleksi dilakukan oleh pemerintah pusat langsung dengan melibatkan pemda setempat; 3) pada program tertentu, misal Seleksi WKSBM seleksi pendamping dilakukan melalui penunjukkan dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki loyalitas tinggi dan pengalaman dalam melakukan program pendampingan.

Sistem Manajemen

Secara kuantitatif terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel manajemen pendamping sosial, yakni variabel perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Hasil pengujian kontrak sistem manajemen pendamping sosial dengan enam parameter *goodness of fit index*, menunjukkan, bahwa sebagian besar ukuran *goodness of fit index model (GOFI model)* terpenuhi (lima dari enam parameter). Ini berarti, model yang diajukan mendapat dukungan kuat dari sampel untuk menjelaskan populasi yang ada. Model pengukuran kontrak manajemen pendamping sosial beserta indikatornya dapat dilihat pada Gambar.2



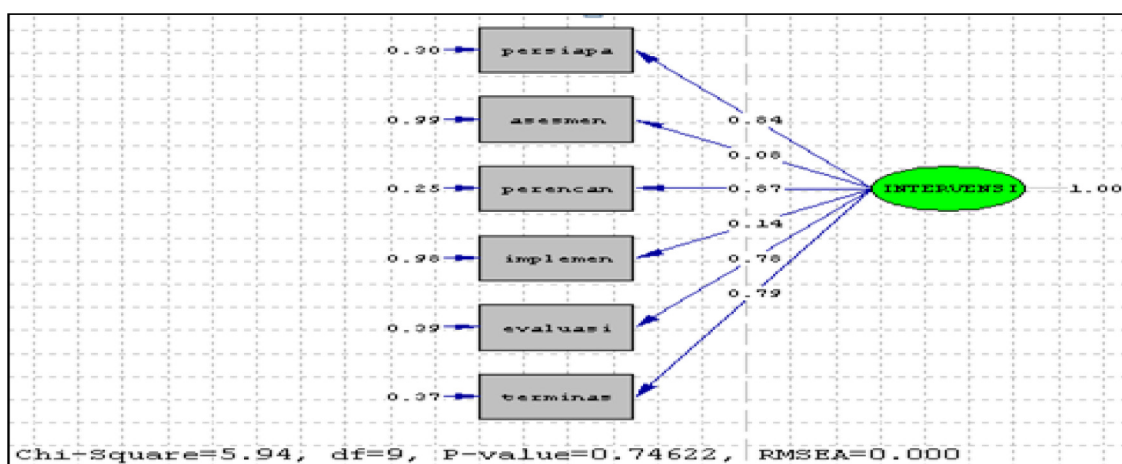
Gambar 2. Model Pengukuran Konstrak Sistem Manajemen Pendamping Sosial

Dari hasil pengukuran konstruk manajemen pendamping sosial dapat diketahui, bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap manajemen. Hal ini terlihat dari muatan faktor semua variabel di atas 0,70. Dari empat variabel yang mempengaruhi manajemen pendamping sosial, ternyata variabel pengorganisasian dan variabel pelaksanaan memiliki muatan faktor relatif besar (0,87) dan (0,84) di banding muatan faktor variabel perencanaan (0,79) dan variabel pengawasan (0,78). Ini menunjukkan, bahwa dalam sistem manajemen tenaga pendamping sosial yang dilaksanakan selama ini, keempat variabel memiliki andil yang relatif besar dalam menentukan pendamping yang berkompeten. Dengan kalimat lain, untuk menghasilkan pendamping sosial yang baik, perlu pengorganisasian yang baik di antara berbagai pihak terkait, perlu diterapkan sistem manajemen yang transparan, inovatif dan akomodatif. Di samping itu, juga perlu dibuat perencanaan yang matang dengan menggunakan teknik yang relevan sehingga menghasilkan tenaga pendamping yang sesuai kebutuhan (memiliki kom-

petensi yang dibutuhkan) serta melakukan pengawasan, pengendalian secara periodik sesuai standar kriteria tertentu.

Sistem Intervensi Sosial

Sistem intervensi diukur dari bagaimana pendamping melakukan persiapan (*engagement*), melaksanakan identifikasi masalah dan kebutuhan (*assessment*), merencanakan kegiatan (*designing*), mengimplementasikan kegiatan (*implementation*), mengevaluasi kegiatan (*evaluation*) dan melakukan terminasi (*termination*). Hasil pengujian konstruk sistem intervensi dalam pendampingan sosial dengan enam parameter *goodness of fit index*, menunjukkan, bahwa sebagian besar ukuran *goodness of fit index model* (*GOFI model*) terpenuhi (lima dari enam parameter). Ini berarti, model yang diajukan mendapat dukungan kuat dari sampel untuk menjelaskan populasi yang ada. Hasil pengukuran konstruk sistem intervensi dalam pendampingan sosial beserta indikatornya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Pengukuran Konstrak Sistem Intervensi dalam Pendampingan Sosial

Dari hasil pengukuran konstrak sistem intervensi dalam pendampingan sosial dapat diketahui, bahwa variabel yang diukur memiliki pengaruh yang beragam terhadap sistem intervensi. Dari enam variabel yang berpengaruh terhadap sistem intervensi dalam pendampingan sosial, ternyata variabel perencanaan dan variabel persiapan memiliki muatan faktor relatif paling besar (0,87) dan (0,84), sementara variabel asesmen dan evaluasi juga memiliki muatan faktor relatif besar (0,79) dan (0,78). Variabel implementasi dan variabel terminasi memiliki muatan faktor relatif kecil (0,14) dan (0,08). Ini menunjukkan, bahwa sistem intervensi dalam pendampingan sosial sangat dipengaruhi oleh keempat variabel yaitu perencanaan, persiapan, asesmen dan evaluasi. Keempat variabel ini memiliki andil yang relatif besar dalam menentukan keberhasilan intervensi (karena memiliki muatan faktor di atas 0,70).

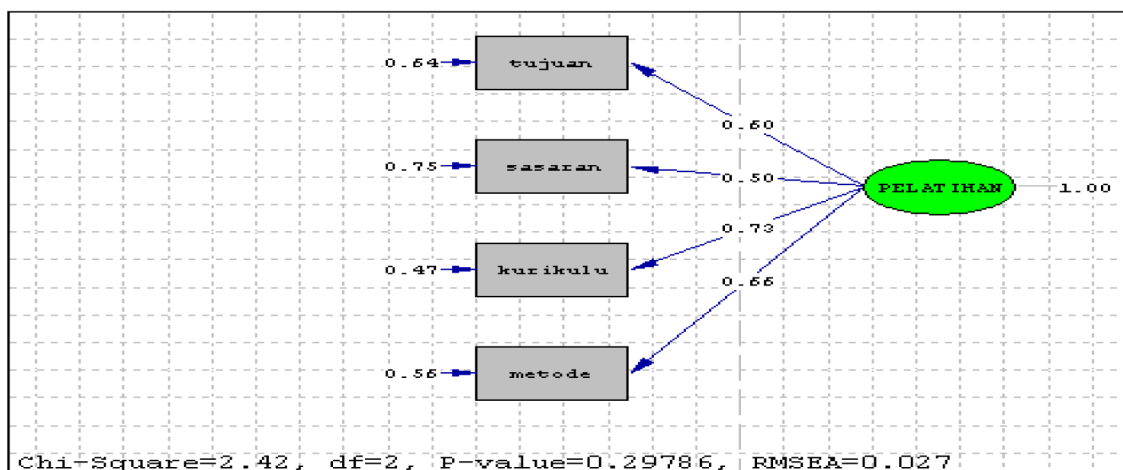
Hasil pengukuran konstrak juga menunjukkan, bahwa sistem intervensi yang dilakukan dalam pendampingan sosial sangat lemah dalam hal implementasi dan terminasi. Hal ini relevan dengan kenyataan di lapangan, bahwa mayoritas tenaga pendamping sosial yang ada, tidak memiliki latar belakang pekerjaan sosial dan jarang mengikuti diklat atau bimtek yang relevan, sehingga dalam mengimplementasikan program pendampingan, mereka lebih banyak

mengandalkan kepada kebiasaan ataupun naluri (insting). Demikian halnya dalam melakukan intervensi juga tidak jelas kapan berakhirnya karena terminasi program tidak jelas.

Sistem Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial

Secara kuantitatif terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sistem pelatihan pendampingan sosial, yakni variabel tujuan, sasaran, kurikulum, dan metode pembelajaran. Hasil pengujian konstrak sistem pelatihan dengan menggunakan enam parameter, terbukti bahwa sebagian besar ukuran *goodness of fit index model (GOFI model)* terpenuhi. Dari enam parameter yang digunakan, lima parameter diantaranya, yaitu X^2 dan P , CFI, IFI, GFI dan AGFI dapat memenuhi kriteria (*GOFI model*), hanya satu kriteria yaitu RMSEA yang tidak dapat memenuhi kriteria (*GOFI model*). Dengan terpenuhinya sebagian besar kriteria (*GOFI model*) tersebut, berarti model yang dihipotesiskan dapat dinyatakan sesuai dengan data empirik. Artinya, model yang diajukan mendapat dukungan kuat dari sampel untuk menjelaskan populasi yang ada.

Model pengukuran konstrak sistem pelatihan pendamping sosial beserta indikatornya dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Model Pengukuran Konstrak Sistem Intervensi dalam Pendampingan Sosial

Dari hasil pengukuran konstrak sistem pelatihan pendamping sosial dapat diketahui, bahwa dari empat variabel yang berpengaruh terhadap sistem pelatihan pendamping sosial, ternyata variabel kurikulum memiliki muatan faktor relatif paling besar (0,73) dibanding variabel yang lain. Muatan faktor variabel metode pembelajaran, tujuan dan sasaran relatif kecil, yaitu masing-masing secara berurutan (0,66), (0,60) dan (0,50). Ini menunjukkan, bahwa sistem pelatihan pendampingan sosial secara umum relatif lemah karena memiliki muatan faktor kurang dari 0,70.

Hal ini relevan dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan, bahwa mayoritas tenaga pendamping sosial di lima lokasi penelitian, baru 67 persen yang pernah mengikuti diklat/bimtek terkait kegiatan pendampingan sosial. Dari responden yang pernah mengikuti diklat pendampingan, mayoritas (36 persen) di antaranya pernah mengikuti pelatihan/bimtek satu sampai dua kali yaitu setelah lolos rekrutmen (dalam penyiapan tenaga pendamping). Hasil penelitian menunjukkan 67 persen responden menyatakan belum pernah mengikuti diklat/bimtek lanjutan, sehingga dalam mengimplementasikan program pendampingan, mereka lebih banyak mengandalkan kebiasaan/ tradisi ataupun naluri (insting) sehingga hasilnya kurang optimal. Secara empiris, bekal pelatihan kesejahteraan sosial sebagian besar pendamping sosial diperoleh se-

cara otodidak dari pengalaman aktivitas sosial di masyarakat sebagai tenaga kesejahteraan sosial keluarga (TKSK) dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM). Hanya sebagian kecil pendamping yang mendapat bekal melalui diklat dan bimtek.

Berdasar kondisi tersebut, kebutuhan diklat pemantapan atau pengembangan kapasitas tenaga pendamping sosial bagi responden merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini mengingat fakta menunjukkan, bahwa hanya 28 persen tenaga pendamping yang berkualifikasi sebagai pekerja sosial profesional (berpendidikan D4/S1 pekerjaan sosial/Illmu Kesejahteraan Sosial), terdiri dari asisten pekerja sosial (5,33 persen) dan pekerja sosial profesional dasar (22,67 persen). Sebanyak 72 persen responden lain merupakan tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari beragam profesi atau latar belakang pendidikan.

Hasil penggalan secara empiris menunjukkan, bahwa sistem pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM pendamping ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pendidikan formal dengan memberi kesempatan pada pendamping untuk menempuh pendidikan lanjut di STKS dan melalui jalur pelatihan/bimtek. Pelatihan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui BBPPKS/Pusdiklat dan Dinas Sosial TK I & TK II, materi relatif relevan dengan kebutuhan, namun muatan lokal dirasa masih kurang (teru-

tama pelatihan yang dari pusat), metode menyesuaikan kebutuhan pelatihan namun cenderung masih klasikal (terutama yang diselenggarakan oleh pemda), alokasi waktu belum seimbang, artinya masih banyak teori dibanding praktik, sarana-prasarana untuk pelatihan yang sifatnya

program nasional relatif memadai, namun untuk program lokal kurang memadai; narasumber relatif kompeten. Sistem pelatihan tenaga pendamping menurut penggalian data empirik dapat dipaparkan dalam Tabel.2.

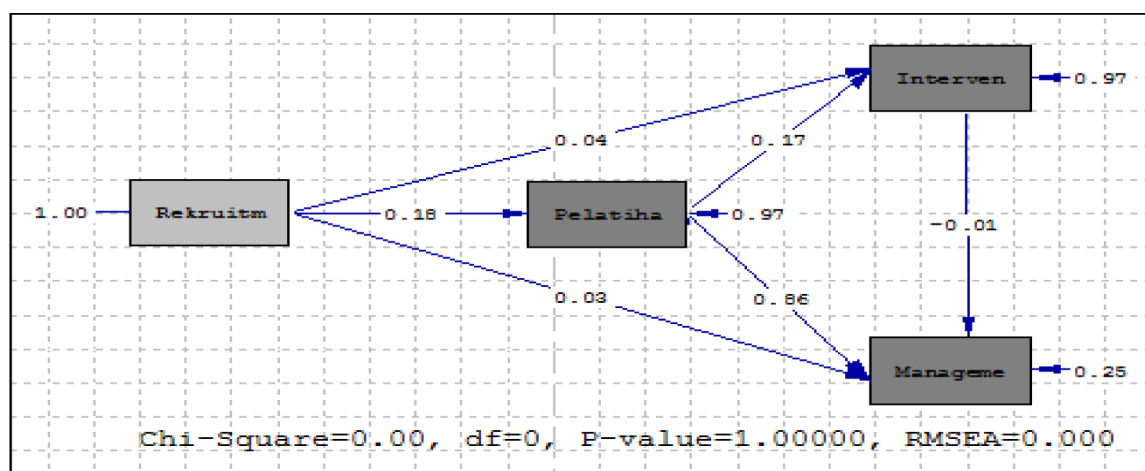
Tabel 2. Sistem Pelatihan Pendamping Sosial Menurut Program di Lima Lokasi Penelitian

Program	Penyelenggaraan		Materi	Metode	Sarpras	Alokasi Waktu (Teori: praktik)	Narasumber
	Kemensos	Dinso TK I/II					
Aslut	V	V	70% Relevan	Andragogi	Kurang memadai	80:20	Cukup kompeten
PKSA	V	V	Relevan	Menyesuaikan	Cukup Memadai	60:40	Kompeten
PKH	V	V	Relevan	Menyesuaikan	Memadai	70:30	Kompeten
ASODK	-	V	70% Relevan	Menyesuaikan	Kurang memadai	80:20	Cukup kompeten
KUBE FM	V	V	80% Relevan	Andragogi	Cukup Memadai	70:30	Cukup kompeten
WKSBM	-	V	70% Relevan	Andragogi	Kurang memadai	80:20	Cukup kompeten
RBM Korban Napza	-	V	70% Relevan	Menyesuaikan	Kurang memadai	80:20	Cukup kompeten
Penangan- an KBA	-	V	70% Relevan	Menyesuaikan	Cukup memadai	80:20	Cukup kompeten
RTLH	-	V	70% Relevan	Menyesuaikan	Cukup memadai	80:20	Cukup kompeten

5. Pengujian Model Standar Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial

Dengan mengkhususkan analisa pada empat variabel yang merupakan komponen pengembangan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial (variabel rekrutmen,

variabel pelatihan, variabel intervensi dan variabel manajemen), maka menurut hasil pengujian Model Standar Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial dengan *path analysis* dapat disusun model hubungan kausalitas antar variabel sebagaimana terlihat pada Gambar 5.



Gambar.5 Model Standardized Solution Standar Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial

Dari pengujian model kausalitas antar variabel dengan teknik *path analysis* dapat diketahui, bahwa: hubungan kausal *antara sistem pelatihan dengan sistem manajemen* memiliki pengaruh sebesar 0,86. Hal ini menunjukkan, bahwa sistem pelatihan dan sistem manajemen memiliki hubungan yang relatif kuat. Hubungan kedua variabel ini terbukti signifikan ($29,11 > 2$). Ini berarti, bahwa pelatihan pendamping sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola SDM pendamping sosial. Dengan pelatihan yang baik, maka pendamping sosial yang ada dapat dikelola sedemikian rupa (baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun dalam pengawasan) sehingga akan menghasilkan pendamping yang kompeten.

Hubungan kausal *antara sistem rekrutmen dengan sistem pelatihan* memiliki pengaruh sebesar 0,18. Hal ini menunjukkan, bahwa sistem pelatihan dan sistem intervensi memiliki hubungan yang relatif rendah, namun hubungan tersebut terbukti signifikan ($3,14 > 2$). Ini berarti, bahwa dengan sistem rekrutmen pendamping yang baik akan dapat ditentukan pendamping yang dibutuhkan dalam pelatihan dan jenis intervensi yang relevan.

Hubungan kausal *antara sistem pelatihan dengan sistem intervensi* memiliki pengaruh sebesar 0,17. Hal ini menunjukkan, bahwa sistem pelatihan dan sistem intervensi memiliki hubungan yang relatif rendah, namun hubungan tersebut terbukti signifikan ($2,86 > 2$). Ini berarti, bahwa sistem pelatihan yang baik akan menghasilkan intervensi yang relevan bagi kebutuhan pendamping. Ketiga jalur ini terbukti signifikan (koefisien $t > 2$), sehingga perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan terkait pengembangan standar kompetensi pendamping sosial.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya secara total terhadap pembentukan kompetensi pendamping adalah variabel sistem manajemen karena memiliki kontribusi pengaruh secara total sebesar 86 persen.

Dari penggalian secara empiris, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping sosial sebagai berikut. (1) Posisi tawar pendamping rendah karena belum adanya acuan hukum yang secara tegas mengatur dan menguatkan posisi pendamping; (2) Secara geografis, lokasi relatif jauh dan medan agak sulit dijangkau; (3) Terbatasnya sarana-prasarana (seperti tiadanya sarana transportasi umum ke lokasi, tidak adanya fasilitasi transportasi bagi pendamping, kamera, identitas dan sebagainya); (4) Kurangnya diklat (bimtek) lanjutan bagi pendamping sosial (pementasan kompetensi, pengembangan kapasitas pendamping); (5) Kurang validnya data, penerima bantuan sering tidak sesuai dengan hasil pendataan TKSK, sehingga warga yang merasa memenuhi persyaratan tetapi tidak menerima bantuan melakukan aksi protes; (6) Pemahaman keluarga PMKS, PMKS dan masyarakat tentang program yang didampingi belum maksimal sehingga dukungan terhadap pelaksanaan program relatif kurang; (7) Insentif terbatas dan kadang sering terlambat diterima (kecuali honor pendamping PKH dan Sakti peksos langsung masuk ke rekening); (8) Sulit menuntut penerima manfaat, PMKS untuk melaporkan kegiatan secara rutin karena keterbatasan kualitas SDM; (9) Kurang dan tidak adanya sumber dana taktis yang bisa menunjang kinerja pendamping

D. Penutup

Kesimpulan: Mayoritas pendamping berjenis kelamin perempuan, berada dalam rentang usia produktif, berstatus kawin, berpendidikan SMA-D3, berasal dari daerah setempat dan rata-rata mendampingi 48 PMKS. Dari kualifikasi pendamping, hanya sebagian kecil pendamping program kesejahteraan sosial yang memiliki kualifikasi sebagai pekerja sosial profesional; mayoritas pendamping memiliki pengalaman kerja antara satu hingga lima tahun dan belum pernah mengikuti diklat pementasan tenaga pendamping. Insentif pendamping relatif rendah (kecuali pendamping PKSA/sakti pekerja sosial

dan pendamping PKH). Banyak pendamping merangkap tugas mendampingi beberapa program PMKS karena insentif yang diterima terlalu kecil, akibatnya mereka kurang fokus dan kinerjanya kurang optimal.

Berdasar pengujian model konstruk kompetensi pendamping sosial dengan teknik *confirmatory factor analysis* (CFA) dapat disimpulkan, bahwa kompetensi pendamping sosial berhasil direfleksikan oleh variabel pengetahuan, keterampilan dan nilai/sikap tertentu. Di antara ketiga variabel yang diuji, muatan faktor variabel keterampilan ternyata paling tinggi dalam membentuk kompetensi.

Sistem rekrutmen pendamping teridentifikasi ada tiga cara yaitu melalui: sistem rekrutmen langsung, sistem pemilihan aktivis sosial dan sistem penunjukkan karena adanya relasi kekuasaan. Pengembangan standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial, dapat diciptakan dengan mengoptimalkan berbagai komponen dalam sistem yang meliputi sistem rekrutmen, sistem manajemen SDM, sistem intervensi dan sistem pelatihan. Dari hasil pengujian terhadap model standarisasi pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial dengan menggunakan teknik *path analysis* dapat disimpulkan, bahwa hubungan kausal antara sistem pelatihan dan sistem manajemen sangat kuat dan signifikan. Sedangkan hubungan kausal antara sistem rekrutmen dengan sistem pelatihan, hubungan kausal antara sistem rekrutmen dengan sistem manajemen dan hubungan kausal antara sistem pelatihan dengan sistem intervensi juga signifikan meskipun hubungan tersebut relatif rendah.

Sistem Pelatihan dan Pengembangan kapasitas SDM pendamping ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pendidikan formal dengan memberi kesempatan pada pendamping untuk menempuh pendidikan lanjut di STKS dan melalui jalur pelatihan/bimtek. Pelatihan dilaksanakan oleh Kemensos melalui BBPPKS/Pusdiklat dan Dinso TK I & TK II, materi relatif relevan dengan kebutuhan namun muatan lokal

dirasa masih kurang (terutama pelatihan yang dari pusat), metode menyesuaikan kebutuhan pelatihan namun cenderung masih klasikal (terutama yang diselenggarakan oleh Pemda), alokasi waktu belum seimbang, artinya masih banyak teori dibanding praktik, sarana-prasarana untuk pelatihan yang sifatnya program nasional relatif memadai, namun untuk program lokal kurang memadai; narasumber relatif kompeten.

Rekomendasi: Berdasar temuan hasil penelitian maka direkomendasikan kepada:

1. Kementerian Sosial, sebagai berikut.

Perlu segera ditetapkan Peraturan Perundangan tentang standar nasional pendamping sosial sehingga posisi pendamping sosial menjadi kuat, demikian halnya dengan mekanisme perekrutan, manajemen, intervensi sosial dan sistem peningkatan kapasitas pendamping menjadi jelas. Pendamping program hendaknya berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial/ilmu kesejahteraan sosial atau berlatar belakang ilmu yang lain (lintas disiplin) namun diberi kesempatan untuk mengikuti diklat pendampingan sosial sesuai bidang garap yang relevan.

Kualifikasi pendamping sosial perlu dikaitkan dengan pendidikan dan sistem insentif yang layak. Kompetensi pendamping sosial perlu ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui jalur pelatihan/bimtek. Standarisasi pendampingan sosial perlu diciptakan dengan memadukan sistem rekrutmen, sistem manajemen, sistem intervensi, dan sistem pelatihan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (Kemensos/Direktorat terkait, Pemda TK I/II, BBPPKS dan *stake holder*).

Merekomendasikan diterapkannya Model Hipotetik Pengembangan Standar pendamping sosial berbasis sistem pekerjaan sosial yang diusulkan

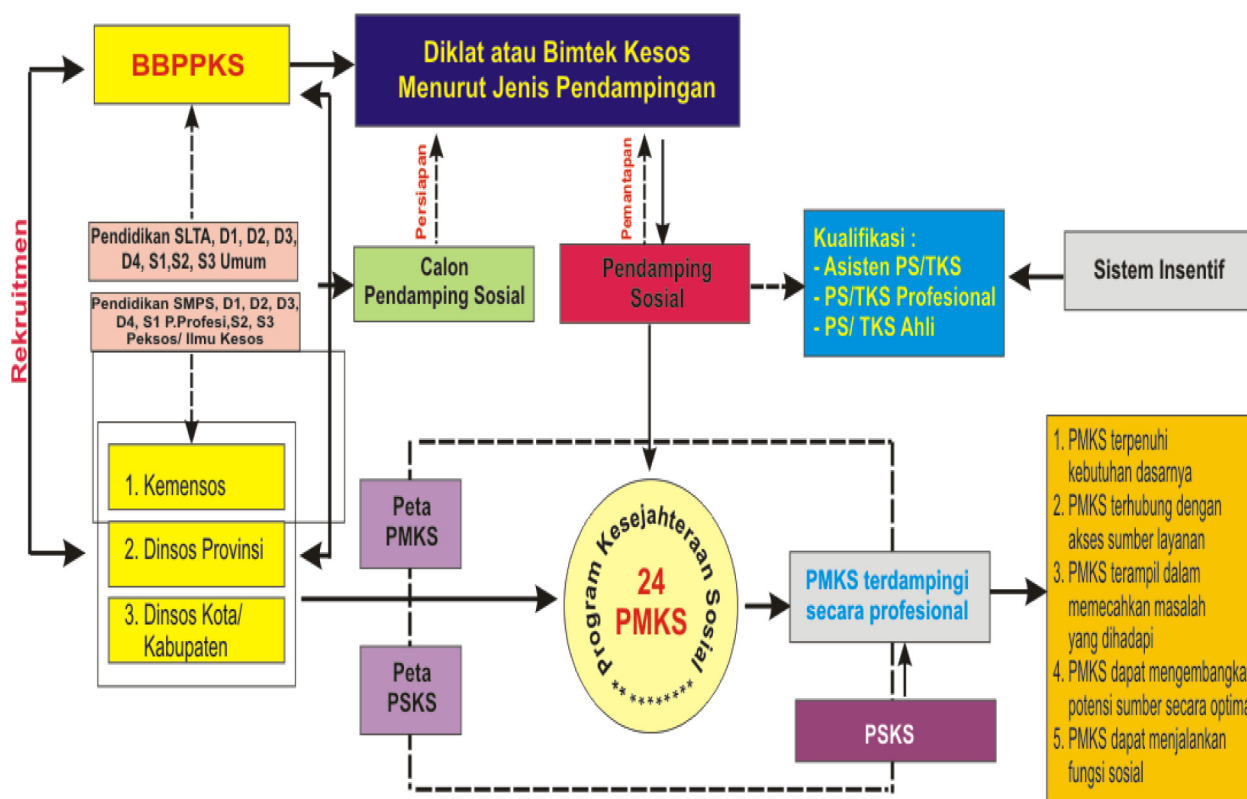
2. Pemerintah Daerah

Perlu dialokasikan dana *sharing* untuk menunjang kesejahteraan pendamping sosial, hal ini mengingat keterbatasan anggaran Ke-

menterian Sosial. Di samping itu, pendamping sosial juga bekerja untuk penanganan PMKS di daerah. Perlu sinergitas dengan Kementerian Sosial dan *stakeholder* terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan

tenaga pendamping sosial, terutama dalam upaya untuk mewujudkan pendamping sosial terstandar sehingga penanganan PMKS yang dilakukan oleh pendamping sosial di daerah lebih optimal.

Model Hipotetik Standar Pendamping Sosial Berdasar Sistem Pekerjaan Sosial



Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh responden dan informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Awandana. (2009). *Standar Kompetensi Pendamping yang Efektif*. <http://id.shvoong.com/social-science/sociology> diunduh tanggal 20 Januari 2013.
- Bina Desa. (1998). *Buku Pegangan Pendampingan Komunitas Pedesaan*. Jakarta: Bina Desa.
- Biro Pusat Statistik. (2005-2012). *Statistik Indonesia dan Data Susenas*. Jakarta: BPS RI

- Cox, David. (2001). *Hand Out untuk Lokakarya Pengembangan Materi Pembangunan social dalam Kurikulum Pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Tidak Dipublikasikan.
- Du Bois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley. (2005) Edisi ke-5, *Social Work: an Empowering Proffession*, Boston: Perason.
- Edi Suharto, (2006), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama.
- , (2007). *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*. Bahan Bacaan Pelatih dalam Meningkatkan Kemampuan Para Pendamping Sosial Keluarga Miskin: Tidak Diterbitkan.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty Limited.

- Isbandi Rukminto Adi. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Johnson, Wayne. (1984). *The Social Services: An Introduction*, Illionis: F.E Peacock Publisher.
- Joreskog, K.G & Sorbom, D. (1996). *Lisrel 8: User Reference Guide*, Scientific Software International, Inc, Chicago.
- Kementerian Sosial. (2011). *Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesetiakawanan Sosial*. Jakarta: Bidang Integrasi Sosial Sekjen Kemensos RI.
- , (2011). *Buku Kerja Pendamping PKH*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial RI.
- Kline, Rex B. (1998), *Principles and Practice of Structural Equation Modelling*. The Guilford Press, New York.
- Milles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook*. Newyork: SAGE Publication.
- Payne, Malcolm. (1986). *Social Care in The Community*. London: Mac Milan Press Ltd.
- Parson, J. Ruth, James D Jorgensen dan Santos H. Hernandez. (1994). *The Integration of Social Work Practice*, Pacific Grove: Brooks,Cole
- Skidmore, Rex A, Milton Thackeray dan William Farley. (1994). *Introduction to Social Work*. Sixth edition. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, Inc.
- Wahyudin Sumpeno. (2005). *Kiat-kiat Memberdayakan Masyarakat*. Solo: Kerjasama Yayasan Duta Awan Solo dengan Chatolic Relief Service (CRS) Jakarta.
- <http://www.bintan-s.web.id> *Pengertian Pendamping*, diunduh tanggal 8 Desember 2015.
- <http://wordpres.com>. *Pendampingan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat*. Diunduh tanggal 7 Januari 2015

Peran Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran

The Role of Social Service Office in the Implementation of National Health Insurance System for Recipients of Contribution Subsidy

Rukmini, Ristrini, dan Oktarina

Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Indonesia 10560 Kotak Pos 4444 JKT 1400, Telp (021) 4243314, Faksimili (021) 42871604

E-mail: imas_yatno@yahoo.co.id

Diterima 15 April 2017, diperbaiki 25 Agustus 2017, disetujui 27 Oktober 2017

Abstract

This study is aimed to determine the role of Social Service Office in the implementation of National Health Insurance System (JKN) for recipients of contribution subsidy (PBI) including the aspects of membership determination, poverty criteria, verification, validation, and implementation obstacles. It was an observational study with cross sectional design, which was conducted in Blitar and Malang City in 2015. The data were collected by conducting in-depth interviews and focus group discussion with the authorities of Social Service Office, City Health Office and BPJS and also with secondary data on membership and policy documents investigation. Social Service Offices in Blitar city and Malang city have conducted the updating of the membership of central PBI based on the Integrated Data Base of Social Protection Program (PPLS) in 2011. Blitar Social Service Office had not completed the verification and validation processes for local PBI participants yet. In 2014 Malang Social Service Office only legalized the result of the verification activity. In 2015 Malang Health Office conducted the validation and the Social Service Office also participated in. The verification and validation process of central PBI was conducted by Social Service Office and by Sub-district Social Welfare workers, assisted by social worker community (in Blitar City) and the village team (in Malang City). The obstacles in conducting verification and validation for central PBI are the limited allocation of district budget (APBD) and the limited number of human resources in the Social Service Office to get the society poverty data. It is needed the extended role of the Social Services Office, that does not lay only on the verification and validation of the center PBI but also on that of local District PBI.

Keywords: *social service office; verification; validation; recipient of contribution subsidy (PBI); national health insurance (JKN)*

Abstrak

Penelitian bertujuan mengetahui peran dinas sosial dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi aspek penetapan kepesertaan, kriteria miskin, verifikasi, validasi dan kendala pelaksanaan. Jenis penelitian observasional dengan disain *cross sectional*, dilaksanakan di Kota Blitar dan Malang tahun 2015. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan BPJS serta penelusuran data sekunder tentang kepesertaan dan dokumen kebijakan yang tersedia. Dinas Sosial Kota Blitar dan Malang telah berperan dalam melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBI pusat berdasarkan basis data terpadu (BDT) hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Dinas Sosial Kota Blitar belum berperan dalam proses verifikasi dan validasi PBI, Dinas Sosial Kota Malang tahun 2014 hanya melakukan legalisasi hasil verifikasi, dinas kesehatan tahun 2015 melaksanakan validasi dan dinas sosial turut berperan. Proses verifikasi dan validasi PBI pusat dilakukan oleh dinas sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dibantu pekerja sosial masyarakat (Kota Blitar) dan tim kelurahan (Kota Malang). Kendala yang ditemui terbatasnya anggaran APBD, jumlah SDM terbatas untuk kegiatan pendataan masyarakat miskin. Dinas sosial agar melakukan perluasan peran tidak hanya verifikasi dan validasi PBI Pusat tetapi juga PBI Daerah.

Kata kunci: dinas sosial; verifikasi; validasi; PBI; JKN

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menyatakan golongan masyarakat miskin merupakan target bantuan pemerintah yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh negara. Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan pengembangan *database* masyarakat miskin. Pemerintah hingga saat ini belum mampu menyediakan data valid tentang jumlah orang miskin dan tidak mampu. Di Indonesia data orang miskin masih bermasalah, belum ada data valid dan terpercaya (Adi, 2013). Penelitian Supriyantoro (2014) tentang integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menemukan bahwa terdapat 2.558.490 peserta usulan daerah yang tidak tepat sasaran, dari 86.400.000 (2,96 persen) peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau PBI berada di 251 kabupaten/kota, 31 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut terutama disebabkan pemerintah daerah kurang diberikan kewenangan dalam penetapan masyarakat di wilayahnya yang memenuhi kriteria miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), karena penetapan peserta dilakukan di pusat.

Sebelum era JKN, jaminan kesehatan masyarakat miskin disebut Jamkesmas. Peserta Jamkesmas tahun 2011 ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sama dengan tahun 2010 yakni 76,4 juta jiwa. *Baseline* data kepesertaan tahun 2011 menggunakan data BPS ditambah dengan data daerah sesuai dengan *updating* sampai memenuhi kuota 2011 yang ditetapkan. Berdasar Permenkes Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas, verifikasi kepesertaan dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) dengan mencocokkan kartu Jamkesmas peserta yang berobat dengan data kepesertaan dalam *database* di PT. Askes. Untuk mendukung verifikasi kepesertaan, petugas dapat mencocokkan kartu peserta dengan identitas lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau identitas

lain guna pembuktian kebenarannya. Setelah cocok, selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP). PT. Askes tidak melaksanakan verifikasi dan validasi peserta di lapangan, apakah data yang diperoleh sudah valid.

Peran verifikasi dan validasi data penduduk miskin peserta Jamkesmas di lapangan lebih banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya. Sumber data Jamkesmas dari hasil pendataan yang dilaksanakan BPS. Undang-Undang mengamanatkan pengembangan *database* masyarakat miskin dan peran verifikasi dan validasi merupakan kewenangan Kementerian Sosial sebagai *leading sector*.

Pada era JKN tahun 2014, PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012. Peserta PBI pusat merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang sudah teregister sebanyak 86.400.000 jiwa, yang merupakan bekas peserta Jamkesmas. Sumber datanya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemutakhiran data PBI sebagai peserta JKN. Berdasar Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan PBI Jaminan Kesehatan, pemutakhiran data dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Berdasar Surat Nomor 01/BKS/01/ 2014, pada tahun 2015 dilakukan pemutakhiran data PBI pusat seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan seluruh dinas sosial kabupaten/kota. Pelaksanaan verifikasi dan validasi (*verivali*) data PBI APBN, dengan bantuan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial masyarakat (PSM). Tujuan verifikasi dan validasi secara berkala untuk memperoleh data yang valid dan terkini. Mengingat dinamika yang terjadi di masyarakat mengakibatkan terjadinya perubahan data, contohnya ada warga yang pindah, meninggal dunia atau sudah meningkat taraf hidupnya (kategori mampu).

Berdasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pelaksanaan sistem JKN bagi PBI Jaminan, ditinjau dari aspek penetapan kepesertaan, kriteria miskin, verifikasi dan validasi serta kendala pelaksanaan di lapangan yang dilaksanakan di Kota Blitar dan Kota Malang.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian observasional dengan disain *cross sectional*, dilaksanakan di Kota Blitar dan Kota Malang pada tahun 2015. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dilakukan kepada kepala dinas sosial dan bidang terkait verifikasi dan validasi kepesertaan JKN bagi PBI, dinas kesehatan dan BPJS. Pengumpulan data sekunder hasil verifikasi dan validasi data PBI pusat APBN serta dokumen kebijakan terkait juga dilakukan. Analisis data secara deskriptif sesuai aspek yang diteliti.

C. Pelaksanaan JKSN bagi PBI

1. Peranan Dinas Sosial dalam Penetapan Masyarakat Miskin sebagai Peserta PBI

Pelaksanaan JKN khususnya bagi PBI di daerah, ada dua jenis kepesertaan yaitu PBI Pusat yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (APBN) dan PBI Daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah (APBD). Kepesertaan PBI Pusat ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran, yaitu sebesar 86,4 juta jiwa dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013. Penetapan kepesertaan PBI Daerah, berasal dari integrasi kepesertaan Jamkesda ke sistem JKN yang didaftarkan sebagai PBI Daerah (PBID) di BPJS Kesehatan, ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati atau Walikota.

Di Kota Blitar, berdasar SK Walikota Blitar Nomor 188/565/HK/ 410.010.2/2014 tentang Peserta PBI Daerah Program JKN di Kota Blitar, berlaku 1 Juli 2014 sejumlah 6.560 jiwa dan SK Walikota Nomor: 188/890/HK/ 410.010.2/ 2014 tentang Tambahan Peserta Penerima Bantuan

Iuran Daerah (PBI-D) Program JKN di Kota Blitar, berlaku 1 Oktober 2014 sebesar 1.948 jiwa. Di Kota Malang, berdasarkan SK Walikota Malang Nomor: 188.45/421/ 35.73.112/2014 tentang Penetapan Peserta PBI Program JKN Tahun 2014, berlaku 1 Sept 2014 sebesar 24.272 jiwa.

Di Kota Blitar dan Kota Malang, dinas sosial telah berperan dalam proses verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran data kepesertaan PBI Pusat. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan di Kota Blitar belum berperan dalam proses verifikasi dan validasi peserta PBI Daerah. Di Kota Malang pada tahun 2014, dinas sosial hanya berperan melakukan legalisasi dari hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Sejak tahun 2015 Dinas Sosial Kota Malang, mulai berperan untuk melakukan verifikasi dan validasi peserta PBI Daerah dari daftar nama yang diusulkan oleh dinas kesehatan.

2. Penetapan kriteria masyarakat miskin

Peserta PBI pusat merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang sudah teregister sebanyak 86.400.000 jiwa, yang merupakan mantan peserta Jamkesmas, berdasarkan BDT hasil PPLS tahun 2011, yang dilakukan oleh BPS. PPLS 2011 mendata sekitar 40 persen rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi(Susenas) 2010 dan Potensi Desa (Podes). Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasar informasi dari rumah tangga miskin lain (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan (TNP2K, 2013).

Pendaftaran peserta PBI Daerah, Kota Blitar dan Kota Malang menggunakan kriteria miskin yang berbeda untuk verifikasi dan validasi masyarakat miskin. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah merupakan penduduk kota, yang

dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.

Di Kota Blitar, berdasarkan penetapan kepala dinas kesehatan, ada lima kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan miskin dan berhak mendapat jaminan kesehatan daerah yaitu 1) Luas lantai rumah $< 8 \text{ m}^2$ dan tidak memenuhi syarat sanitasi; 2) Kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap atau memiliki pekerjaan yang penghasilannya $< \text{Rp. } 183.000,-/\text{orang} / \text{bulan}$ atau $< \text{Rp. } 783.000,-/\text{rumah tangga} / \text{bulan}$; 3) Tidak memiliki kendaraan roda dua tahun 2005 ke atas atau mobil; 4) Tidak mengusahakan lahan pertanian/ perkebunan; 5) Kategori kasus gawat darurat/ emergency

Kota Malang menggunakan dua jenis dalam penetapan kriteria miskin. PBI Daerah, menggunakan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Ada 11 kriteria yaitu 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar; 2) Pengeluaran hanya memenuhi konsumsi makanan pokok; 3) Tidak mampu untuk berobat ke tenaga medis; 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali/tahun/anggota rumah tangga; 5) Mampu menyekolahkan anak sampai SLTP; 6) Dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik; 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik; 9) Penerangan rumah bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari $8 \text{ m}^2/\text{orang}$; 11) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Peserta Surat Pernyataan Miskin (SPM), kriteria miskin berdasarkan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pernyataan Miskin. Ada 14 kriteria yang digunakan untuk menentukan kemiskinan yaitu 1) Pendidikan kepala keluarga; 2) Status penguasaan (kepemilikan) tempat tinggal; 3) Luas lantai rumah tempat tinggal; 4) Jenis lantai terluas; 5) Jenis atap terluas; 6) Jenis dinding terluas; 7) Kepemilikan kamar mandi; 8) Sumber air bersih; 9) Sumber penerangan utama; 10) Bahan bakar utama untuk memasak; 11) Frekuensi makan anggota keluarga; 12) Tempat/cara berobat keluarga; 14) Kepemilikan aset seperti mobil, sepeda motor, lemari es, tabung gas atau perhiasan bernilai lebih 1 juta; 15) Apakah masuk dalam kepesertaan: beras untuk orang miskin atau Jaminan Kesehatan (Jamkesmas/Jamkesda/Jamsostek/Asuransi Kesehatan lain. Dinyatakan sebagai keluarga miskin apabila jumlah skor indikator tersebut diatas, minimal sebesar 30.

3. Proses Verifikasi dan Validasi Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran

Pelaksanaan verifikasi dan validasi PBI Pusat dan PBI Daerah di Kota Blitar dan Malang melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1) Penyediaan data peserta, baik data PBI Pusat dan data peserta Jamkesda yang akan didaftarkan sebagai PBI Daerah; 2) Rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh dinas sosial, dinas kesehatan, TKSK, PSM, pemerintah kecamatan dan kelurahan serta tenaga pencacah; 3) Bimbingan Teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi oleh dinas sosial dan TKSK kepada tenaga pencacah; 4) Pelaksanaan verifikasi dan validasi; 5) Pengolahan data dan rekapitulasi data. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data PBI Pusat dan PBI Daerah ditunjukkan pada Tabel.1.

Tabel 1. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi PBI Pusat dan PBID di Kota Blitar dan Kota Malang Tahun 2014-2015

Jenis PBI	Aspek	Kota Blitar	Kota Malang
PBI Pusat	Jumlah Peserta	25.222 jiwa	106.190 jiwa
	Rapat Koordinasi	Rapat persiapan, bimbingan teknis pelaksanaan dan pengumpulan hasil rekapitulasi	Rapat koordinasi sosialisasi, rapat pendalaman dan bimbingan teknis pelaksanaan
	Verifikator dan Validator	Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, dibantu TKSK dan PSM, Setiap kelurahan dikerjakan 2 orang PSM	Dinas Sosial, dibantu tenaga TKSK dan Tim pencacah, terdiri dari 4 orang/kelurahan yaitu PNS Kelurahan, Kader Kelurahan, Pokja 4, KarangTaruna)
	Pengolahan dan kompilasi data	Dilakukan di Dinsos, dengan bantuan tenaga dari Pusat Data dan Informasi Kemenkes	Dikerjakan TKSK untuk setiap Kelurahan, dikumpulkan ke Kasi Kesmas Kelurahan, diserahkan ke Dinsos
	Waktu Pelaksanaan	Maret – Oktober 2015	Maret – September 2015
PBI Daerah	Peserta PBID	Jamkesda Provinsi (1.524 jiwa), Jamkesda Kota (6.565 jiwa) dan SPM (1.948 jiwa), Total 9.886 jiwa	Jamkesda Provinsi (31.975 jiwa) dan SPM (1.000 jiwa)
	Sumber data peserta	- Hasil Pendataan Dinas Kesehatan tahun 2011 - Tambahan peserta baru dari SPM	- Hasil Pendataan oleh Dinas Kesehatan tahun 2014 - Tambahan peserta baru dari SPM
	Verifikator PBID	- Peserta Jamkesda : Dispendukcapil - Peserta PBID tambahan dari SPM : Petugas Pelacak Puskesmas	- Tahun 2014, Dinas Kesehatan dengan Tim gabungan yang dibentuk, diketahui Dinsos. - Tahun 2015, Dinas Sosial sebagai verifikator sisa data PBI yang tidak berhasil dimigrasi oleh BPJS pada tahun 2014 sebanyak 4.082 jiwa yaitu peserta PBI SK walikota sebanyak 24.272 jiwa dikurangi peserta PBID sudah punya kartu 20.190 jiwa).
	Hasil Verivali yang berhasil dimigrasi sebagai PBID di BPJS	6.560 jiwa (Jamkesda) 1.948 jiwa (SPM)	19.190 jiwa (Jamkesda) 1.000 jiwa (SPM)
	Waktu Pelaksanaan	Maret – Juni 2014	Maret – Agustus 2014

Sumber : Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Blitar dan Kota Malang, tahun 2015.

Di Kota Blitar data PBI Pusat yang diserahkan Kementerian Sosial semula sebesar 25.222 jiwa yang tersebar di 21 kelurahan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditemukan 24.578 (97,44 persen) jiwa yang valid. Hasil rekapitulasi ditunjukkan dalam Tabel 2.

Hasil verifikasi dan validasi data PBI JKN Pusat (Tabel 2), Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Blitar belum berani menetapkan perubahan peserta “keluar atau mampu”, karena ketidakpastian kriteria miskin yang disepakati di Kota Blitar. Penetapan data masyarakat miskin harus melewati uji publik melalui musyawarah kelurahan, tetapi dinas sosial belum melakukan karena ada percepatan pendataan oleh Kementerian Sosial.

Hal tersebut diperkuat pernyataan informan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan: “Dan hasil terakhir data tersebut, kuota dari Kemensos adalah 25.225, setelah diadakan verivali kita tidak berani mengeluarkan data, artinya kita berani melaporkan adalah yang ganda karena otomatis kita keluarkan sama yang meninggal, akan tetapi untuk kriteria miskin, kita tidak berani mengeluarkan karena kriteria yang dari miskin sendiri sampai sekarang ya seperti itu, kita khawatir terjadi apa-apa, akhirnya data tersebut sesuai dengan SOP kita harus mengadakan uji publik, musyawarah kelurahan, tapi karena percepatan tersebut, kita tidak mengadakan seperti itu...”

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Validasi Dan Verifikasi Peserta PBI Pusat di Kota Blitar, Tahun 2015

No.	Variabel	Kecamatan			Total
		Sukorejo	Kepanjen Kidul	Sanan Wetan	
1	Jumlah Sebelum Verifikasi	11.225	6.554	7.446	25. 222
2	Perubahan/Keluar				
	Ganda	12	3	32	47
	Mampu	-	-	-	-
	Meninggal	172	238	190	600
	Pindah	0	0	0	0
	Tidak ditemukan	0	0	0	0
3	Jumlah	184	241	222	647
4	Jumlah Setelah Perubahan	11.041	6.313	7.224	24.578
5	Jumlah Usulan/Pengganti	595	287	281	1.163
Total		11.636	6.600	7.505	25.741

Sumber: Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Blitar, 2015

Di Kota Malang, data PBI Pusat yang diserahkan Kementerian Sosial tahun 2015 yang akan diverifikasi dan validasi sebesar 106.902 jiwa, yang tersebar di lima kecamatan dan 57 Ke-

lurahan. Hasil validasi dan verifikasi ditemukan sebanyak 91.162 (85,18 persen) jiwa yang valid, rekapitulasi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Validasi Dan Verifikasi Peserta PBI Pusat Kota Malang Tahun 2015

No	Variabel	Kecamatan					Total
		Blimbing	Kedungkandang	Klojen	Lowokwaru	Sukun	
1	Jumlah Sebelum Verifikasi	22.804	27.097	13.471	17.351	26.179	106.902
2	Perubahan/Keluar						
	Ganda	7	3	0	177	112	299
	Mampu	82	1.499	224	1.136	2.436	5.377
	Meninggal	83	303	212	199	250	1.047
	Pindah	334	341	469	550	3.526	5.220
	Tidak ditemukan	107	21	61	57	3.551	3.797
3	Jumlah	613	2.167	966	2.119	9.875	15.740
4	Jumlah Setelah Perubahan	22.191	24.930	12.505	15.232	16.304	91.162
5	Jumlah Usulan/Pengganti	4.199	4.824	2.433	3.508	3.188	18.152
Total		26.390	29.754	14.938	18.740	19.492	109.314

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, 2015

4. Kendala Verifikasi dan Validasi PBI

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data peserta PBI, yang dapat dirangkum di Tabel 4.

Pelaksanaan JKN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang berbeda didukung

oleh regulasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Peraturan terkait JKN pada Kementerian Sosial adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Tabel 4. Kendala Verivali oleh Stakeholder dalam Pelaksanaan JKN PBI Kota Blitar dan Kota Malang Tahun 2015

No	Institusi	Kendala
1	Dinas Sosial	1. Keterbatasan anggaran APBD untuk validasi dan verifikasi PBI pusat, biaya dari APBN tidak ada 2. Terbatasnya SDM di Dinas Sosial dan tenaga pencacah untuk pendataan masyarakat miskin 3. Pelatihan pendataan TKSK dan PSM belum memadai, sehingga timbul perbedaan pemahaman terhadap materi. 4. Kendala pengisian kuesioner validasi, karena tidak ada buku petunjuk dan definisi operasional variabel yang jelas dan mudah dipahami. Ada perubahan kuesioner dari 20 kolom menjadi 11 kolom, padahal pengumpulan data telah dilakukan sehingga menyulitkan dalam penggabungan, karena kategori yang berbeda (Kota Blitar). 5. Belum ada kesepakatan penentuan kriteria miskin di lapangan (Kota Blitar)
2	Dinas Kesehatan	1. Pada awal integrasi, peserta Jamkesda menjadi PBID banyak yang belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Rendahnya validitas kepesertaan masyarakat yang memenuhi kriteria miskin terutama pengguna SPM. 3. Dinamika data, berubahnya jumlah peserta karena meninggal, keluar dari kepesertaan, pindah atau sudah mampu.
3	BPJS	Pada awal integrasi, banyak calon peserta yang tidak mempunyai NIK, NIK ganda dan peserta meninggal

Berdasar peraturan tersebut dinas sosial merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pendataan dan penetapan masyarakat miskin. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Menteri Sosial menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk penanganan fakir miskin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Hasil pendataan diverifikasi dan validasi oleh Menteri, secara berkala dua tahun sekali dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan, kelurahan atau desa. Hasilnya dilaporkan kepada bupati/walikota yang akan disampaikan kepada gubernur, diteruskan ke Kementerian Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan di Kota Blitar dan Kota Malang tentang penentuan kriteria miskin yang digunakan untuk pendaftaran PBI Daerah di BPJS. Di Kota Blitar, berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan dan di Kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 digunakan untuk usulan PBID, sedangkan untuk peserta SPM ditetapkan melalui Peraturan Walikota

Malang Nomor 11 Tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriteria miskin yang digunakan di daerah berbeda, tidak semua menggunakan kriteria miskin yang telah ditetapkan Kementerian Sosial sebagai lembaga

yang berwenang. Setiap daerah mengembangkan secara sendiri kriteria atau indikator yang digunakan untuk menetapkan keluarga miskin.

Kajian yang dilakukan Istiana Hermawati, dkk. (2015), berdasarkan pengujian konstruk kemiskinan di Indonesia secara signifikan dipengaruhi lima indikator yang terdiri dari dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik (31 indikator dan 45 parameter). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi terutama dipengaruhi faktor sosial, psikis dan budaya. Rekomendasi kajian tersebut adalah untuk perumusan kebijakan, program atau intervensi masyarakat miskin di Indonesia, hendaknya mempertimbangkan dimensi kemiskinan yang multipel dan menggunakan indikator kemiskinan yang komprehensif, sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. Aspek lokalitas daerah yang berkontribusi terhadap kemiskinan perlu dipertimbangkan, karena membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bagi PBI di BPJS pada tahun 2014 sudah cukup tinggi jika dibanding dengan jumlah penduduk. Di Kota Blitar jumlah penduduk sebesar 136.952 jiwa dan Kota Malang sebesar 847.175 jiwa. Proporsi total PBI (PBI APBN dan PBI APBD) di Kota Blitar sebesar 24,6 persen dan Kota Malang sebesar 15 persen

dari jumlah penduduk. Proporsi peserta PBID terhadap jumlah penduduk, di Kota Blitar sebesar 6,2 persen dan PBI APBN sebesar 18,44 persen, sedangkan di Kota Malang proporsi peserta PBID terhadap jumlah penduduk sebesar 2,3 persen, dan PBI APBN sebesar 12,61 persen. Penelitian Kesmawan dkk (2014) menunjukkan, bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta kepesertaan PBI JKN cukup tinggi yakni sebesar 1.572.154 jiwa atau 44,73 persen.

Proses verifikasi dan validasi untuk peserta PBI Daerah di Kota Blitar belum melibatkan dinas sosial, sedang untuk peserta PBI APBN dinas sosial sudah terlibat. Di Kota Malang, dinas sosial sudah terlibat baik untuk verifikasi PBI APBN dan PBI Daerah yakni pada tahun 2015. Dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Blitar dan Kota Malang menunjukkan data PBI pusat yang diserahkan oleh Kementerian Sosial banyak mengalami perubahan, Kota Malang lebih banyak mengalami perubahan dibanding Kota Blitar. Hasil temuan menunjukkan, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan. Masyarakat miskin tersebut, dapat diusulkan sebagai peserta baru PBI baik PBI pusat ataupun PBI daerah, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Peserta PBID di Kota Malang yang berasal dari peserta Jamkesda belum semuanya berhasil dimigrasi ke BPJS, sehingga pada tahun 2015 meminta bantuan dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data peserta. Dinas Kesehatan Kota Malang belum mampu mencapai target kepesertaan yang telah ditetapkan, padahal berdasarkan hasil pendataan dinas sosial masih banyak masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, koordinasi antara dinas kesehatan dan dinas sosial perlu ditingkatkan. Sebaiknya peranan dan fungsi dinas sosial untuk pendataan dan penetapan masyarakat miskin, dimanfaatkan oleh dinas kesehatan sebagai dasar untuk mengusulkan peserta PBI yang baru atau tambahan.

Penelitian Nurhasanah Arsyad (2015), hasilnya bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan koordinasi dengan dinas sosial, dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) dan dinas kesehatan untuk mendaftarkan peserta PBI Daerah ke BPJS dari golongan masyarakat miskin dan penyandang cacat. Pendataan penduduk miskin tersebut dilakukan oleh dinas sosial, kemudian hasilnya diserahkan ke dispendukcapil untuk diketahui nomor induk kependudukan (NIK), yang selanjutnya data tersebut diserahkan ke dinas kesehatan dan BPJS untuk didaftarkan sebagai PBI.

Berdasarkan penelitian Rosyadi (2016) tentang implementasi kebijakan tatakelola peserta PBI JKN di Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran belum berjalan secara maksimal, ditinjau dari: 1) Aspek karakter organisasi dan birokrasi pemerintah yang masih lemah serta lambatnya respon antar SKPD di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi; 2) Aspek tatakelola peserta PBI dan verifikasi setiap enam bulan masih lemah karena pemahaman pengambil kebijakan di level pelaksana birokrasi, tingkat pusat dan daerah yang masih lemah. Dinas sosial kabupaten/kota umumnya bersifat pasif, karena menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat; 3) Aspek kepesertaan, masih banyak rakyat miskin yang tidak masuk dalam PBI tahun 2015 (14.001.871 jiwa), sehingga kabupaten/ kota masih menyediakan Jamkesda/PBI Non kuota 707.305 jiwa dan SPM sebesar 70.000 jiwa.

Berdasar laporan Dinas Sosial Provinsi Jatim, hasil verifikasi dan validasi PBI Pusat di kabupaten lain di Jawa Timur banyak yang mengalami perubahan di lapangan dari data awal yang diserahkan Kementerian Sosial. Hasil verifikasi dan validasi di Kabupaten Mojokerto valid sebesar 334.758 jiwa (94,54 persen) dan usulan baru 41.860 jiwa, Kabupaten Jombang

valid 476.329 jiwa (92,07 persen) dan usulan baru 81.102 jiwa, Kabupaten Nganjuk valid 464.932 jiwa (91,29 persen) usulan baru 44.346 jiwa, Kabupaten Gresik valid 335.129 jiwa (84,99 persen) dan usulan baru tidak ada, serta Kabupaten Trenggalek valid 254.337 jiwa (95,16 persen) dan usulan baru juga tidak ada (Kadar, Abdul, 2017).

Kendala yang dialami dinas sosial terkait pembiayaan dan keterbatasan jumlah SDM untuk pelaksanaan kegiatan pendataan masyarakat miskin. Dukungan pembiayaan kesehatan seperti yang dimaksud UUSJSN, tidak hanya terkait peran pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 menyebutkan, bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk kesehatan. Pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayahnya, termasuk penyediaan pembiayaan untuk pendataan masyarakat miskin. Perpres Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan disebutkan, bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan peta jalan, diantaranya aspek peraturan perundangan, kepesertaan, manfaat & iuran, pelayanan kesehatan, keuangan serta kelembagaan & organisasi.

Kendala lain dalam kepesertaan PBI JKN adalah adanya perubahan atau dinamika data peserta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan sistem informasi penerima bantuan pemerintah. Penelitian Annah dan Kurniaty (2016), merancang sistem informasi penerima bantuan pemerintah (SIPB) dengan mengintegrasikan sistem informasi kependudukan dari kelurahan, dinas sosial dan dinas kependudukan dan catatan sipil dengan teknologi *Web Service*. Teknologi ini mudah diakses secara bersamaan dan memungkinkan berbagai sistem dibangun dengan

platform dan bahasa berbeda untuk kolaborasi dalam suatu pekerjaan.

Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial. Tetapi kenyataan di lapangan sulit untuk diterapkan, karena rumah tangga yang dapat memenuhi seluruh kriteria miskin tersebut jarang terjadi. Di Kota Blitar, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan belum berani mengeluarkan peserta PBI pusat dengan alasan sudah mampu karena kesepakatan di lapangan tentang penentuan kriteria miskin, masih simpang siur. Petunjuk pengisian kuesioner verifikasi tidak ada definisi yang jelas, sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara pengumpul data. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan JKN bagi penerima bantuan iuran khususnya dalam penetapan, verifikasi dan validasi masih banyak menemui kendala.

Menurut Bappenas (2014), pelaksanaan program perlindungan sosial termasuk jaminan kesehatan, masih sangat terbatas mengakibatkan belum dirasakannya dampak program oleh masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Kendala terkait dengan pemutakhiran data rumah tangga miskin yang bersumber BDT, PPLS tahun 2011. Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan di daerah, sebagai salah satu sarana perbaikan data juga belum efektif. Hal ini menyebabkan terjadinya *exclusion error* dan *inclusion error*; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, terdapat empat sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial, yaitu TKSK, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial. Peran pekerja sosial profesional dan relawan yang berasal dari masyarakat memiliki kontribusi terhadap keberhasilan program perlindungan sosial. Peningkatan kemampuan yang diberikan kepada pekerja sosial dirasa masih kurang dan tidak berimbang dengan peran yang dilakukan, sehingga kualitas pendampingan program kurang berjalan baik. Informasi dan pemahaman dari para pihak terkait

mengenai pendampingan program juga menjadi kendala yang berdampak pada fasilitasi program di tingkat daerah (Bappenas, 2014).

Peranan dinas sosial dalam penyediaan data dan penetapan masyarakat miskin harus diperkuat. Strategi yang diusulkan oleh Kementerian Sosial dalam Pertemuan Integrasi Jamkesda ke dalam JKN, tanggal 16 Oktober 2015 adalah melibatkan peran dinas sosial dalam penetapan daftar penduduk miskin dan tidak mampu PBI (baik peserta PBI APBN maupun APBD), melakukan sinkronisasi data peserta Jamkesda dan JKN, membangun *national single register system*, membangun sistem pengaduan masyarakat berdasarkan *on demand application (dynamic updating data)* dan menjamin *portabilitas dan equitas* secara nasional (Harry Hikmat, 2015).

D. Penutup

Kesimpulan: Dinas Sosial di Kota Blitar dan Kota Malang, telah berperan dalam melakukan pemutakhiran data kepesertaan PBI APBN. Hasil verifikasi dan validasi PBI APBN di Kota Blitar ditemukan 24.578 (97,44 persen) jiwa yang valid, sedangkan Kota Malang sebesar 91.162 (85,18 persen) jiwa. Kendala validasi dan verifikasi untuk PBI adalah keterbatasan anggaran APBN dan APBD, dinamika data, keterbatasan jumlah SDM di dinas sosial untuk kegiatan pendataan serta kesulitan dalam penerapan penetapan kriteria dan pendataan masyarakat miskin.

Rekomendasi: Hasil penelitian merekomendasikan diperlukan perluasan peran dinas sosial, tidak hanya melakukan verifikasi dan validasi PBI APBN tetapi juga PBI APBD. Peningkatan koordinasi intensif antara dinas kesehatan, dinas sosial, BPJS, BPS dan pemerintah daerah dalam penetapan masyarakat miskin. Pemerintah pusat perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pemecahan masalah bagi pemerintah daerah khususnya SKPD Dinas Sosial baik dari segi dukungan pembiayaan pendataan, maupun bimbingan teknis untuk pendataan masyarakat miskin serta verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balitbang Kesehatan RI, Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan yang telah memberikan dana dan dukungan untuk penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Pemerintah Daerah khususnya SKPD Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang telah memberi kesempatan pada kami melaksanakan penelitian di Kota Blitar dan Kota Malang.

Pustaka Acuan

- Adi. (2015). *BPJS Kesehatan Harus Mengantisipasi Potensi Masalah Mulai dari data tentang jumlah orang miskin dan tidak mampu, pemahaman dokter akan program BPJS Kesehatan dan kesiapan fasilitas kesehatan*. Berita Hukum Online. com, Tanggal 3 Desember 2013. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529da399cb129/bpjs-kesehatan-harus-mengantisipasi-potensi-masalah>. Diakses 20 April 2015.
- Arsyad, Nurhasanah. (2015). *Tanpa Nomor Induk Kependudukan Tiada Jaminan Kesehatan*. Prosiding SnaPP Vol 1 No. 1 2015 Kesehatan.Simnas Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unisba. pISSN 2477-2364/eISSN 2477- 2356. Hal 29 – 35.
- Annah; Kurniaty. (2016). *Implementasi Web Service pada Sistem Informasi dan Verifikasi Data Penduduk Penerima Bantuan Pemerintah*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia, 6-7 Februari 2016. STIMIK AMIKOM Yogyakarta. Vol4 No1 2016. ISSN 2302 – 3805. Hal : 2.11-7 – 11.
- Bappenas. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Kementerian PPN/ Bappenas.
- Harry Hikmat. (2015). *Akurasi Kepesertaan PBI sebagai Bagian dari Integrasi Jamkesda*. Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial/Ketua Satgas Percepatan Verifikasi dan Validasi Data PBI JK, Kementerian Sosial RI. Disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Percepatan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 16 Oktober 2015.
- Hermawati, Istiana dkk. (2015). *Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. B2P3KS Press. Yogyakarta.
- Kadar, Abdul. (2015). *Sinkronisasi Data PBI JKN*, Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Integrasi Jamkesda terkait Kepesertaan BPJS. Dinas Sosial Provinsi Jawa

- Timur, Tahun 2015. <http://sawoo.ponorogo.go.id/wp-content/uploads/2015/09/PAPARAN-RAKOR-DINSOS-12-SD13-AGT1.pdf>. Diakses tanggal 18 Januari 2017.
- Kesmawan, Andri Putra. Mutiarin, Diah. (2014). *Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol 1 No. 3 Oktober 2014.
- Kemensos RI. (2013). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*.
- (2013). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2012). *Permenkes Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2012). *PP Nomor 102 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*.
- Peraturan Presiden RI. (2014). *Perpres No. 74 Th 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan*.
- Rosyadi, Ali Imron. (2016). *Implementasi Kebijakan Tata Kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jatim*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol 2 No.1. 2016.
- Supriyantoro. (2014). *Formulasi Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Universal Health Coverage*. Disertasi. Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM, Jogjakarta.
- TNP2K. *BDT, Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013
- Undang-Undang RI. (2004). *UU Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Undang-Undang RI. (2013). *UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Undang-Undang RI. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Penumbuhan Fungsi Sosial Masyarakat Perdesaan melalui *Kenthongan*

The growing of Social Function of Rural Society through the usage of Kenthongan

Warto¹ dan Chatarina Rusmiyati²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI Yogyakarta, Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Nitipuran, Bantul Yogyakarta.
Telpon (0274) 377265. ¹Email: wartoraharjo4@gmail.com HP. 085740073552

²Email: chatarinarus65@gmail.com HP. 08562870070

Diterima 17 Juli 2017, diperbaiki 31 Juli 2017, disetujui 25 Oktober 2017

Abstract

This research is aimed to dig out the social function of Kenthongan for rural society. It uses qualitative descriptive approach for describing the meaning of kenthongan for society. The research was conducted in Sleman district, especially done in the location of Argomulyo Village, Cangkringan sub-district, Sleman District of Yogyakarta Province. Data sources are purposively decided, namely male respondents, in the age of about 60 years old, and having sufficient knowledge of kenthongan, mainly knowing the code and its hitting rhythm, the meaning of sound agreed or understood by local society, and the social function of kenthongan for the society. The data collection is conducted by direct free unstructured interview, non-participants observation, and study on documents and literatures, under qualitative data analysis. The research shows that kenthongan socially functions as a social communication tool for local society and as a society existency. In the context of its function as a social communication, kenthongan plays its role as initial warning tool of calamity, invitation to gather for discussing and working together to help each other, showing society social defense and as a reminder tool for Moslem society to pray on time. In the positioning context as a local society identity, kenthongan functions as conserving media and actualization of social loyalty value, as an identity of Javanese society characters and also as symbol of society life. It is recommended to the Ministry of Social to synergize with the Ministry of Communication and Information to reconsider the role and the social functioning of kenthongan for local society. Authorized local parties, such as Social Body, Culture Body, and Tourism Body need to direct all society elements to enable kenthongan becomes one of icons of Yogyakarta Special Region.

Keywords: *the grow; social society function; rural society; kenthongan*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat perdesaan. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengungkap makna *kenthongan* bagi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman dengan *setting* lokasi Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan. Sumber data ditetapkan secara *purposive*, berjenis kelamin laki-laki, minimal berusia 60 tahun, dan berpengetahuan memadai tentang *kenthongan*, terutama menyangkut kode dan irama pemukulan, makna bunyi yang disepakati warga setempat, dan keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas tidak berstruktur, observasi non partisipan, serta telaah dokumen dan kepustakaan, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa *kenthongan* berfungsi secara sosial bagi warga setempat yakni sebagai wahana berkomunikasi sosial dan sebagai jati diri masyarakat. Dalam posisi menjadi wahana berkomunikasi sosial, *kenthongan* berfungsi sebagai sarana peringatan dini bencana, mengumpulkan warga untuk bermusyawarah dan bergotong-royong, mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, dan sebagai sarana mengajak umat Islam untuk beribadah tepat waktu. Dalam posisi menjadi jati diri masyarakat, *kenthongan* berfungsi sebagai media pelestari dan aktualisasi nilai kesetiakawanan sosial, ciri khas masyarakat Jawa, serta sebagai lambang kehidupan masyarakat. Direkomendasikan agar Kementerian Sosial bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengangkat kembali peran dan keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat. Pihak berkompeten di daerah seperti dinas sosial, dinas kebudayaan, dan dinas pariwisata perlu mendorong segenap elemen masyarakat agar *kenthongan* menjadi ikon keistimewaan DI Yogyakarta.

Kata kunci: *penumbuhan; fungsi sosial masyarakat; perdesaan; kenthongan*

A. Pendahuluan

Kenthongan merupakan alat komunikasi yang sangat dikenal oleh orang Jawa, bahkan masyarakat Indonesia. *Kenthongan* cukup dikenal warga masyarakat karena beberapa faktor. Pertama, alat komunikasi tradisional tersebut masih banyak dijumpai di setiap kawasan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kedua, keunikan bentuk karena oleh tukang pembuatnya didesain dengan berbagai bentuk seperti rupa raksasa, ikan, itik dan buah terong ataupun lombok. Ketiga, memiliki ciri khas bunyi yang dihasilkan sehingga apabila ada seseorang yang memukul *kenthongan*, setiap warga sudah dapat memastikan bahwa suara itu adalah bunyi *kenthongan*, bahkan mereka dapat mengetahui si pemiliknya.

Berdasar pengalaman dan pengamatan peneliti di saat masih usia anak pada era tahun 1970, fungsi dan peran *kenthongan* bagi masyarakat mengalami masa kejayaan. Pada waktu itu di perdesaan tempat tinggal peneliti banyak ditemukan, bahkan hampir setiap keluarga mempunyai *kenthongan* yang biasa digantung di pojok rumah *pendhopo* baik yang berbentuk *Joglo* maupun *limasan*. Di samping itu, alat komunikasi tradisional tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan umum sehingga dipajang di gardu ronda, mushola, masjid, balai dusun, balai desa, bahkan kantor camat selalu menyediakan *kenthongan*. Pada waktu itu, *kenthongan* memiliki fungsi dan peran utama dalam menyampaikan informasi secara cepat kepada banyak warga masyarakat. *Kenthongan* bahkan merupakan wahana komunikasi primadona yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai pesan melalui simbol bunyi baik yang bersifat individual maupun komunal.

Kenthongan adalah alat komunikasi tradisional termasuk teknologi lokal sebagai unsur pengetahuan lokal yang merupakan dimensi kearifan lokal (*local wisdom*). Sebagaimana dikemukakan Jim Ife (2002: 101), dimensi kearifan lokal meliputi pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumberdaya lokal, proses

sosial lokal, dan solidaritas kelompok. Pakar tersebut kemudian mendefinisikan pengetahuan lokal yaitu pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi kehidupan masyarakat yang telah menjadi ajaran lokal mencakup inisiatif lokal dan teknologi lokal. Warto (2008: 11) selanjutnya menyatakan, teknologi lokal yaitu teknologi sederhana yang diterapkan masyarakat setempat dalam menanggulangi berbagai masalah, dalam hal ini mencakup teknologi tepat guna yang diterapkan dalam upaya penanggulangan korban bencana, misalnya membunyikan *kenthongan* sebagai simbol peringatan bahaya.

Kenthongan hasil teknologi lokal masyarakat yang merupakan pengetahuan lokal sebagai dimensi kearifan lokal, ternyata keberadaannya mampu menggelitik para peneliti ataupun akademisi untuk mengkaji lebih mendalam berdasar sudut pandang mereka masing-masing. Berikut sejumlah peneliti yang telah memfokuskan perhatiannya pada alat komunikasi tradisional *kenthongan*. Yunus (1994) dalam kajiannya di masyarakat Bali memperoleh sejumlah temuan. Pertama, bahwa *kenthongan* merupakan suatu perangkat komunikasi tradisional, maksudnya sebagai alat bertukar informasi yang tidak menggunakan unsur teknologi modern. Kedua, *kenthongan* digunakan untuk mengkomunikasikan perihal yang bersifat urgen, mendadak, dan darurat atau kondisi berbahaya. Ketiga, *kenthongan* juga dimanfaatkan untuk kegiatan bersifat massal yang telah disepakati warga masyarakat. Keempat, masyarakat Bali dalam berkomunikasi lewat *kenthongan* menggunakan dua kode, yaitu kode untuk menginformasikan keadaan yang sifatnya darurat atau bahaya dan kode untuk menginformasikan situasi masyarakat dalam kondisi normal. Kelima, masyarakat Hindu Bali mengklasifikasikan bentuk atau wujud benda tradisional tersebut menjadi empat kategori yaitu *kenthongan* berbentuk dewa, manusia, raksasa, dan *kenthongan* berbentuk hiasan.

Yoyok dan Siswandi (2006) dalam karyanya yang berbentuk buku acuan Pendidikan Seni Budaya untuk Sekolah Menengah Pertama

mengemukakan, *kenthongan* merupakan alat musik yang paling awal disediakan dan diakses oleh masyarakat. Sebagai suatu alat musik, *kenthongan* merupakan alat musik paling tua yang dikenal masyarakat. Dari sinilah *kenthongan* diposisikan ke dalam kategori alat musik tradisional. Pendidik tersebut juga menyatakan, bahwa hampir semua suku bangsa di Indonesia mempunyai *kenthongan* meskipun bahan, jenis, dan namanya berbeda-beda. Dalam perkembangannya pada saat ini, banyak kalangan menggunakan *kenthongan* sebagai pelengkap alat musik modern. Berkait dengan suara *kenthongan* sebagai alat musik, mahasiswa program Pascasarjana Prodi PSN-Universitas Negeri Yogyakarta Sugiyarti (2012) juga meneliti tentang perbedaan frekuensi bunyi *kenthongan* dengan cara pemukulan yang berbeda. Kesimpulan hasil penelitian, bahwa cara memukul *kenthongan* yang berbeda terbukti tidak berpengaruh terhadap frekuensi suara yang dihasilkan.

Sumiyati (2007) seorang peneliti yang mengkaji makna lambang dan simbol *kenthongan* dalam masyarakat Indonesia memperoleh temuan, pertama bahwa secara *anthropomorf* dan *zoomorf* ternyata keberadaan *kenthongan* tidak hanya terdapat di dalam masyarakat Jawa, tetapi juga dimiliki oleh masyarakat Madura, Bali, dan Lombok. Kedua, beberapa unsur sosial psikologis manusia ternyata turut berpengaruh terhadap variasi bentuk dan seni dari *kenthongan* yang dibuat. Ketiga, *kenthongan anthropomorf* biasanya digantung secara vertikal dan diasosiasikan sebagai seorang laki-laki, sedangkan *kenthongan zoomorf* digantung secara horizontal dan diasosiasikan sebagai seorang perempuan. Keempat, *kenthongan anthropomorf* oleh masyarakat yang masih sederhana dihubungkan dengan pemujaan para nenek moyang terutama untuk memuja *cikal bakal* desa.

Surono, seorang peneliti dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjahmada Yogyakarta pada tahun 2015 meneliti *kenthongan* sebagai pusat informasi, identitas, dan keharmonisan pada masyarakat Jawa. Peneliti ini memfokus-

kan perhatian, pertama tentang fisik *kenthongan* mencakup ukuran, bentuk, bahan, dan keunikannya. Kedua, fungsi *kenthongan* mencakup sebagai pesan ritual keagamaan, pusat informasi dan komunikasi. Ketiga fungsi lain *kenthongan* seperti sebagai hiasan, komoditas, alat musik, dan sebagai pembukaan kegiatan. Penelaah makna *kenthongan* bagi masyarakat, Warto (2014: 31) dalam penelitian berjudul Masyarakat Desa dan Kearifan Lokalnya dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial memperoleh temuan, bahwa sampai sekarang masyarakat masih memiliki teknologi lokal memanfaatkan *kenthongan* sebagai media komunikasi di antara warga, meskipun saat ini telah banyak alat komunikasi modern seperti *handphone*. Warga masyarakat masih melestarikan kearifan lokal dengan mempertahankan teknologi lokal berupa adat kebiasaan memiliki dan membunyikan *kenthongan*.

Penelaahan tentang *kenthongan* melalui sejumlah kajian dan penelitian di atas merupakan upaya secara ilmiah untuk mengungkap kembali salah satu dimensi kearifan masyarakat berupa teknologi lokal membuat dan membunyikan *kenthongan* sebagai sarana komunikasi, yang tempo dulu pernah mengalami masa kejayaan. Teknologi lokal masyarakat dalam menyampaikan informasi dengan membunyikan *kenthongan* dari waktu ke waktu memang cenderung terdesak oleh media komunikasi modern, sehingga pantas dikaji ulang. Kajian perlu dilakukan untuk mencari berbagai kemungkinan sehingga keberfungsian sosial *kenthongan* dapat direvitalisasi dan didayagunakan kembali. Langkah ini kiranya pantas ditempuh untuk mengatasi permasalahan komunikasi tanpa berdampak negatif bagi masyarakat penggunaannya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa alat komunikasi modern seperti *handphone* memang merupakan teknologi canggih, tetapi dalam praktik penggunaannya juga menimbulkan banyak ekses negatif. Soetji Andari (2010: 121-122) menyebutkan beberapa dampak negatif berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat, antara lain: membuat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, kurangnya sosiali-

sasi dengan lingkungan, menghamburkan uang, mengganggu kesehatan, berkurangnya waktu belajar, kurangnya perhatian untuk keluarga, terbukanya data pribadi, dan mudah menemukan sesuatu yang berbau pornografi.

Dari sejumlah penelitian di atas telah diperoleh beberapa temuan yang hasilnya tentu dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkompeten. Akan tetapi beberapa peneliti tersebut baru sebatas mengkaji *kenthongan* sebagai alat musik, frekuensi bunyi hasil pemukulan *kenthongan*, bentuk dan bahan pembuatan, serta *kenthongan* sebagai pusat informasi, identitas, dan keharmonisan masyarakat. Berbagai penelitian tersebut belum menelaah secara mendalam tentang keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus mengkaji mengenai keberfungsian secara sosial *kenthongan* bagi masyarakat Jawa, khususnya di daerah perdesaan.

Atas dasar latar belakang penelitian sebagaimana dikemukakan, permasalahan penelitian yang dirumuskan, yaitu bagaimana menumbuhkan fungsi sosial masyarakat perdesaan melalui *kenthongan*. Tujuan penelitian ini adalah diketahui dan terdeskripsikannya keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat perdesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Kementerian Sosial agar *kenthongan* sebagai teknologi lokal didayagunakan dan difungsikan secara sosial dalam berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penumbuhan keserasian serta kesetiakawanan sosial pada masyarakat pendukungnya. Bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi serta lembaga terkait, agar temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan dalam pembenahan sistem komunikasi dan informasi berbasis kearifan lokal masyarakat khususnya di daerah perdesaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat menambah perbendaharaan khasanah ilmu, khususnya pengetahuan tentang *kenthongan* sebagai inisiatif lokal yang berfungsi sosial bagi masyarakat.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dilakukan di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena Kecamatan Cangkringan berada di kaki Gunung Merapi yang rawan erupsi, sehingga membunyikan *kenthongan* oleh masyarakat masih diandalkan sebagai sarana penumbuhan fungsi sosial termasuk menyampaikan informasi jika terjadi bencana. Desa Argomulyo merupakan desa wisata sosial budaya, sehingga sebagian masyarakatnya masih melestarikan keberadaan *kenthongan* sebagai salah satu aset wisata yang diharapkan memiliki daya tarik tersendiri.

Sumber data adalah informan yang ditetapkan secara *purposive*, artinya dipilih sesuai karakteristik yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam konteks ini adalah orang yang memiliki pengetahuan secara memadai tentang keberadaan *kenthongan* terutama menyangkut pengetahuan mengenai kode dan irama pemukulan *kenthongan*, makna bunyi yang telah disepakati masyarakat pendukungnya, dan keberfungsian secara sosial suara *kenthongan* bagi masyarakat setempat. Mengacu karakteristik tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini minimal berusia 60 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki meliputi sesepuh desa, tokoh masyarakat, pendidik, pemuka agama Islam, tokoh seni budaya, dan orang yang terampil membuat *kenthongan*.

Data penelitian ini dihimpun dengan tiga teknik berikut. Pertama, melalui wawancara bebas tidak berstruktur. Teknik ini untuk menggali perihal yang berkaitan dengan keberadaan *kenthongan* di masyarakat terutama menyangkut kode bunyi *kenthongan*, makna yang disepakati, dan kemanfaatannya secara sosial bagi masyarakat. Sehubungan dengan penggunaan teknik pengumpulan data tersebut Chatarina Dawson (dalam Wartyo 2014: 39) menyatakan, bahwa menggali data melalui wawancara tidak berstruktur merupakan pendekatan favorit da-

lam mengungkap kehidupan manusia berserta budayanya. Dalam wawancara tidak berstruktur, informan diberi kesempatan secara leluasa untuk menyampaikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan peneliti. Sementara peneliti berusaha mendapatkan pemahaman secara komprehensif atas dasar pendapat atau pun pandangan informan beserta situasi dan kondisi yang melingkupi. Pada sisi lain Atik Triratnawati, dkk (2015: 57) mengemukakan, bahwa wawancara mendalam dilakukan untuk menggali berbagai hal yang diangan-angan, dipikirkan, dicita-citakan, dan dilakukan warga masyarakat pelaku budaya. Selanjutnya peneliti bertindak memahami atas kegiatan yang dilakukan warga masyarakat pelaku budaya selaras dengan yang mereka angan-angan, pikirkan, dan cita-citakan.

Kedua, melalui observasi non partisipan, yang menurut Hanafi Dahlan (2014: 365) adalah pengamatan dengan peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan yang subjek laksanakan tetapi dilakukan secara bersamaan pada saat wawancara. Teknik ini digunakan untuk mengamati lingkungan perdesaan lokasi kajian, keberadaan *kenthongan* di setiap sudut kawasan, dan bentuk atau keragaman rupa masing-masing *kenthongan* yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Ketiga, melalui telaah dokumen dan kepustakaan. Teknik ini digunakan peneliti sebagai upaya untuk memperoleh data pendukung dari berbagai dokumen yang dicatat dan dilaporkan oleh pihak berkompeten di lokasi kajian seperti jumlah keluarga, jumlah rumah tangga yang memiliki *kenthongan*, jumlah fasilitas umum yang dipajang *kenthongan*. Sementara studi kepustakaan dilakukan untuk mendapat acuan dalam analisis data dan pembahasan hasil. Kiat ini senada dengan pendapat Muhtar (2014: 378), bahwa untuk mendapatkan data secara komprehensif, maka peneliti dapat menggabungkan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka.

Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan data mengenai kode atau irama pemukulan *kenthongan*, makna bunyi yang

disepakati warga, dan keberfungsian sosial alat komunikasi tradisional tersebut bagi masyarakat pendukungnya. Kegiatan analisis data diawali dengan menghimpun dan memaknai berbagai informasi yang diperoleh dari informan, mengelompokkan setiap informasi ke dalam kategori mengacu kriteria yang peneliti tetapkan dengan diperkaya data hasil observasi, telaah dokumen, dan kajian kepustakaan. Kegiatan analisis diakhiri memaknai data dengan cara menarasikan secara deskriptif mengenai pengertian yang tersirat dalam data yakni menyangkut kode pemukulan, irama bunyi, dan keberfungsian secara sosial *kenthongan* bagi warga masyarakat.

C. Fungsi Sosial Masyarakat melalui *Kenthongan*

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen dan pustaka, diperoleh temuan bahwa di Desa Argomulyo *kenthongan* berfungsi sebagai wahana berkomunikasi sosial dan berfungsi sebagai jati diri masyarakat. Oleh karena itu, penelaahan peneliti ini lebih memfokuskan pada dua fungsi sosial *kenthongan* bagi masyarakat.

Fungsi Wahana Berkomunikasi Warga Masyarakat

Kenthongan berfungsi sebagai wahana berkomunikasi apabila setiap irama suara hasil pemukulan dimaknai secara sepakat oleh warga masyarakat pendukungnya. Dengan demikian *kenthongan* baru berfungsi secara sosial pada saat dilakukan pemukulan model tertentu dan irama suaranya dimaknai secara sepakat oleh masyarakat. Keberfungsian *kenthongan* secara sosial bagi warga masyarakat desa Argomulyo sebagai alat komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam posisinya sebagai wahana berkomunikasi masyarakat, hasil pengumpulan data menemukan bahwa *kenthongan* oleh warga setempat difungsikan dalam empat hal berikut.

Sarana Peringatan Dini Bencana

Kecamatan Cangkringan terutama Desa Argomulyo merupakan wilayah bagian paling atas di sisi tenggara lereng puncak Merapi. Dalam orbitasi seperti itu maka di daerah setempat sering terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Dalam wawancara dengan *sesepeuh* masyarakat Dusun Suruh, Sastro Wiyono (72 tahun) menyatakan, *musibah ingkang asring kedadosan wonten kukuban desa mriki utaminipun erupsi redi Merapi, musibah sanes antawisipun beno lahar, siti longsor, lesus, griyo kabesem, malah menawi jaman rumiyin ugi medalipun sato kewan kadosto simo lan sawer*. Berikut informasi dalam bahasa *Jawa Krama Inggil* tersebut jika diartikan dalam bahasa Indonesia: bencana yang sering terjadi di wilayah desa ini terutama erupsi gunung Merapi, bencana lain di antaranya banjir lahar dingin, tanah longsor, angin ribut, kebakaran rumah, bahkan tempo dulu munculnya binatang buas seperti harimau dan ular.

Dalam menghadapi berbagai peristiwa bencana tersebut, warga masyarakat Desa Argomulyo melakukan mitigasi atau kesiapsiagaan baik secara struktural maupun non struktural. Kesiapsiagaan struktural yang dilakukan berupa pembangunan sarana dan prasarana seperti pembuatan jalur evakuasi, *bunker*, barak penampungan pengungsi, dan instalasi perangkat *early warning system*. Kesiapsiagaan non struktural yang juga disebut mitigasi non fisik dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan pramusibah. Menurut lurah desa setempat, sosialisasi dijadikan sebagai upaya penyadaran masyarakat melalui transfer pengetahuan atau pengalaman bahaya dan karakteristik bencana lutusan gunung merapi, sehingga setiap warga senantiasa siaga dan waspada setiap saat. Warga desa setempat selama ini masih memfungsikan *kenthongan* sebagai sarana peringatan dini, untuk memberitahukan perlunya kesiapsiagaan warga masyarakat atas terjadinya peristiwa bencana. Doty Damayanti (2011: 47), berkaitan dengan peringatan dini dalam bencana menyatakan, bahwa

pelaksanaan peringatan dini dilakukan dengan maksud untuk mengantisipasi atau mencegah timbulnya korban pada saat terjadi bencana. Berkait dengan keberfungsian sosial *kenthongan* dalam upaya penanggulangan bencana tersebut, Tyas Eko Raharjo F. (2014: 116) mengemukakan, *kenthongan* menjadi salah satu alat peringatan dini yang diberlakukan warga lereng Merapi terutama sebelum ada atau datangnya sirine. Alat komunikasi tradisional tersebut menjadi bagian terpenting di masyarakat. Hal ini sebagai penanda darurat untuk memberitahukan adanya tanda-tanda erupsi dan peristiwa bahaya lain. Masyarakat telah terbiasa dengan tanda-tanda peringatan dini secara tradisi. Menurut informan tersebut, apabila terjadi bencana sebagaimana peristiwa erupsi tahun 2010 yang menewaskan 28 orang Dusun Suruh, warga masyarakat melakukan berbagai upaya penanggulangan antara lain dengan membunyikan *kenthongan* yang disebut *titir gobyog*, yaitu pemukulan *kenthongan* yang dilakukan secara terus menerus tanpa jeda dalam waktu relatif lama. Berkait dengan model *kenthong* ini Wardo (2014: 32) mengemukakan, bahwa bunyi *titir gobyog* (oooooooooooo, dst), bermakna telah terjadi bencana alam seperti tanah longsor menimpa rumah, rumah roboh karena angin ribut, banjir yang menghanyutkan warga, dan adanya binatang buas yang membahayakan warga. Pemukulan *kenthongan* model *titir gobyog* dimaksudkan, agar semua warga tanpa terkecuali senantiasa waspada, berjaga-jaga, bersiap siaga, dan berusaha menyelamatkan diri karena adanya bencana alam yang sedang mengancam.

Sarana Mengumpulkan Warga Bermusyawarah dan Bergotong Royong

Bagi masyarakat Desa Argomulyo, *kenthongan* juga difungsikan sebagai sarana mengumpulkan warga secara massal, maksudnya untuk mengumpulkan sejumlah warga dalam suatu pertemuan bermusyawarah atau pengerahan warga untuk melakukan kegiatan gotong royong. Berkait dengan fungsi ini, *kenthongan* biasanya

dibunyikan dengan model *dara muluk*. Dalam konteks sebagai sarana mengumpulkan massa dalam suatu pertemuan atau pelaksanaan kegiatan gotong royong, biasanya warga sudah mengetahui agenda diadakannya pertemuan atau kegiatan gotong royong yang akan dilaksanakan. Di sini membunyikan *kenthongan dara muluk* hanya berfungsi sebagai pemberi peringatan atau ajakan, bahwa suatu pertemuan musyawarah atau pelaksanaan kegiatan gotong royong sudah saatnya akan dimulai.

Sutrisno Hadi (66 tahun) seorang mantan lurah selaku sesepuh desa menjelaskan posisi *kenthongan* sebagai ajakan dimulainya suatu kegiatan: *Wonten ing ndusun Kukuban Argomulyo mriki, menawi badhe miwiti pepanggihan umpaminipun rembug dusun/RT, upacara Nyadran, kempalan Posyandu, utawi miwiti ngleksanaaken gugur gunung padatanipun tasih ngungelaken kenthongan dara muluk. Kenthongan ingkang dipun thuthuk inggih benten-benten, menawi badhe miwiti rapat dusun ingkang dipun tabuh biasanipun kenthongan kagunganipun Pak Dukuh. Menawi upacara Nyadran ingkang dipun tabuh inggih kenthongan ingkang gumantung wonten ing brak makam. Benten malih menawi badhe miwiti gugur gunung ingkang dipun ungelaken kenthongan ingkang gumantung wonten gardu ronda*. Berikut penjelasan informan jika dialih dalam bahasa Indonesia. Di dusun wilayah Argomulyo sini jika akan memulai pertemuan misalnya rapat dusun/RT, upacara Nyadran, pertemuan Posyandu, atau memulai pelaksanaan kerja bakti, biasanya masih membunyikan *kenthongan dara muluk*. *Kenthongan* yang dipukul ya berbeda-beda, jika akan memulai rapat dusun yang dipukul ya *kenthongan* milik Pak Dukuh. Jika upacara *Nyadran* biasanya yang dipukul ya *kenthongan* yang digantung di los makam. Berbeda lagi jika akan memulai kerja bakti yang dibunyikan *kenthongan* yang digantung di gardu ronda.

Satu hal lagi yang diinformasikan oleh sumber data tersebut, yaitu tentang penggunaan *kenthongan* sebagai pemberitahuan adanya berita

lelayu atau meninggalnya salah seorang warga setempat. Menurut informan ini, di masa lalu sebelum merebaknya alat komunikasi pengeras suara, jikalau terjadi musibah kematian salah seorang warga pada waktu sore ataupun malam hari, maka pagi harinya antara pukul lima hingga enam, anggota keluarga pasti membunyikan *kenthongan* yang disebut *gendhong*, yaitu membunyikan *kenthongan* tiga kali atau sembilan kali. Apabila yang meninggal adalah anak-anak, *kenthongan* biasanya dibunyikan tiga kali dengan setiap pukulan diselingi jeda (o o o), sedangkan apabila yang meninggal dunia adalah orang dewasa/tua, pemukulan *kenthongan* dilakukan sembilan kali dengan setiap tiga kali diselingi jeda (ooo ooo ooo).

Informan lebih lanjut menjelaskan, bahwa *gendhong* adalah membunyikan *kenthongan* untuk menyampaikan berita lelayu, bahwa telah terjadi kematian biasa yang warga setempat menyebutnya dengan istilah *ana sripah* (ada kematian). Apabila mendengar *gendhong*, warga masyarakat yang belum mendapat berita lelayu segera mencari tahu terutama perihal siapa yang meninggal dunia, siapa keluarga/ahli warisnya, dan pemakaman dilaksanakan jam berapa, sehingga warga yang telah mendapat kepastian kabar tersebut dapat menentukan waktu untuk datang melayat.

Sarana Mewujudkan Ketahanan Sosial Masyarakat

Di Desa Argomulyo, *kenthongan* oleh warga juga didayagunakan untuk mewujudkan ketahanan sosial khususnya dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas). Menurut seorang informan, yang pekerjaan kesehariannya membuat *kenthongan* Hadi Sutrisno (78 tahun), meskipun pada saat ini telah merebak *handphone* sebagai alat komunikasi modern, tetapi warga masyarakat setempat terutama para generasi tua masih berusaha menghandalkan *kenthongan* sebagai wahana memelihara keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kiat ini dilaksanakan di samping karena para orangtua

pada umumnya tidak mampu mengoperasikan *handphone* dan kurangnya atau tidak bagus nya sinyal, sehingga memandang alat yang merupakan teknologi lokal tersebut masih pantas untuk terus dipertahankan. Mereka berusaha melestarikan penggunaan *kenthongan*, karena selain tidak mengeluarkan biaya juga informasi yang berkaitan dengan aman tidaknya kondisi desa cepat sampai pada masyarakat secara massal.

Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, *kenthongan* dibunyikan baik dalam kondisi normal dalam arti keadaan aman dan terkendali, maupun dalam kondisi adanya gangguan keamanan. Selaras konteks ini Surono (2014: 147) menyatakan, bahwa *kenthongan* biasanya dibunyikan pada saat peristiwa tertentu di lingkungan mereka, biasanya berkaitan dengan kondisi aman dan tidak aman. Dalam keadaan normal terutama pada malam hari dan biasanya pada saat tengah malam antara pukul 24.00 hingga 03.00 dinihari, menurut informan *kenthongan* sering dibunyikan sebagai pertanda situasi masyarakat dalam kondisi aman. Dalam menginformasikan situasi masyarakat berkondisi aman ini seorang warga membunyikan *kenthongan* dengan model *dara muluk*. Sebagaimana dikemukakan Warso (2014: 31), bahwa dalam situasi kondusif (aman) biasanya warga setempat membunyikan *kenthongan* yang disebut *dara muluk*.

Dalam situasi dan kondisi masyarakat mengalami gangguan keamanan, terutama pada waktu malam hari seperti adanya perilaku orang yang mencurigakan, peristiwa pencurian, dan tindakan kejahatan dengan kekerasan, ternyata warga setempat juga menginformasikan pada masyarakat dengan membunyikan *kenthongan*. Menurut seorang tokoh masyarakat yang tinggal di Dusun Kliwang, Munandar (64 tahun), terdapat tiga versi membunyikan *kenthongan* dalam kondisi yang tidak aman tersebut. Pertama, apabila terjadi keadaan yang oleh warga setempat disebut kondisi *samar-samar*, yakni keadaan mencurigakan yang mengarah pada tindak kejahatan, warga masyarakat menginformasikan melalui

pemukulan *kenthongan* dengan bunyi *loro-loro* yakni setiap dua pemukulan diselingi jeda (oo oo oo oo). Dengan adanya informasi tersebut diharapkan semua warga waspada dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai tindak kejahatan di malam itu.

Kedua, jika terjadi pencurian biasa seperti pencurian *raja kaya* (hewan ternak), *raja brana* (harta benda) seperti emas/uang, peralatan rumah tangga seperti televisi, kendaraan bermotor dan hasil panen, warga masyarakat memberitahu dengan membunyikan *kenthongan telu telu*, maksudnya pemukulan setiap tiga kali diselingi jeda (ooo ooo ooo ooo). Penyampaian situasi melalui suara *kenthongan* tersebut dimaknai, bahwa telah terjadi pencurian biasa dalam artian tidak diikuti dengan tindak kekerasan. Warga masyarakat yang mendengar suara *kenthongan telu-telu* diharapkan segera ke luar rumah untuk ikut serta berjaga dan berusaha menangkap pencurinya.

Ketiga, jikalau di wilayah setempat telah terjadi suatu pencurian diikuti dengan kekerasan fisik karena adanya perlawanan dari pemilik rumah, perampasan harta suatu keluarga dengan melukai korban yang oleh masyarakat disebut tindak *penggedoran*, bahkan terjadi pembunuhan, warga yang pertama mengetahui segera menyatakan adanya keadaan darurat dengan memukul *kenthongan* yang disebut *titir gandhul*. *Titir gandhul* adalah membunyikan *kenthongan* secara cepat dan lama dengan irama setiap sejumlah pemukulan diselingi jeda satu kali pukulan (oooooooo o ooooooooo o ooooooooo o dst). Menurut informan *kenthong titir gandhul* oleh masyarakat dimaknai keamanan warga dalam kondisi terancam, yakni telah terjadi perampasan harta dengan kekerasan atau pembunuhan, sehingga warga yang mendapat informasi tersebut diharapkan segera mencari tempat terjadinya peristiwa untuk secepat mungkin melakukan pertolongan.

Dari uraian mengenai kode, irama pemukulan, dan makna bunyi yang disepakati sebagaimana diuraikan, dapat ditegaskan bahwa warga Desa

Argomulyo masih mendayagunakan peralatan tradisional hasil teknologi lokal tersebut sebagai wahana untuk mewujudkan ketahanan sosial, setidaknya dalam memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban lingkungan. Dalam mewujudkan keamanan lingkungan, *kenthongan* difungsikan baik sebagai sarana mencegah terjadinya tindak pencurian, sebagai penanganan kasus pencurian, maupun berfungsi sebagai himbauan untuk segera memberikan pertolongan bagi korban yang mengalami tindak kekerasan ataupun pembunuhan. Fungsi tersebut senada dengan pernyataan Yunus (1994: 68), bahwa bunyi *kenthongan* oleh warga selain digunakan sebagai alat komunikasi, juga sebagai wahana mengantisipasi, mencegah, dan memelihara keamanan dalam mencapai ketahanan sosial masyarakat.

Wahana Mengajak Umat Islam untuk Beribadah Tepat Waktu

Hasil pengamatan terhadap masjid dan mushola di Desa Argomulyo menunjukkan, bahwa pada sejumlah tempat ibadah di daerah tersebut masih memfungsikan *kenthongan* sebagai sarana mengajak umat Islam untuk beribadah sholat tepat waktu. Terlihat peralatan hasil teknologi lokal tersebut secara umum dipajang di bagian serambi masjid atau mushola setempat. Pemasangan pada umumnya digantung pada *blandar* atau *usuk* serambi bagian kanan, kiri, atau bagian depan masjid/mushola.

Humam Turmudi (69 tahun) selaku tokoh agama di desa setempat (dalam wawancara 20 Maret 2017) menjelaskan fungsi *kenthongan* bagi umat Islam. Menurutnya, *kenthongan* kayuangka yang dimiliki masjid desa “Nurul Muttaqin” sudah ada sejak ia masih kanak-kanak. Tempo dulu sebelum adanya pengeras suara, *kenthongan* berfungsi utama sebagai sarana untuk mengingatkan waktu beribadah sholat telah tiba. *Kenthongan* dibunyikan untuk mengingatkan atau mengajak umat Islam melaksanakan ibadah sholat khususnya untuk sholat dhuhur, maghrib, dan sholat Jum’at.

Pemukulan *kenthongan* di masjid tidak dilakukan secara serampangan, tetapi mengacu beberapa ketentuan. Petugas yang memukul pun sudah ditunjuk secara permanen oleh pengurus masjid. Di masa lalu, sebelum pemasangan pengeras suara, *kenthongan* di masjid biasanya dibunyikan dengan model *dara muluk* (O Ooo.....ooO O). Maksudnya pemukulan keras satu kali diselingi jeda, selanjutnya pemukulan keras semakin melemah dan kembali pemukulan keras sekitar tujuh hingga sembilan kali kemudian jeda, dan diakhiri satu pemukulan keras sebagai penutup. Sesaat sebelum waktu sholat dhuhur dan maghrib tiba, petugas memukul *kenthongan* sekali model *dara muluk*. Jika warga khususnya umat Islam yang biasanya sholat berjamaah mendengar bunyi *kenthongan* itu, mereka segera bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Khusus terhadap bunyi *kenthongan* saat sholat dhuhur, oleh masyarakat awam bahkan dimaknai sebagai pananda waktu untuk beristirahat siang. Informan lain Baryono (61 tahun) seorang pendidik yang tinggal di Dusun Kowangen menceritakan, bahwa dimasa lalu jika mendengar *kenthong* dhuhur biasanya sesama petani di sawah saling mengingatkan waktunya istirahat siang dengan ajakan: *gegan-dhengan sampun tronthong sumonggo bapak ibu kendel kondur sumene rumiyin* (karena sudah *tronthong*, marilah bapak ibu pulang beristirahat dulu). Khusus pada sholat Jum’at *kenthongan* dibunyikan dua kali. Pemukulan *dara muluk* pertama mengandung makna, bahwa waktunya sholat telah tiba sehingga seluruh umat Islam segera menuju masjid untuk melaksanakan sholat sunat. Pemukulan *dara muluk* kedua bermakna, bahwa khotib sudah saatnya naik mimbar untuk menyampaikan khotbah dan melanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jum’at.

Di masjid “Muharrahim” Dusun Jetis *kenthongan* bahkan digantung secara berdekatan dengan *bedhug*. Menurut Arab (73 tahun) seorang takmir masjid setempat, penempatan *kenthongan* yang didekatkan dengan *bedhug* ini dimaksudkan agar dapat dibunyikan bersama

secara bergantian menjelang waktu sholat tiba. Informasi ini sesuai pendapat Surono (2015: 146) yang menyatakan, bahwa jarak *kenthongan* dan *bedhug* yang berdekatan ini bukan sebuah kebetulan, akan tetapi merupakan kesengajaan karena pada saat tertentu keduanya akan dibunyikan secara bergantian pada satu waktu.

Dalam pengamatan langsung peneliti di Masjid “Nurul Mutaqin” Dusun Jetis, ketika menjelang sholat Jum’at tiba *kenthongan* dan *bedhug* dibunyikan secara bergantian dalam waktu bersamaan. Sesaat sebelum adzan sholat Jum’at dikumandangkan oleh muadzin melalui pengeras suara, seseorang yang biasanya bertugas terlebih dahulu membunyikan *kenthongan* dan *bedhug*. Hasil pencermatan peneliti menunjukkan, pemukulan *kenthongan* dan *bedhug* diawali dengan pukulan *kenthongan* satu kali diselingi jeda, kemudian dilanjutkan pemukulan *kenthongan* secara berurutan, dan diakhiri satu pukulan *bedhug* (0 000000000 *dhung*). Setelah pemukulan *kenthongan* dan *bedhug* yang dilanjutkan suara adzan, terlihat para jama’ah berdatangan memasuki masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jum’at.

Kenthongan dibunyikan selain berfungsi sosial sebagai ajakan untuk melaksanakan ibadah sholat tepat waktu, ternyata juga dimanfaatkan oleh warga masyarakat setempat sebagai sarana untuk *nggugah sahur*. *Nggugah sahur* merupakan istilah setempat yang dimaksud adalah membangunkan warga (umat *Islam*) dari tidur pada dini hari di bulan Ramadhan agar mempersiapkan hidangan dan melaksanakan ibadah sunat makan sahur. Menurut Abdul Manan (67 tahun) seorang pemuka agama Islam, di Dusun Kowang, kegiatan *nggugah sahur* pada dini hari di bulan Ramadhan selalu dilaksanakan hampir di seluruh dusun wilayah Desa Argomulyo. Kegiatan *nggugah sahur* berkeliling kampung ini biasanya dilakukan oleh sejumlah pemuda dan anak-anak dengan memukul *kenthongan* secara bersama. Jika pada masa lalu hanya *ansih* sejumlah *kenthongan* yang dipukul bersama dengan irama tertentu, pada saat sekarang malah

pemukulan *kenthongan* dikolaborasikan dengan *drum band* untuk mengiringi syair lagu tertentu yang dilantunkan melalui tiupan harmonika.

Fungsi Jati Diri Masyarakat

Hasil kajian diperoleh temuan, bahwa di samping berfungsi sebagai wahana berkomunikasi sosial, *kenthongan* juga mempunyai fungsi sebagai jati diri masyarakat Jawa di lokasi kajian. Dalam posisinya sebagai jati diri masyarakat, *kenthongan* oleh warga setempat difungsikan dalam tiga hal berikut.

Media Pelestari dan Aktualisasi Nilai Kesetiakawanan Sosial

Masyarakat Indonesia khususnya di Jawa dan terlebih di daerah perdesaan pada umumnya memiliki kesetiakawanan sosial relatif tinggi, yang oleh Magnis Suseno (2003: 28) digambarkan sebagai masyarakat yang selalu memegang prinsip rukun (harmonis), yaitu berada dalam keadaan selaras dan serasi. Senada dengan pandangan tersebut, hasil penelitian Warto (2012: 2) menemukan, bahwa warga masyarakat di desa secara umum memandang kesetiakawanan sosial telah menjadi tradisi sebagai kepribadian dan sikap yang terpuji.

Temuan di Desa Argomulyo, ternyata *kenthongan* juga difungsikan oleh warga setempat sebagai sarana untuk mempertahankan dan mengatualisasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Warto (2015: 15), nilai-nilai yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial meliputi nilai kepedulian, gotong royong, rela berkorban, kebersamaan, musyawarah, tenggang rasa, tolong-menolong, dan cinta kasih sesama. Berikut contoh bukti yang menunjukkan, bahwa *kenthongan* oleh warga masyarakat setempat difungsikan sebagai wahana pelestari dan aktualisasi nilai kesetiakawanan sosial. Pertama, apabila *kenthongan* dibunyikan misalnya berkaitan dengan perilaku kejahatan seperti kode adanya situasi mencurigakan, terjadi pencurian, ataupun perampasan dibarengi tindak kekerasan,

maka masyarakat secara spontan memperlihatkan sikap kepeduliannya. Sikap peduli tersebut warga tunjukkan dengan tindakan keluar dari rumah untuk mencari tahu, atau berkumpul di pos ronda untuk menjaga lingkungan, dan jika terjadi korban segera memberi pertolongan. Kedua, apabila terjadi bencana alam seperti erupsi, puting beliung, atau banjir lahar, warga masyarakat setempat juga memperlihatkan perilaku kebersamaan, merasa senasib dan sepenanggungan, serta sikap cinta kasih sesamanya, sehingga mereka yang mengetahui lebih dahulu atas kejadian alam tersebut segera menginformasikan kepada warga yang lain melalui pemukulan *kenthongan* model *titir gobyok*. Ketiga, jika *kenthongan* yang menggantung di makam dibunyikan dengan kode *dara muluk*, maka warga setempat tanpa diperintah secara bersama dengan suka rela segera melakukan gotong royong kerja bakti untuk membersihkan lingkungan makam.

Mengacu temuan fungsi *kenthongan* dalam kaitan sebagai pelestari dan aktualisasi nilai kesetiakawanan sosial dapat ditegaskan, bahwa *kenthongan* sejatinya berperan penting dalam upaya mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial bagi masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, apabila generasi tua di Desa Argomulyo menginginkan generasi penerusnya tetap memiliki sikap dan perilaku yang senantiasa mengaktualisasikan nilai kesetiakawanan sosial, maka salah satunya dapat diupayakan dengan mempertahankan keberadaan *kenthongan* dan memfungsikan secara terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat.

Ciri Khas Masyarakat

Setiap suku bangsa yang ada di negara kita pada dasarnya memiliki ciri tertentu yang membedakan satu dengan yang lain. Kenyataan ini dipertegas oleh Geertz (dalam Budhi Santoso, 2011: 37) yang menerangkan, bahwa manusia memiliki ciri penting yakni kemampuan dalam melakukan komunikasi sehari-hari dengan menggunakan berbagai sarana yang ada. Sehubungan dengan perihal tersebut Surono (2015:

150) menyatakan, pada masyarakat Jawa *kenthongan* memiliki makna tersendiri sebagai suatu identitas dari kebudayaannya. Identitas ini ingin ditunjukkan kepada orang di luar masyarakat Jawa, bahwa mereka memiliki sebuah *kenthongan* yang merupakan sarana untuk menunjukkan diri sebagai masyarakat egaliter dan penuh dengan kebersamaan.

Mengacu pendapat tersebut dapat ditegaskan, bahwa *kenthongan* juga difungsikan sebagai ciri khas masyarakat Jawa. Berikut penjelasan mengenai fungsi *kenthongan* sebagai ciri khas masyarakat di Desa Argomulyo. Pertama, sebagai ciri khas dari masing-masing keluarga. Hasil pengamatan peneliti selama mengunjungi dusun-dusun di wilayah desa tersebut menunjukkan, bahwa setiap rumahtangga/ keluarga mempunyai *kenthongan* yang tidak sama. Ketidaksamaan *kenthongan* ini terlihat dari bahan, ukuran, bentuk, dan ornamen/ukiran, bahkan bunyi yang dihasilkan. Dari sisi bahan, ada yang dibuat dari bahan berkualitas seperti kayu nangka dan sonokeling, ada yang berbahan cukup berkualitas seperti kayu munggur dan *glugu* (pohon kelapa), bahkan ada *kenthongan* yang dibuat dengan bahan kurang berkualitas seperti bambu. Dari sisi ukuran dan bentuk juga berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ataupun selera masing-masing keluarga. Dari aspek ornamen atau ukiran, ada yang diukir dengan motif raksasa atau hewan. Dari aspek suara, kenyataan *kenthongan* yang dibuat dengan bahan sama terbukti menghasilkan bunyi berbeda-beda. Dengan kondisi seperti itu dapat ditegaskan, bahwa kepemilikan *kenthongan* dapat sebagai ciri khas masing-masing keluarga.

Bukti lain berkaitan dengan fungsi *kenthongan* sebagai ciri khas masyarakat Jawa, dalam wawancara dengan seorang tokoh seni budaya di Dusun Nasa, Menta Tukimin (76 tahun) menjelaskan: *kenthongan meniko sampun dados ciriwanci masyarakat Jawi, saenggo barang kino meniko sampun manjing ajur ajer ngrasuk wonten ing pagesanganipun warga masyarakat ing mriki. Kathah pagelaran seni budaya in-*

gkang ngginakaken kenthongan upaminipun pagelaran kesenian gejog lesung lan kethoprak. Berikut penjelasan informan tersebut jika dialih dalam bahasa Indonesia: *kenthongan* itu sudah menjadi ciri khas masyarakat Jawa, sehingga benda kuno itu sudah menancap, mendidih, dan merasuk dalam kehidupan masyarakat di sini. Banyak pementasan seni budaya yang menggunakan *kenthongan* umpamanya kesenian *gejog lesung* dan *kethoprak*.

Dari penjelasan sumber data tersebut dapat diketahui, bahwa *kenthongan* ternyata juga dimanfaatkan sebagai instrumen pelengkap seni tradisional *gejog lesung*, agar alunan suaranya merdu dan bertalu-talu sehingga lebih indah didengar. Dalam posisinya sebagai instrumen musik kesenian *kethoprak* diperoleh informasi, bahwa *kenthongan* yang digunakan disebut *trothok*, sedang yang memukul/membunyikan disebut *keprak*. Fungsi *kenthongan trothok* yang dibunyikan oleh *keprak* adalah memberi aba irama gamelan yang mengiringi pementasan *kethoprak*. Fungsi ini dipertegas oleh Surono (2015: 149) dengan menyatakan, dalam pertunjukan *kethoprak*, *kenthongan* memegang peranan yang sangat penting. *Kenthongan* menjadi ciri khas dari seni *kethoprak*, suatu pertunjukan *kethoprak* yang tidak diiringi dengan suara *kenthongan* akan menjadi sesuatu yang sangat aneh.

Lambang Kehidupan Masyarakat

Surono (2015: 150) berkaitan dengan keberadaan *kenthongan* menyatakan, bahwa dalam masyarakat Jawa *kenthongan* sebagai sebuah produk kebudayaan sarat dengan simbol-simbol yang penuh dengan makna. Simbol adalah sebuah tanda atau kode yang diberi makna atas kesepakatan masyarakat pendukungnya. Pada kenyataan berdasar pengalaman empirik, manusia adalah makhluk sosial yang menciptakan berbagai simbol dengan memahami maknanya. Oleh karena itu, dalam pengkajian tentang simbol perlu menelaah mengenai tanda atau kode lambang dan maknanya. Menurut Ahimsa Putra

(2004: 37) tanda dari suatu simbol meliputi tanda yang bersifat abstrak, agak abstrak, serta tanda yang bersifat konkrit dan empirik. Tanda yang sifatnya abstrak misalnya ide, pengetahuan, nilai, dan norma yang kesemuanya tidak terlihat karena tersimpan dalam pikiran. Tanda agak abstrak seperti perilaku dan tindakan manusia. Tanda yang sifatnya konkrit dan empirik yakni berupa hasil perilaku dan tindakan manusia. Mengacu pendapat tersebut, maka *kenthongan* merupakan hasil perilaku dan tindakan manusia yang sifatnya konkrit dan empirik. Sebagai hasil perilaku atau tindakan manusia yang bersifat konkrit dan empirik, *kenthongan* merupakan simbol dari kehidupan warga di lokasi kajian yang memiliki beberapa fungsi sosial bagi masyarakat setempat.

Rodin (66 tahun) seorang tokoh seni budaya selaku informan yang tinggal Dusun Karanglo berpandangan, dan berikut pernyataannya dengan logat bahasa Jawa yang kental. *Kagem tiyang Jawi, sejatosipun kenthongan menika kathah ginanipun. Mboten mligi kangge sarana caos uninga utawi caos pawartos mawi kode wirama suwanten, namung kenthongan ugi minangka perlambang ingkang maknanipun mawarni-warni, antawisipun lambang kalenggahan tiyang kadasta dukuh, lurah, lan pamong sanesipun. Ugi minangka lambang ingkang nggambaraken kelas sosial satunggaling warga, sahingga kenthongan kagunganipun tiyang ingkang sugih biasanipun langkung sae lan ageng ukuranipun.* Berikut pengertian informasi tersebut jika dialih dalam bahasa Indonesia. Bagi orang Jawa, sejatinya *kenthongan* itu banyak gunanya. Tidak hanya khusus sebagai sarana pemberitahuan atau menyampaikan berita dengan kode irama suara tetapi *kenthongan* juga sebagai simbol yang maknanya bermacam-macam, antara lain sebagai lambang kedudukan warga di dalam masyarakat seperti kepala dusun, kepala desa, dan pamong desa lainnya. Di samping itu, juga sebagai lambang yang menggambarkan kelas sosial seorang warga, sehingga orang yang kaya biasanya memiliki *kenthongan* lebih baik dan besar ukurannya.

D. Penutup

Berdasar analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa dibalik fungsi sebagai wahana berkomunikasi sosial ternyata *kenthongan* juga berfungsi sebagai jati diri masyarakat Jawa. Dalam posisinya menjadi wahana berkomunikasi sosial *kenthongan* antara lain berfungsi sebagai sarana peringatan dini bencana, sebagai sarana mengumpulkan warga untuk bermusyawarah dan bergotong royong, sebagai media mewujudkan ketahanan sosial masyarakat, dan sarana membiasakan umat Islam untuk beribadah tepat waktu. Dalam posisinya menjadi jati diri masyarakat, *kenthongan* berfungsi sebagai wahana pelestari dan aktualisasi nilai kesetiakawanan sosial, sebagai ciri khas masyarakat Jawa, serta sebagai lambang kehidupan warga.

Atas dasar kesimpulan tersebut direkomendasikan, agar Kementerian Sosial bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan berbagai upaya revitalisasi fungsi *kenthongan*, karena perangkat tradisional hasil teknologi lokal tersebut terbukti berfungsi sebagai wahana berkomunikasi sosial dan sebagai jati diri masyarakat. Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dinas terkait seperti dinas sosial, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas kebudayaan, dan dinas pariwisata hendaknya mengangkat kembali kejayaan peran dan keberfungsian sosial *kenthongan* bagi masyarakat. Berbagai pihak kompeten tersebut seyogyanya mendorong segenap elemen masyarakat agar *kenthongan* menjadi perangkat penting penumbuhan fungsi sosial, jati diri, dan ikon keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dimiliki oleh setiap rumah tangga dengan keragaman bentuk dan ornamen yang dibuat menarik.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh informan yang telah memberikan informasi terkait penelitian tentang penumbuhan fungsi sosial masyarakat daerah per-

desaan melalui *kenthongan*, khususnya warga Desa Argomulyo disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Ahimsa Putra. (2012). *Budaya Bangsa-Peran untuk Jati Diri dan Integrasi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Atik Tri Ratnawati, dkk. (2012). *Revitalisasi Kesenian Sintren di Kota/Kabupaten Pekalongan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Budhi Santoso. (2011). *Pembangunan Nasional dan Perkembangan Kebudayaan (Makalah Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengembangan Kebudayaan Daerah)*. Yogyakarta: Proyek P2NB.
- Doty Damayanti. (2011). *Managemen Bencana Mendorong Mitigasi Berbasis Resiko dalam Bencana Mengancam Indonesia*. Ed. Irwan Suhandi. Jakarta: Buku Kompas
- Hanafi Dahlan. (2012). *Prospek Program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)*. Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 13. No. 4. 2014.
- Jim Ite. (2002). *Community development. Community Based Alternative in Age of Globalization*. Longman is and Timprint of Paperson Education. Australia
- Magnis Suseno. (2003). *Etika Jawa sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia
- Muhtar. (2012). *Efek Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi terhadap Kepuasan Penerima Layanan pada PSPA Satria, PSMP Antasena, dan BBRSD Prof. Dr. Soeharso*. Yogyakarta; Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 13 No. 4. 2014
- Soetji Andari. (2010). *Ketertarikan Remaja terhadap Jejaring Sosial Melalui Internet*. MIPKS Vol. 3 No. 2. Juni 2010

- Sugiarti. (2012). *Pengaruh Posisi Memukul Kenthongan terhadap Frekuensi yang Dihasilkan*. Yogyakarta: Rodi PSN Konsentrasi Fisika, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sumiati. (2007). *Makna Lambang dan Simbol Kenthongan dalam Masyarakat Indonesia*. Jurnal Historia Vitae. Vol. 21. No. 02. 2007.
- Surono. (2015). *Kenthongan: Pusat Informasi, Identitas, dan Keharmonisan pada Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Patrawidya, Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya. Vol. 16. No. 1. 2015
- Warto. (2008). *Menguak Kesalehan Sosial dalam Penanggulangan Korban Gempa di Bantul*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- _____. (2012). *Budaya Lokal sebagai Wahana Pelestarian Nilai Kesetiakawanan Sosial*. Yogyakarta: Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 13. No. 4. 2014
- _____. (2014). *Masyarakat Desa dan Kearifan Lokalnya dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial*. Yogyakarta: Citra Media
- _____. (2015). *Penanaman Nilai Kesetiakawanan Sosial pada Anak melalui Dolanan Lokal*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Yoyok dan Siswandi. (2006). *Pendidikan Seni Budaya untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Yudhistira.
- Yunus. (1994). *Nilai dan Fungsi Kenthongan pada Masyarakat Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera

Implementation of Integrated Social Welfare Services and Caring Society Movement to Prosperous District or City

Trilaksmi Udiati¹ dan Sri Yuni Murtiwiidanti²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial, Jln. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta. Telpn. (0274) 377265, Fax (0274) 373530.

¹E-mail: tudati@yahoo.com HP. 081328464707 ² E-mail:yunimurti@rocketmail.com HP. 085747435299

Diterima 15 Juni 2017, diperbaiki 13 September 2017, disetujui 18 September 2017

Abstract

This study is aimed to identify and to describe the implementation of integrated social welfare services and caring society movement to district or city prosperous (Pandu Gempita). The research was conducted in Berau, East Kalimantan Province. The research data sources were gained from the managers of integrated services, regional authorized personnel working unit (SKPD), businesses, social organizations linked to poverty handling as many as 20 informants. Data collecting techniques were interview, observation and document studies. The data was analyzed in qualitative descriptive technique. The results showed that the implementation of UPTD-PTKS in Berau district was supported by related SKPD, by businesses, by society and by that of regional leaders' commitment through local government budget support. Some obstacles appeared in the processes of personnel placement legal aspects for those managed the UPTD-PTKS so that the service still remained as a reference which can not be solved in UPTD-PTKS. There haven't been Standard Operational Procedures (SOP) yet that regulate the work mechanism of SKPD concerned. There haven't been Internet network and integrated database so that the target, concerned SKPD programs haven't been unified to UPTD-PTKS as online, on the other hand UPTD-PTKS hasn't functioned online yet to distribute services to SKPD concerned as needed by clients. It is then recommended to the Ministry of Social Affairs: revising the General Guidelines and Technical Guidelines on the position of Pandu Gempita (UPTD-PTKS), up grading the managing human resources and that of Pandu Gempita service implementation companions.

Keywords: implementation; integrated services; social welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan implementasi pelayanan kesejahteraan sosial terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera (Pandu Gempita). Lokasi penelitian di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data penelitian adalah pengelola pelayanan terpadu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dunia usaha, organisasi sosial yang berkait penanganan kemiskinan sebanyak 20 informan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan Pandu Gempita bernama UPTD-PTKS (Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Berau mendapat dukungan dari SKPD terkait, dunia usaha, masyarakat, dan komitmen pimpinan daerah melalui dukungan APBD. Hambatan yang dialami masih dalam proses legalitas penempatan personil pengelola UPTD-PTKS sehingga pelayanan masih bersifat rujukan belum bisa diselesaikan di UPTD-PTKS. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme kerja SKPD terkait. Belum ada jaringan internet dan database terpadu sehingga sasaran, program SKPD terkait belum tergabung secara online ke UPTD-PTKS, sebaliknya UPTD-PTKS belum secara online menyalurkan pelayanan ke SKPD terkait sesuai kebutuhan kelayan. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial RI: merevisi panduan umum dan panduan teknis tentang kedudukan Pandu Gempita (UPTD-PTKS), meningkatkan SDM pengelola dan pendampingan pelaksanaan pelayanan Pandu Gempita.

Kata kunci: implementasi; pelayanan terpadu; kesejahteraan sosial

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks dan multi-dimensional, ditandai oleh keberadaan pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan masyarakat. Kemiskinan tidak dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak dasar yang dimaksud secara umum meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan secara layak bagi kemanusiaan.

Setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang sejahtera dan layak bagi kemanusiaan, maka dari itu secara umum sistem kesejahteraan sosial harus didapatkan oleh seluruh warga negara. Namun sasaran utama sistem jaminan sosial (perlindungan sosial) diarahkan pada kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, pasal 34, ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia agar mencapai kondisi kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa (11,22 persen). Penduduk miskin tercermin dalam penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, permasalahan kemiskinan berdampak pada permasalahan kesejahteraan sosial. Menurut Pusdatin, Kemensos RI Tahun 2015 terdapat lima besar permasalahan kesejahteraan sosial, yaitu: Keluarga Fakir Miskin sebanyak 7.504.736 KK, Keluarga Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 4.451.807 KK, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 2.296.425 jiwa, Anak Terlantar sebanyak 1.677.780 jiwa

dan Penyandang Cacat sebanyak 1.250.780. Kelima permasalahan kesejahteraan sosial tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota bahkan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan dan permasalahan sosial lain, maka idealnya penanganan harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, lintas sektor serta lintas pelaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan melalui upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Era Desentralisasi, maka kemampuan pendanaan pemerintah pusat semakin berkurang sehingga perlu diimbangi dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah termasuk di dalam pengelolaan dana penyelenggaraan pelayanan sosial.

Di era otonomi daerah ini, pelayanan kesejahteraan sosial harus lebih menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Konsekuensi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih mengenali dan memahami permasalahan sosial di daerah, sekaligus mampu memberikan solusi layanan yang dibutuhkan masyarakat secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi dan terpadu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud untuk mengupayakan terpenuhi taraf kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 24, Ayat (1): Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk tingkat propinsi oleh Gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota oleh Bupati. Berkait

dengan hal tersebut maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan harus lebih efektif dan efisien serta lebih mampu menjangkau sasaran secara proaktif menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bermitra dengan dunia usaha dan LSM/Orsos.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini masih bersifat sektoral, fragmentaris, bersifat amal (*charitative*), jangkauan terbatas, hanya merespon masalah aktual secara reaktif, fokus pelayanan masih berbasis institusi dan belum memiliki rencana strategis nasional untuk keterpaduan pelayanan. Pelayanan masih terpecah dan belum terintegrasi dalam suatu program. Salah satu contoh: di Indonesia terdapat sekitar 20 program penanggulangan kemiskinan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sasarannya orang miskin namun dengan berbagai metode *targeting* dan *database* yang berbeda. Regulasinya berbeda-beda serta sulit mengukur efektifitas program bahkan membingungkan masyarakat untuk dapat menjangkau dan mengakses layanan dimaksud. Kemiskinan merupakan masalah sosial mendasar yang dalam penanganannya memerlukan keterpaduan dan multi disipliner. Terjadi pergeseran paradigma dan reformasi birokrasi pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial yaitu pelayanan sosial harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, menjangkau seluruh warga yang mengalami masalah sosial menggunakan sistem dan program yang melembaga dan profesional, mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga, masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis.

Tindak lanjut dari perubahan paradigma dan reformasi birokrasi pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial melakukan terobosan melalui strategi Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Melalui program Pandu Gempita kegiatan masing-masing sektor dapat saling menunjang sehingga

program pemerintah bidang kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Implementasi dari Pandu Gempita adalah terbentuknya lembaga yang mampu memberikan pelayanan secara terpadu bagi masyarakat yang didahului penandatanganan kesepahaman bersama yang sudah dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan komponen program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terpadu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan serta mengacu pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/ HUK/ 2013 tentang Pandu Gempita.

Berau merupakan salah satu kabupaten yang bersedia dan telah melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dengan Kementerian Sosial RI c.q Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial pada tahun 2013. Setelah dua tahun berjalan, maka perlu dilakukan penelitian bagaimana pelaksanaan Pandu Gempita di Kabupaten Berau, faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah dalam upaya pemberian pelayanan secara terpadu atau terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pelayanan dasar lain yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial lain. Manfaat teoritik dari penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan sosial dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial lain.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*). Bog dan dan Taylor (Moleong, 2002) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu dan kelompok. Berkait dengan hal tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan mengidentifikasi dan menggambarkan tentang pelaksanaan Pandu Gempita, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pandu Gempita. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan kabupaten yang bersedia melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu (Pandu Gempita), pimpinan daerah memiliki komitmen dan kesediaan investasi untuk melaksanakan pelayanan model Pandu Gempita. Sumber data penelitian ini adalah pengelola pelayanan terpadu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dunia usaha, organisasi sosial yang berkait penanganan kemiskinan sebanyak 20 informan.

Implementasi Pandu Gempita dianalisis dari aspek: dukungan kebijakan dan payung hukum, sumber dana, struktur organisasi, dukungan (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial), dukungan sarana prasarana, mekanisme pelayanan, pengendalian (monitoring, evaluasi dan pelaporan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara untuk memperoleh data primer dan sekunder. Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi untuk mengamati dan melihat kondisi riil penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu. Telaah dokumen digunakan untuk memperoleh data yang telah terdokumentasi, baik catatan, laporan kegiatan yang berkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Proses analisis data ditekankan selama proses pengumpulan data berlangsung. Pada tahap ini peneliti sudah melakukan analisis terhadap data berdasar jawaban informan yang diwawancarai. Meski demikian pasca pengumpulan data, analisis tetap dilakukan. Proses analisis mengalir dari tahap awal sampai tahap penarikan kesimpulan hasil penelitian. Komponen analisis data

yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif saling berhubungan selama, dan sesudah pengumpulan data (Mill dan Huberman dikutip Burhan Bungin, 2003).

C. Penyelenggaraan Pandu Gempita pada Era Otonomi Daerah

1. Deskripsi Kabupaten Berau

Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 34.127,47 km² terdiri dari daratan seluas 22.030,81 km² dan luas laut 12.299,88 km (13,92%) dari luas wilayah Kalimantan Timur, dan terdiri dari 52 pulau besar dan kecil. Kabupaten Berau sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Secara administrasi Kabupaten Berau terbagi dalam 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 96 Kampung/Desa. Data Disdukcapil Kabupaten Berau jumlah penduduk hingga bulan Agustus 2015 mencapai 6.048 jiwa dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 1739 KK. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 7,11 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan banyak migrasi masuk terkait dengan dibukanya perusahaan besar khususnya di sektor pertambangan. Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur bagian Utara.

Kabupaten Berau memiliki sumber daya alam berupa hutan, lahan perkebunan, tambang, mineral, dan destinasi pariwisata yang menghasilkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu perusahaan besar yaitu PT. Berau Coal yang bergerak di bidang tambang batubara, perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Terdapat potensi alam berupa hasil kelautan, kondisi alam yang indah menjadi ikon pariwisata Kabupaten Berau yakni Pulau Derawan, Pulau Malatua.

Sumber daya alam tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat didayagunakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Berau. Disisi lain, di Kabupaten Berau terdapat jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosial, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, maupun sosial secara wajar memadai. Menurut Siporin (1975), menjelaskan bahwa pengertian masalah sosial “*A social problem may be understood as a difficulty in social functioning on the part of an individual or a collectivity or both*”. Sebuah masalah sosial mungkin dapat diartikan sebagai kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosial secara individu atau kolektivitas atau keduanya. Terkait dengan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data PMKS Kabupaten Berau

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Cacat	212
2	Korban Penyalahguna Napza	64
3	Penyandang Cacat Fisik (Daksa)	56
4	Penyandang Cacat Mata	28
5	Penyandang Cacat Rungu	73
6	Penyandang Cacat Mental	90
7	Penyandang Cacat Fisik dan Mental	10
8	ODK Berat	36
9	Lanjut Usia	1410
10	Keluarga Miskin	1739
11	Bekas Narapidana	100
12	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	741
13	Wanita Rawan Sosial	51

Sumber Data: Dinas Sosial, 2015

Fakir miskin merupakan PMKS terbanyak yakni mencapai 1739 KK. Permasalahan sosial kedua adalah lanjut usia terlanter sebanyak 1.410 jiwa. Dari jumlah lansia tersebut baru 20 orang yang mendapat program ASLUT dan masih terdapat 30 orang yang tercatat sebagai daftar tunggu. Tidak semua lansia merupakan penyandang

masalah kesejahteraan sosial karena sebagian besar mereka masih tinggal bersama keluarga. KAT sebagai PMKS fakir miskin ada sebanyak 741 KK. Permasalahan sosial yang muncul diawali dari kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat Berau seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di negara sedang berkembang. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan dalam bidang ekonomi. Dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup paling pokok seperti pangan, pakaian dan tempat berteduh atau dengan pendapat lain. Kemiskinan dapat juga ditandai dengan adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat Berau tidak hanya menyangkut aspek ekonomi tetapi menyangkut aspek lain. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Booth Cawley (Tjahya, 1997), bahwa kemiskin ditandai oleh adanya kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan SMERU, kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk., 2004).

Kemiskinan mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskin pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Nugroho (2000) lebih lanjut, menyatakan kemiskinan merupakan masalah multidimensional bukan saja berkaitan dengan masalah ekonomi dan keterbatasan pengetahuan tetapi berdimensi kompleks. Kompleksitas kemiskinan meliputi: kemiskinan berdimensi ekonomi, kemiskinan sosial dan budaya, serta kemiskinan struktural atau kemiskinan politik. Penanganan tersebut harus dilakukan secara intensif, integratif (Nu-

groho, 2000). Chambers dalam Bastaman (2000) menyatakan, bahwa kemiskinan disebabkan oleh lima ketidakberuntungan (*disadvantages*) pada kelompok keluarga miskin, yakni: 1) keterbatasan kepemilikan aset (*poor*); 2) kondisi fisik yang lemah (*physically weak*); 3) keterisolasian (*isolation*); 4) kerentanan (*vulnerable*); dan 5) ketidakberdayaan (*powerless*).

Dari beberapa konsep kemiskinan tersebut dapat diartikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dibawah standar garis kemiskinan yaitu ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal meliputi: kebutuhan makan 2.100 kalori per orang per hari, papan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara layak atau hidup layak seperti yang dialami sebagian masyarakat pada umumnya. Kondisi kemiskinan ini dikarenakan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, ketidaksamaan kesempatan mengakumulasi modal produktif atau aset, sumber keuangan, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan barang dan jasa, pengetahuan, keterampilan dan informasi untuk peningkatan taraf kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin agar mampu mengembangkan diri dan mengakses sumber yang ada sehingga berada pada posisi di atas garis kemiskinan dan hidup layak serta dapat berfungsi sosial.

Terkait permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan sosial untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Huttman, kebijakan sosial adalah strategi, tindakan atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Spicker lebih lanjut menyatakan, kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkait dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit menunjuk pada beberapa pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat. Kebijakan sosial didefinisikan oleh Marshall sebagai kebijakan pemerintah yang berkait dengan tindakan dan

memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Suharto, 2009). Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2009) apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial lain.

Salah satu kebijakan sosial yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial adalah mewujudkan program Pandu Gempita. Pemerintah daerah di Kabupaten Berau berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah sosial terutama permasalahan kemiskinan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatnya anggaran untuk dinas sosial. Pemerintah daerah memberi anggaran kepada UPTD-PTKS (nama pandu gempita di Kabupaten Berau) melalui APBD perubahan sebesar 1,1 milyar untuk kegiatan verifikasi data *by name by address* penduduk miskin dalam rangka memiliki *database* terpadu. Implementasi Pandu Gempita didukung potensi dan sumber sebagai berikut: Jumlah fasilitas kesehatan berupa 17 unit puskesmas induk dan 96 unit puskesmas pembantu yang tersebar di 13 kecamatan. Terdapat empat kecamatan yang memiliki dua Puskesmas dan hampir di semua desa/kelurahan terdapat Puskesmas Pembantu, berarti sarana prasarana sudah cukup memadai. Potensi kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan Pandu Gempita UPTD-PTKS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau berupa lima Panti Asuhan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 13 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 210 orang dan pengurus Karang Taruna sebanyak 45 orang. Selain itu terdapat Pendamping Sosial (Pendamping Kube, Pendamping PKH, Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia) yaitu masyarakat yang mendapat pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Pekerja sosial tersebut

sebagai mitra dalam pemetaan data permasalahan kesejahteraan sosial. Organisasi sosial yang mendukung pelayanan terpadu meliputi, Karang Taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dapat diberdayakan sebagai wahana dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat.

2. Implementasi Pelayanan Terpadu di Kabupaten Berau

Pandu Gempita merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam kerangka kelembagaan. Pandu Gempita sebagai wujud dari pelayanan kesejahteraan sosial merupakan implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pelayanan sosial yang telah dirumuskan oleh berbagai pekerja sosial profesional diantaranya Siporin. Menurut Siporin (1975) pelayanan sosial adalah: *Social services are comprised of individualized, direct, organized activities or case interventions that aim at helping an individual or collectivity adaptation. Social services constitute and also provide needed resources to help people improve social competencies, effect behaviour and identity change, resolve adjustment problems. They directly support, supplement and substitute for the function of other social institution care, and especially the family* (Pelayanan sosial terdiri dari individual, langsung, kegiatan yang diselenggarakan atau intervensi kasus yang bertujuan untuk membantu adaptasi individu atau kolektivitas. Layanan sosial merupakan dan juga menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu orang meningkatkan kompetensi sosial, perilaku efek dan perubahan identitas, menyelesaikan masalah penyesuaian. Mereka langsung mendukung, suplemen dan pengganti fungsi perawatan institusi sosial lain, dan terutama keluarga). Dalam

konteks penelitian ini pelayanan sosial yang dimaksud adalah pelayanan sosial yang dikelola secara terpadu (satu atap) banyak loket, banyak fungsi dalam bentuk kelembagaan dengan dukungan masyarakat dan dunia usaha.

Pelayanan sosial mempunyai beberapa tipe dan klasifikasi dari fungsi pelayanan sosial. Menurut Titmuss (dalam Khan, 1979) bahwa *“....manifest functions of social service from the perspective of the society, lists the following, wich we have paraphrased, rearranged, and illustrated:*

- a. *Services or benefits designed to add to the welfare of individuals, families, or group, immediately, or in the long run (day care program)*
- b. *Services or benefits designed to protect society (probation)*
- c. *Services or benefits designed as an investment in people essential to achievement of social gals (a manpower program)*
- d. *Services or benefits designed “as compensation for socially caused disservices” where*
- e. *responsibility cannot be otherwise assigned (industrial accident compensation, compensatory programs where there has been racial discrimination).*

Pendapat Titmuss tersebut mengemukakan bahwa manifestasi fungsi dari pelayanan sosial dari perspektif masyarakat, terdiri dari hal seperti yang telah terikhtisar, ditata dan diilustrasikan sebagai berikut.

- a. Pelayanan atau pemanfaatan didesain untuk menambah kesejahteraan pada individu, keluarga atau kelompok, sesegera mungkin atau dalam jangka panjang.
- b. Pelayanan atau pemanfaatan didesain untuk melindungi masyarakat (probasi).
- c. Pelayanan atau pemanfaatan didesain sebagai sebuah investasi terhadap orang yang penting bagi pencapaian tujuan sosial (program *manpower*).
- d. Pelayanan atau pemanfaatan didesain “sebagai kompensasi bagi pelayanan yang

tidak diberikan karena alasan sosial” dimana tanggung jawab tidak dapat dialihkan (kompensasi kecelakaan industri, program kompensasi dimana ada diskriminasi ras).

Pandu Gempita di Kabupaten Berau bernama Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial (UPTD-PTKS) atas dasar Surat Keputusan, Komitmen Bupati Kabupaten Berau Nomor: 460/198/Set.2/II/2013, tentang: Kabupaten Berau bersedia menjadi percontohan kabupaten sejahtera. UPTD-PTKS dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial mendapat dukungan bupati, kepala SKPD terkait, dunia usaha dan Baznas Kabupaten Berau. Dalam rangka mewujudkan tekad menuju Kabupaten Sejahtera, Kabupaten Berau melaksanakan secara sungguh-sungguh program penanggulangan kemiskinan melalui UPTD-PTKS yang berkedudukan di bawah Dinas Sosial. Model layanan terpadu UPTD-PTKS adalah model satu atap banyak loket banyak fungsi (*One Stop Office Multi Desk-Multi Functions*). Pelayanan Terpadu diharapkan dapat menjadi kebijakan yang strategis, sehingga secara nyata mampu menstimuli dan menggerakkan pilar-pilar partisipan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menuju terwujudnya kota atau kabupaten sejahtera. Terkait dengan upaya mewujudkan pelayanan terpadu bertujuan menjadikan Kabupaten Berau ramah terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan menerapkan “Pelayanan Satu Atap” dalam sistem pelayanan kesejahteraan sosial.

UPTD-PTKS diresmikan tanggal 14 Mei 2014, hampir satu tahun setelah Kabupaten Berau bersedia menjadi percontohan Kabupaten Sejahtera. Pada saat dilakukan penelitian tahun 2015 belum ada aturan turunan dari Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD-PTKS terkait dengan kebijakan penempatan petugas pelayanan kesejahteraan sosial yang duduk di UPTD-PTKS. Belum ada payung hukum terkait pembuatan *database* sasaran

garap berdasarkan indikator kemiskinan lokal yang sesuai dengan kondisi masyarakat Berau. *Database* yang dimaksud dapat mengintegrasikan indikator sasaran program masing-masing SKPD dan lembaga lain. Indikator kemiskinan lokal telah disusun oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Berau dan digunakan sebagai acuan dalam verifikasi dan validasi data. Indikator kemiskinan lokal Kabupaten Berau adalah.

- a. Kondisi Rumah dilihat dari: Pertama, Status Kepemilikan: 1) milik orang tua; 2) pinjam gratis; 3) menyewa; 4) milik sendiri. Kedua, Luas Bangunan : 1) <36m²; 2) 36-50m²; 3) 51-75m²; 4) >75m². Ketiga, Material Atap: 1) daun; 2) seng kondisi rusak; 3) seng kondisi masih bagus; 4) genting. Keempat, Material Lantai: 1) tanah/kayu rusak; 2) kayu kondisi baik; 3) plester/tegel/kayu; 4) keramik. Kelima, Material Dinding: 1) kayu rusak; 2) kayu kondisi baik; 3) tembok beton; 4) beton cor baik. Keenam, Sumber Air: 1) sungai; 2) air hujan/sumur; 3) sumber air fasilitas umum; 4) PDAM. Ketujuh, Toilet: 1) milik fasum; 2) milik sendiri jelek; 3) milik sendiri sedang; 4) milik sendiri baik. Kedelapan, Penerangan Rumah: 1) lampu temple; 2) listrik numpang tetangga; 3) PLN 450 W; 4) >500 W. Kesembilan, Bahan Bakar Dapur: 1) kayu bakar; 2) minyak tanah; 3) gas 3 kg; 4) gas 12 kg. Kesepuluh, Perabot Elektronik: 1) tidak punya; 2) TV; 3) kulkas; 4) mesin cuci. Kesebelas, Alat Transportasi: 1) sepeda ontel; 2) sepeda motor; 3) sepeda motor > 1; 4) mobil.
- b. Kondisi Sosial Ekonomi dilihat dari: Pertama, Pendidikan KK : 1) tidak sekolah, tidak tamat SD; 2) SD; 3) SMP sederajat; 4) SMA/SMK/PT. Kedua, Pekerjaan KK: 1) buruh; 2) petani/nelayan; 3) pedagang kecil; 4) wirausaha/pedagang sandang. Ketiga, Penghasilan/bln: 1) <Rp.1,25 jt; 2) Rp.1,25-1,5 jt; 3) >1,5-1,750 jt; 4) > Rp.1,750 jt. Keempat Jumlah anggota keluarga sakit kronis/cacat dalam KK: 1) >3 orang; 2) 2 orang; 3) 1

orang; 4) tidak ada. Kelima, Nilai Aset yang dimiliki (Rp.): 1) tidak punya; 2) <Rp.1 jt; 3) Rp.1-1,5jt; 4) >5jt.

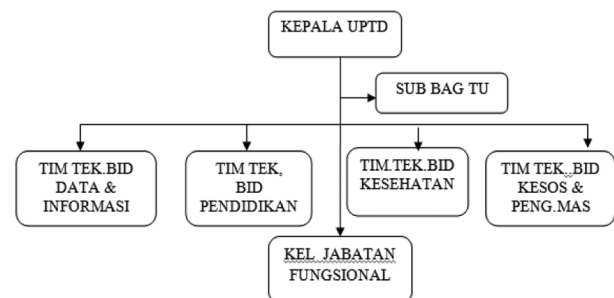
Indikator tersebut digunakan dalam menentukan atau menyeleksi penduduk miskin yang mendapat program layanan terpadu. Verifikasi dan validasi data dilakukan pada minggu ketiga bulan September hingga Desember 2014, untuk mendapatkan data sasaran program penanggulangan kemiskinan yang valid. Verifikasi dan validasi data dilakukan kepada masyarakat secara *face to face by name by address* dan *by foto* yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai *leading sector* TKPKD Kabupaten Berau. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan dana APBD senilai 1,1 milyar rupiah. Hasil verifikasi dan validasi data sebagai *database* dipakai SKPD, lembaga kesejahteraan sosial terkait dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan melalui SK Bupati Berau. Pada bulan Maret 2015 hasil verifikasi dan validasi masih diolah dibagian data. Hal itu sebagai bukti, bahwa SKPD terkait di Kabupaten Berau sangat mendukung keberadaan pelayanan terpadu UPTD-PTKS.

Keberadaan UPTD-PTKS yang mendapat legalitas pemerintah daerah berbentuk Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. Pembentukan organisasi dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan dapat diorganisasikan dan dikelola dengan melibatkan berbagai SKPD dan lembaga terkait dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebut sejalan yang dikemukakan OMMSA (2007), bahwa makna terpadu dalam pelayanan menunjukkan pada pelayanan yang dikoordinasikan dan dikelola dengan melibatkan jaringan dan hubungan yang terintegrasi, baik dalam pembiayaan maupun membuat keputusan, kebijakan pemberian jenis pelayanan, sehingga tujuan pelayanan dapat tercapai dan berkontribusi positif pada perubahan penerima pelayanan. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD-

PTKS pada Dinas Sosial Kabupaten Berau terkait dengan kebijakan penempatan petugas pelayanan kesejahteraan sosial yang duduk di UPTD-PTKS. Struktur organisasi UPTD-PTKS dapat dilihat pada bagan 1 berikut.

Bagan 1.

Struktur Organisasi UPTD Kesejahteraan Sosial



UPTD-PTKS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Kepala UPTD-PTKS adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Sosial setingkat eselon IV a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b. Struktur organisasi UPTD-PTKS setingkat eselon IV terdiri dari Kepala yang mempunyai tugas: 1) Membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan administrasi; 2) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi; 3) Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; 4) Melaksanakan tugas- lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Kasubag. Tata Usaha mempunyai tugas: 1) Membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan administrasi; 2) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi; 3) Membuat dan menyampaikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Tim Teknis mempunyai tugas 1) Melaksanakan urusan pelayanan administrasi secara terpadu kesejahteraan sosial; 2) Melaksanakan pengkajian dan pelayanan teknis secara

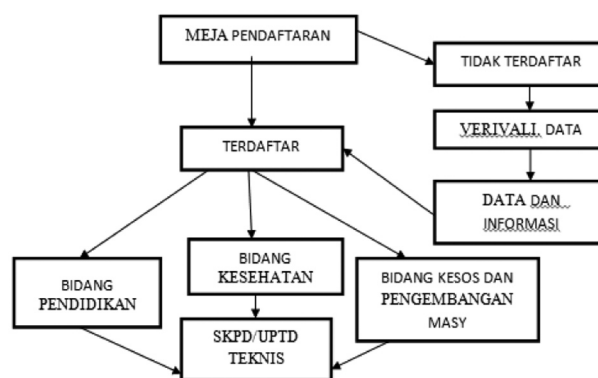
terpadu kesejahteraan sosial; 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan terpadu kesejahteraan sosial. Pelaksanaan tugas Tim Teknis dibantu oleh Staf Pelaksana yang berasal dari beberapa SKPD terkait dan dikelompokkan dalam beberapa bidang yang terdiri dari: 1) Tim Teknis Bidang Data dan Informasi; 2) Tim Teknis Bidang Kesehatan; 3) Tim Teknis Bidang Pendidikan; 4) Tim Teknis Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat. Sumber daya manusia pengelola UPTD-PTKS terdiri dari dua orang dari dinas sosial sebagai kepala dan kasubag tata usaha dibantu dua orang sakti peksos (satuan bakti pekerja sosial), yang selalu siap melayani masyarakat yang minta rujukan ke UPTD-PTKS. Ada dua orang dari dinas pendidikan dan dua orang dari dinas kesehatan bertugas secara bergiliran di UPTD-PTKS

Visi, Misi Pelayanan Terpadu UPTD-PTKS sampai saat ini masih menggunakan visi, misi Dinas Sosial Kabupaten Berau. Visi yang dimaksud adalah pelayanan prima masyarakat sejahtera. Visi tersebut dituangkan dalam misi: a) Meningkatkan kualitas sumber daya dinas sosial termasuk UPTD-PTKS Kabupaten Berau; b) Mewujudkan kesejahteraan sosial serta memberikan perhatian dan pembinaan dengan semangat rasa kesetiakawanan sosial; c) Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibidang kesejahteraan sosial; d) Membangun kerja sama dengan kelembagaan sosial lain yang berbasis kesejahteraan sosial. UPTD-PTKS telah mengakomodir program-program layanan SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Thomson , *"It is argued that no-one in a civilized society should be in a position where they cannot afford the basic necessities of life"*. Uraian tersebut menyebutkan, bahwa masyarakat yang beradab tidak boleh ada seorangpun yang yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Suharto, 2009).

Model pelayanan terpadu Jaring Laba-Laba (*Spider Web*) Satu Atap (*One Stop Office*

Multi Desk-Multi Functions) dipilih di lokasi Kabupaten Berau. Asumsi yang mendasari model hipotetik ini adalah bahwa pelayanan harus mudah terjangkau, cepat, dan tuntas. Penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan harus segera diberikan dengan cepat dan tuntas, maka pelayanan harus dilakukan dalam satu atap dengan melibatkan banyak meja dan banyak fungsi sesuai dengan yang diperlukan sasaran layanan. Mekanisme pelayanan UPTD-PTKS Kabupaten Berau tersaji pada bagan 2 berikut.

Bagan 2. Alur Pelayanan



Warga masyarakat yang terdaftar dalam *database* penduduk miskin (data PPLS 2011) mendapat pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat usaha ekonomi produktif) secara gratis melalui rujukan kepada SKPD/UPTD terkait sesuai kebutuhan kelayan. Apabila masyarakat kurang mampu atau warga miskin tidak terdaftar dalam *database* penduduk miskin, namun sedang dalam proses verifikasi dan validasi pada sistem pengaduan masyarakat dicantumkan pada data dan informasi, selanjutnya didaftar dimasukkan dalam *database* penduduk miskin dan berhak mendapat pelayanan yang dibutuhkan. Apabila ada warga miskin yang tidak terdaftar dalam data PPLS 2011 dan tidak termasuk dalam proses verifikasi dan validasi (*verivali*), melalui permohonan kepada bupati dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Berau bahwa warga yang bersangkutan memang benar sebagai warga miskin.

Mekanisme kerja pelayanan terpadu UPTD-PTKS hingga dilakukan penelitian masih dalam proses pembahasan penyusunan standar operasional pelayanan (SOP). Penyusunan SOP diawali dengan pertemuan pembahasan antar SKPD yang tergabung dalam pelayanan terpadu. SKPD dimaksud adalah aparat setingkat eselon II dan III pada SKPD terkait, antara lain : Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Abdul Rivai, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Telekomunikasi dan Informasi, serta Baznas Kabupaten Berau. SKPD yang tergabung dalam pelayanan terpadu berkomitmen untuk segera menyelesaikan SOP UPTD-PTKS Kabupaten Berau, meskipun masih dalam proses pembahasan.

Gedung UPTD-PTKS adalah milik Kantor Dinas Sosial, terdiri dari beberapa loket yakni: loket pendaftaran, ruang tunggu, loket data dan informasi, loket pelayanan teknis, namun belum ada ruang kepala dan ruang subbagian tata usaha. Aplikasi berupa *software* data dan informasi dan jaringan internet secara *online* yang terpadu antar SKPD terkait dengan UPTD-PTKS. Program penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD belum tergabung secara *online* di UPTD-PTKS belum tersedia. Sarana penunjang berupa kendaraan operasional sebagai sarana sosialisasi pelayanan terpadu belum tersedia. Sarana pendukung untuk kegiatan pelayanan terpadu berupa komputer, lemari dosir, meja, kursi, bagan struktur organisasi, alur pelayanan, dan informasi data PMKS berdasar data BPS dan PPLS 2011. Penentuan penggunaan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana sudah diatur oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Biaya operasional UPTD-PTKS bersumber dari APBD Kabupaten Berau. Pada saat penelitian dilakukan tahun 2015, PLT Kepala UPTD-PTKS dijabat oleh Staf Pelaksana Bidang Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. Subbagian Tata Usaha, Tim

Teknis belum terisi. Pada kelompok jabatan fungsional terdapat dua satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) Pandu Gempita dan perlindungan anak.

Pelayanan diberikan berdasarkan data PPLS 2011 (*by name by address*) 1600 KK (6.266 jiwa). Sejak berdiri, UPTD-PTKS telah melayani sebanyak 263 kelayan yang direkomendasikan ke Dinas Pendidikan berkaitan dengan permintaan beasiswa. Permohonan keringanan atau gratis biaya berobat, Jamkesda, dan asuransi BPJS dirujuk ke Dinas Kesehatan sebanyak 2594 kelayan. Permohonan bantuan sosial dan pengembangan masyarakat dirujuk ke Dinas Sosial sebanyak 41 kelayan dalam bentuk bantuan stimulan modal usaha. Pelayanan yang diberikan masih sebatas rujukan dan rekomendasi belum ada pelayanan terpadu yang langsung diselesaikan di UPTD-PTKS. Pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan secara eksplisit melalui kegiatan UPTD-PTKS. Pelaksanaan sosialisasi secara implisit dipadukan dengan program bimbingan penyuluhan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Berau. UPTD-PTKS selain mendapat dukungan dari instansi pemerintah juga mendapat dukungan dari dunia usaha seperti PT. Berau Coal yang berusaha di bidang tambang batubara, perkebunan kelapa sawit dan dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Berau. Bentuk dukungan yang dilakukan PT. Berau Coal adalah menyediakan dana untuk program-program bantuan sosial seperti: pengobatan gratis, khitanan massal, operasi bibir sumbing, penambahan gizi, bantuan peralatan sekolah bagi siswa SD, SMP, SMA. PT. Berau Coal menyelenggarakan program bantuan beasiswa bagi siswa SMA dan mahasiswa perguruan tinggi berprestasi. Bantuan sarana transportasi berupa fasilitas angkutan bus dari tempat tinggal ke sekolah bagi anak disekitar perusahaan. Perusahaan memberi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di sekitar perusahaan yang berada di ring satu. PT Berau Coal juga membantu kegiatan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kerukunan adat budaya daerah, suku etnis lokal

dan budaya luar yang mendukung penanganan kemiskinan. Kegiatan tersebut guna menumbuhkan kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.

Bentuk dukungan dari Baznas adalah penyelenggaraan program bantuan sosial seperti Program Berau Makmur: membentuk sentra ternak, sentra tani, bantuan modal usaha. Program Berau Cerdas: Rumah Cerdas Anak Bangsa (membangun rumah pintar, bantuan biaya sekolah). Program Berau Sehat, seperti: menyelenggarakan khitanan massal, pengobatan massal, bantuan biaya berobat, bantuan operasi. Program Berau Taqwa, seperti: bantuan pembangunan masjid, bantuan TPA, Pengadaan Al Quran dan Iqra, Kaderisasi Dai Mandiri, bantuan Muallaf, dan bantuan pondok pesantren. Bantuan Berau Taqwa dimaksudkan membentuk mental taqwa dan kepedulian sosial terhadap fakir miskin.

Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Berau komitmen terhadap eksistensi Pandu Gempita atas dasar kemauan politik peduli terhadap rakyat miskin dengan segala permasalahannya. Komitmen Bupati sebagai pimpinan daerah dan penentu kebijakan wilayah menjadi modal dasar untuk diikuti seluruh jajaran aparat di bawahnya dan SKPD terkait dalam penanggulangan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial terutama kemiskinan. Wujud komitmen pimpinan daerah adalah ketersediaan anggaran yang cukup besar dalam penyelenggaraan Pandu Gempita dari APBD. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti: gedung, peralatan komputer, meja dan kursi cukup memadai sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan terpadu. SKPD di Kabupaten Berau bersedia menempatkan petugas pengelola pelayanan yang kompeten serta koordinasi dalam bidang sasaran, program kegiatan, dan wilayah sasaran. Kesepakatan daerah menunjukkan, bahwa beberapa jenis program penanggulangan kemiskinan yang ada di beberapa SKPD (Dinas) akan menjadi *entry point* awal penyelenggaraan Pandu Gempita (UPTD-PTKS). Dukungan dari Dinas Sosial Provinsi

dalam bentuk penghargaan kepada kabupaten yang melaksanakan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial terbaik berupa sharing anggaran.

UPTD-PTKS perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan menginformasikan keberadaan Pandu Gempita agar memperoleh dukungan dari masyarakat dan pihak terkait. Kegiatan sosialisasi Pelayanan Terpadu Pandu Gempita UPTD-PTKS belum dilaksanakan karena petugas pelaksana dan pengelola belum ada secara difinitif. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial yang diselenggarakan dinas sosial dari anggaran APBN. Kondisi tersebut menyebabkan masih sedikit masyarakat bahkan ada beberapa SKPD yang belum mengetahui keberadaan Pandu Gempita UPTD-PTKS. TKSK, PSM, Karang Taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta ujung tombak pembangunan kesejahteraan sosial dilibatkan dalam pemasyarakatan keberadaan UPTD-PTKS agar diketahui sampai ke tingkat paling bawah (akar rumput). Keberadaan UPTD-PTKS dengan demikian dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan mendapat penanganan secara tuntas (menyeluruh dan terpadu).

Penyelenggaraan Pandu Gempita UPTD-PTKS di Kabupaten Berau mengalami berbagai hambatan. Pertama, belum ada aturan turunan Peraturan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD-PTKS pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. Hal itu berdampak belum ada payung hukum dan kebijakan penempatan pengelola serta petugas pelayanan kesejahteraan sosial yang duduk di UPTD-PTKS. Pada saat refleksi awal masih dalam proses pengusulan pengelola UPTD-PTKS menunggu rekomendasi BKPP. Mutasi pejabat dan aparat SKPD prevalensinya masih tinggi, belum tersedia tenaga profesional, tim teknis tenaga aplikasi data dan informasi, serta tenaga fungsional sesuai bidang kompetensi pelayanan yang memiliki profesi pekerjaan sosial.

Kedua, payung hukum berkait dengan pembuatan *database* yang dapat mengintegrasikan indikator atau kepentingan dari masing-masing SKPD belum tersedia, sehingga belum tersedia *database* sesuai indikator lokal. Berkait hal tersebut, maka segera dilakukan verifikasi dan validasi data menggunakan indikator lokal *by name, by addres, dan by foto* yang mengakomodir kepentingan SKPD terkait. Belum ada aplikasi berupa *software* data informasi dan jaringan internet secara *online* yang terpadu antara SKPD dengan UPTD-PTKS sehingga data dan sasaran program belum tergabung dalam UPTD-PTKS. Sebaliknya UPTD-PTKS belum dapat melakukan penyaluran pelayanan kepada SKPD sesuai kebutuhan kelayan.

Ketiga, belum terlaksananya sosialisasi secara optimal baik ke masyarakat maupun ke SKPD Kabupaten Berau dari tingkat kabupaten hingga tingkat paling bawah (RT). Keempat, SOP dan tugas pokok fungsi UPTD-PTKS belum tersedia sehingga belum dapat melakukan pelayanan secara cepat dan terpadu sesuai kebutuhan kelayan. Kelima, belum ada ruang kepala, ruang TU dan ruang pertemuan, ruang konsultasi sebagai sarana kegiatan serta jaringan internet untuk kelancaran operasional kegiatan pelayanan. Sarana transportasi untuk operasional kegiatan juga belum tersedia.

D. Penutup

Kesimpulan: Eksistensi Unit Pelayanan Teknis Daerah-Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial (UPTD-PTKS) telah mendapat dukungan dari pimpinan daerah (Bupati Berau), SKPD terkait, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau dan dunia usaha dalam penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial terutama permasalahan kemiskinan. Bentuk dukungan berupa sarana gedung kantor UPTD-PTKS, komputer, lemari arsip, meja kursi dan anggaran dana operasional dari APBD termasuk anggaran kegiatan verifikasi dan validasi data yang akan dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2014. Model layanan terpadu UPTD-

PTKS adalah model layanan satu atap banyak loket banyak fungsi (*One Stop Office Multi Desk-Multi Functions*), dalam arti masing-masing SKPD bekerja bersama memberikan layanan dalam satu atap di UPTD-PTKS sehingga kelayan berhubungan dan dilayani langsung oleh wakil SKPD pada masing-masing loket.

Keberadaan UPTD-PTKS telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial (asistensi sosial lanjut usia terlantar) walaupun belum optimal. Pelayanan yang diberikan masih sebatas rujukan dan rekomendasi ke SKPD terkait, belum dilakukan secara langsung oleh UPTD-PTKS karena belum ada SOP dan belum ada penugasan tenaga serta personil dari SKPD terkait untuk menduduki jabatan di UPTD-PTKS. Tenaga yang ada PLT Kepala UPTD-PTKS dari staf pelaksana Bidang Bantuan Sosial pada Dinas Sosial dan dua tenaga satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos). Tenaga aplikasi data dan informasi serta *database* terpadu belum ada sehingga dalam pemberian pelayanan berdasarkan data PPLS 2011 perlu diverifikasi dan divalidasi ulang. Belum ada *database* terpadu berakibat PMKS (sasaran program) dan program-program SKPD terkait dalam penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial terutama permasalahan kemiskinan belum tergabung secara online dengan UPTD-PTKS. UPTD-PTKS tidak bisa secara *online* melakukan penyaluran ke SKPD terkait sesuai kebutuhan kelayan sehingga kelayan tidak secara langsung mendapat pelayanan yang dibutuhkan.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terpadu yang dilakukan UPTD-PTKS Kabupaten Berau dapat berjalan dan berfungsi dengan baik namun belum optimal. Oleh karena itu perlu peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), sarana-prasarana, dukungan dana, koneksi internet, keterpaduan data dan program secara *online* sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mendapat respon semua

lapisan masyarakat serta dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Rekomendasi: Berkait dengan implementasi penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka direkomendasikan kepada:

1. Pemerintah Daerah

Bupati sebagai kepala daerah memerintahkan kepada SKPD terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk pengembangan UPTD-PTKS. Memperhatikan kompetensi dan kualifikasi SDM dalam mutasi pegawai di lingkungan pemerintahan termasuk UPTD-PTKS. Penegasan keterlibatan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha guna mendorong eksistensi UPTD-PTKS berfungsi secara optimal. Penerbitan aturan turunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD-PTKS yaitu payung hukum tentang penempatan personil pengelola pelayanan kesejahteraan sosial yang duduk di UPTD-PTKS. Penambahan ruang kepala, ruang tata usaha, ruang konsultasi dan ruang pertemuan dan sarana transportasi operasional kegiatan. Perlu segera menyusun SOP layanan terpadu. Perlu segera menyusun *database* dan payung hukum sesuai indikator kemiskinan lokal yang dapat mengakomodir kepentingan SKPD terkait. Perlu aplikasi berupa *software* data informasi dan jaringan internet secara *online* yang terpadu antara SKPD terkait dengan UPTD-PTKS. Peningkatan frekuensi sosialisasi keberadaan UPTD-PTKS di Kabupaten Berau baik secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik (TV, Radio).

2. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial selaku Tim Koordinasi terkait kebijakan dan Tim Teknis terkait operasional kegiatan menyusun Pedoman Umum dan Panduan Teknis serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pelayanan UPTD-PTKS Kabupaten Berau melalui dana APBN. Berkait

hal tersebut maka Sekretaris Jenderal cq Biro Perencana selaku Tim Pelaksana dan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Sosial agar terwujud kesamaan pemahaman tentang Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Tujuan sosialisasi dan koordinasi dimaksudkan agar terjadi sinergitas program kegiatan dari masing-masing direktorat jenderal yang akan dilaksanakan oleh Pandu Gempita di Kabupaten Berau. Sosialisasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui kegiatan *workshop*, lokakarya baik di lingkungan Kementerian Sosial maupun dengan kementerian/lembaga terkait yang memiliki program penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial dan terutama penanggulangan kemiskinan. Tujuan sosialisasi dan koordinasi Pandu Gempita kepada kementerian/lembaga terkait dimaksud agar terwujud kesepahaman bahwa pelayanan sosial yang dilakukan secara terpadu dan berbasis kepada kepentingan penerima layanan yang akan membawa hasil lebih optimal.

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial selaku Tim Teknis Pandu Gempita berkewajiban melakukan asistensi dan pendampingan terkait regulasi penerbitan aturan turunan Peraturan Bupati Berau tentang peningkatan status UPTPK dan keberlanjutan kelembagaan. Dalam konteks ini Puslitbangkesos bekerjasama dengan Biro Hukum dan Bidang OHH Kementerian Sosial, Kemenkumham dan Kabupaten Berau. Pusdatin, bekerjasama dengan Kemenkominfo, BPS, TNP2K/TKPK dan kalangan pakar teknologi informasi bertanggungjawab terhadap sistem informasi manajemen dalam rangka sinkronisasi data yang akan digunakan sebagai *database* pelayanan terpadu. Pusdiklat Kessos, B2P2KS sesuai wilayah kerja, STKS, Puslitbangkesos, B2P3KS,

Pusdatin, dan Pusbinjabfung bertanggungjawab dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pelayanan terpadu. Pendampingan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera dilakukan oleh B2P2KS sesuai wilayah kerja. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) Kalimantan Timur melakukan pendampingan UPTD-KS Kabupaten Berau. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial selaku Tim Koordinasi Pandu Gempita Pusat segera melakukan revisi Pedoman Umum dan Panduan Teknis Pandu Gempita tentang struktur organisasi dan mekanisme kerja. Kedudukan Unit Pelaksana Pandu Gempita berada di Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Seiring era otonomi daerah maka Unit Pelaksana Pandu Gempita tidak berkedudukan di dinas sosial melainkan sebagai lembaga baru non struktural di bawah dan bertanggung jawab pada bupati/walikota melalui Tim Koordinasi yang kemungkinan di masa mendatang dapat dikembangkan sebagai lembaga struktural. Dalam konteks ini, UPTD-PTKS Kabupaten Berau berkantor di luar dinas sosial, bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi Pandu Gempita Kabupaten Berau dan Tim Koordinasi Kabupaten Berau bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi Pandu Gempita Provinsi dan Tim Koordinasi Pandu Gempita Provinsi bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi Pandu Gempita Pusat. Ketua Tim Koordinasi Pandu Gempita Kabupaten Berau adalah Ketua Bappeda dan atau Sekretaris Daerah sedangkan sekretaris Tim Koordinasi dari Dinas Sosial sebagai *leading sector* dalam program penanggulangan kemiskinan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penulisan ini. Pertama, Aparat Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

Baznas, PT Berau Coal di Kabupaten Berau. Semua informan yang telah bersedia memberi data dan informasi hingga penulisan KTI ini selesai. Kedua, editor dan mitra bestari yang telah membimbing penulisan KTI. Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak ibu sekalian.

Pustaka Acuan

- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Suharto, dkk. (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial. Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia*, Bandung: STKS Press.
- (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Heru Nugroho. (2000). *Negara, Pasar Dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- IPSPI. (2004). *Profil Organisasi Profesi*. Bandung: Sekretariat IPSPI.
- Komir Bastaman (2000). *Pemberdayaan*. Bandung: BDPTS, Makalah Tidak diterbitkan.
- Khan, A.J. (1979). *Social Policy and Social Services*. New York: Random House.
- Khoirudin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- OMMSA. (2007). *Guide to Thinking About Human Services Integration: Making Greater Difference for People and Communities. A Joint Project of the Ontario Municipal Social Services Association and the Service Manager Housing Network*. www.omssa.com accessed 17/11/2016.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437)
- (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor. 4967).
- (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*
- Siporin. M. (1975). *Introduction to Social Work Practise*. New York: Mac Millan Publishing Co, Inc.

Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Peduli Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Tjahya Supriyatna. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: PT Humaniora Utama Press.

**Menggapai Hidup Sejahtera:
Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Pedesaan**
***Striving for Life Welfare:
Poor Farmers off farm activity in Rural Areas***

Sunit Agus Tri Cahyono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta Telpn (0274) 377265.

Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial

HP +6201215173663. E-mail: sunit_atc62@yahoo.com

Diterima 24 Juli 2017, diperbaiki 19 September 2017, disetujui 25 Oktober 2017

Abstract

Viewed from the socio-economic aspect, rural farmer communities are less prosperous than other communities. This fact is concluded based on the results of the research on some farmers in Sendang Mulyo Village, Minggir Subdistrict, Sleman Regency. As an effort to overcome the difficulties of life and to improve social welfare, they make an alternative off farm job. The research on Striving for Life Welfare research, Poor Farmers Off farm activity in Rural Areas is aimed to identify the reasons of farmers in choosing off farm work, and to describe off farm work contributions to family welfare. Data collection drawn from informants was carried out purposively to 30 farmers who have off farm work. The data is analyzed in qualitative descriptive technique. The results of the research show that off-farm job selection is largely not only because of the high burden of family economy that is not proportional to the level of family income, but it has also created economic and psychological pressure. Off farm work is able to contribute to the social welfare of poor farmer families with an indication of the ability to improve the capability to meet the needs of family life. It is recommended to the Ministry of Social and local district government to empower the potential by creating employment opportunity strategies for poor farmers by considering the ability of poor farmers' families, the community needs, and that of potential of social welfare resources systems that can be developed into productive economic enterprises in rural areas.

Keywords: *welfare; off farm; poor farmers; rural areas.*

Abstrak

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, komunitas petani di pedesaan dalam kondisi kurang sejahtera dibanding dengan komunitas masyarakat lain. Fakta ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian terhadap sebagian petani di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Sebagai upaya mengatasi kesulitan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial, mereka membuka pekerjaan alternatif *off farm*. Penelitian Menggapai Hidup Sejahtera, Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Pedesaan bertujuan mengidentifikasi alasan petani memilih pekerjaan *off farm*, dan mendeskripsikan sumbangan pekerjaan *off farm* terhadap kesejahteraan keluarga. Pengumpulan data terhadap informan dilakukan secara purposif terhadap 30 petani yang memiliki pekerjaan *off farm*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemilihan pekerjaan *off farm* sebagian besar tidak hanya dilatarbelakangi oleh tingginya beban ekonomi keluarga yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan keluarga, tetapi juga telah menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis. Pekerjaan *off farm* mampu memberi kontribusi terhadap kesejahteraan sosial keluarga petani miskin dengan indikasi adanya kemampuan perbaikan kemampuan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, perlunya pemberdayaan melalui strategi penciptaan peluang lapangan kerja kepada petani miskin dengan mempertimbangkan kemampuan keluarga petani miskin, kebutuhan masyarakat, dan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif di pedesaan.

Kata kunci: *sejahtera; off farm; petani miskin; pedesaan.*

A. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga bulan September 2016 tercatat sebanyak 27,76 juta jiwa atau 10,70 persen dari seluruh jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta jiwa (10,86 persen), maka berkurang sebanyak 0,25 juta jiwa (BPS, 2016. <http://setkab.go.id> <http://setkab.go.id>). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Dibalik fenomena penurunan secara kuantitas, ditemukan adanya jumlah petani miskin terus meningkat yang ditandai oleh naiknya indeks kedalaman kemiskinan petani di perdesaan. BPS mengungkapkan, indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,84 pada September 2015 menjadi 1,94 pada Maret 2016. Hal ini berarti orang (petani) miskin makin jatuh pada jurang kemiskinan (BPS, <http://villagerspost.com>).

Kemiskinan pada hakekatnya menggambarkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan adalah terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat dimaknai sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial (modal produktif, perumahan, alat produksi, kesehatan, sumber keuangan) (Sri Yuni Murti Widayanti, dkk, 2015). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. *Friedman* (1992) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan

dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna (Friedmann, John, 1992). Beberapa karakteristik kemiskinan ditandai oleh lemahnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar; mempunyai akses terbatas pada kegiatan sosial ekonomi; keterbatasan dalam bidang politik (Istiana Hermawati, dkk. 2005). Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang melibatkan faktor ekonomi, politik, dan budaya (Heru Nugroho, 2000). Dari segi sosial, kemiskinan penduduk dapat juga disebutkan sebagai suatu kondisi sosial yang sangat rendah, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang tidak mencukupi dan penerangan yang minim (Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers, 1985).

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu 1) Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kemiskinan. 2). Faktor sosial, sejumlah kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin misalnya diskriminasi berdasar usia, jender, dan etnis, yang menyebabkan seseorang dapat menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. 3). Faktor kultural diantaranya kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas (Suharto, 2009). Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, penguasaan *skill*, etos kerja, dan ketersediaan sumber daya alam di desa yang bersangkutan, atau sebaliknya persoalannya bersumber dari belum optimalnya pendayagunaan sumber alam yang ada (Soetomo, 2006).

Suatu keluarga dikatakan miskin apabila: Pertama, dikatakan sangat miskin, dengan tolok ukur kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan keluarga hanya mencapai 1.900 kalori per orang per hari ditambah kebutuhan dasar non makanan, atau *equel* Rp. 120.000,- per orang per bulan. Kedua, Keluarga dikatakan miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1.900 sampai 2.100 kalori per orang perhari, ditambah kebutuhan dasar non makanan. Atau setara antara Rp. 150.000 per orang per bulan. Ketiga, Keluarga dikatakan miskin mendekati miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2.100 sampai 2.300 kalori per orang perhari, ditambah kebutuhan dasar non makanan. Atau setara antara Rp. 175.000 per orang per bulan (Randi dan Ryant Nugroho, 2006: 156). Dalam perspektif akses dan peluang kerja di perdesaan, kemiskinan dapat diidentifikasi menjadi lima, yaitu: (a) aset alam (kurangnya tanah pertanian dan lahan olahan), (b) aset dasar kehidupan (kesehatan, keterampilan dan pengetahuan), (c) aset fisik (modal, sarana produksi, dan infrastruktur), (d) aset keuangan (lemahnya posisi petani dalam mengakses kredit dan pinjaman lain), (e) aset sosial seperti jaminan sosial dan hak-hak politik (CIDES.www.google.go.id,). Ketiadaan atau kelemahan dari satu atau lebih aset tersebut merupakan penyebab seseorang terjebak ke dalam lembah kemiskinan.

Peluang kerja sektor pertanian di perdesaan semakin berkurang dengan cepat sehingga kegiatan pertanian yang melibatkan penduduk miskin berkurang. Hal tersebut mengurangi satu-satunya akses penduduk miskin terhadap ketersediaan pendapatan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, mereka berusaha mencari pekerjaan di luar sektor pertanian (*off farm*). Kecilnya usaha tani menyebabkan petani berupaya menambah pendapatan dari kegiatan di luar usaha tani melalui diversifikasi, sehingga peran *off farm employment* dan *off farm income* makin besar di desa yang semakin padat penduduk. Dengan

demikian petani tidak hanya terlibat dalam usaha produksi primer sebagai penghasil bahan baku. Usaha produksi alternatif dalam rumah tangga dan aktivitas pertanian juga merupakan peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan, bukan hanya dari tambahan pendapatan yang dapat mencukupi konsumsi melainkan juga meningkatkan taraf kesejahteraan petani untuk membiayai usaha taninya dan akses terhadap informasi menjadi lebih luas.

Konsep pekerjaan alternatif *Off farm* merujuk pada kegiatan di luar pertanian atau jenis pekerjaan (*occupations*) di luar pertanian yang dilakukan oleh anggota keluarga perdesaan. *Off farm* mengacu pada pekerjaan yang sifatnya bukan pertanian baik milik sendiri maupun milik orang lain. Ini berarti mirip dengan pekerjaan di luar sektor pertanian. Menurut lokasinya, *off farm activities* dapat dipertimbangkan sebagai pekerjaan alternatif yang dilakukan di luar pertanian tetapi masih dilakukan di lingkungan perdesaan atau sekitar kota kecil /kecamatan (Tajuddin Noer Effendi, 1985). Pekerjaan yang mungkin dilakukan di rumah tangga seperti kerajinan tangan, kerajinan bambu, kerajinan kayu, atau berdagang yang dikerjakan oleh petani dan wanita tani dapat dimasukkan dalam kategori *off farm*. Hal ini sesuai dengan salah satu hakikat kesejahteraan yang menyatakan, bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan termasuk menciptakan lapangan kerja alternatif seperti *off farm* menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial (Isbandi Rukminto Adi, 2002).

Dalam berbagai literatur, ada empat konsep pokok mengenai *off farm*. Pertama, definisi luar mencakup semua aktivitas non pertanian. Pekerjaan *off farm* mengacu pada aktivitas atau pekerjaan non farm yang dilakukan setiap anggota pekerja keluarga perdesaan. Karena acuan-nya adalah pada jenis pekerjaan, bukan pertanian (memiliki lahan, atau lahan milik orang lain). Maka pengertian menjadi searti dengan *non farm* di rumah (*on farm*) harus diikuti sertakan (misalnya pekerjaan kerajinan kaum wanita).

Kedua, definisi yang meliputi semua kegiatan perkebunan atau ladang, baik pertanian maupun non pertanian, tetapi di luar atau bukan keluarga pertanian. Pekerjaan atau penghasilan *off farm* (yang bukan dari *on farm*) secara luas dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang dikerjakan atau semua penghasilan yang diperoleh di luar perkebunan atau ladang milik sendiri, termasuk pekerjaan perkebunan atau ladang tetangga dan pekerjaan ladang yang menanam hasil bumi (Os-hima, 1983: 3). Ketiga, penetapan pekerjaan *off farm* yang terbatas pada kegiatan non pertanian, baik bersifat *on farm* pada perkebunan milik sendiri ataupun di luar perkebunan keluarga. Keempat, definisi sempit, yang tidak mencakup pekerjaan pertanian maupun kegiatan non pertanian di perkebunan itu sendiri. Jenis pekerjaan ini terbatas pada *non farm*, yaitu pekerjaan non pertanian.

Suatu keluarga dikategorikan sejahtera apabila dalam kehidupannya kebutuhan ekonomi, sosial, psikologis seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, aktualisasi diri, dan kemasyarakatan dapat tercukupi secara layak dan akses terhadap beragam fasilitas pembangunan. Dapat dikatakan, bahwa kesejahteraan sosial tidak saja melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial-budaya, politik (struktural) dan psikologis. Kesejahteraan sosial dalam aspek ekonomi (*material well being*) dapat diidentifikasi dengan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang, keluarga atau masyarakat yang sifatnya material seperti pangan, sandang, papan (perumahan), dan kesehatan.

Tidak tercukupinya kebutuhan dasar sosial dan budaya akan melahirkan apa yang dinamakan kemiskinan sosial budaya. Untuk memahami kemiskinan ini tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya yang lebih kualitatif. Indikator kemiskinan ini dapat diidentifikasi melalui terlembaganya budaya pada sekelompok orang atau masyarakat yang apatis, fatalistik, dan etos kerja yang rendah. Sebaliknya yang tidak sejahtera secara struktural atau politik diidentifikasi dengan kemiskinan struktural atau politik.

Keluarga atau sekelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya juga mengalami kemiskinan struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana dan akses untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Orang atau keluarga yang miskin secara struktural dapat berakibat miskin di bidang ekonomi (Heru Nugroho, 2000).

Salah satu strategi keluarga petani miskin untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan menggapai hidup sejahtera adalah dengan cara mencari pekerjaan alternatif *off farm* di luar sektor pertanian di perdesaan. Pekerjaan ini dianggap mampu memicu tumbuhnya kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Pekerjaan alternatif ini juga sebagai salah satu strategi petani miskin melakukan mobilitas sosial, atau setidaknya untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi keluarga. Peranan pekerjaan alternatif *off farm* bagi kesejahteraan petani miskin dapat dilihat dari segi waktu (hari kerja per bulan dan jam kerja per hari), persentase jam kerja rumah tangga yang dicurahkan untuk kegiatan alternatif dan segi pendapatan (*income*).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jumlah penduduk tersebar di perkotaan sebesar 60,15 persen atau sebanyak 297,71 ribu jiwa. Jumlah tersebut berkurang sekitar 31,94 ribu orang dibanding bulan Maret 2015 yang mencapai 329,65 ribu orang. Kemiskinan di desa mencapai 197,23 ribu orang atau sebanyak 39,85 persen. Jumlah kemiskinan di desa turun 23,34 ribu dibanding bulan Maret 2015 (Erfanta Linangkung, 2016. <https://ekbis.sindonews.com>). Sebagian besar penduduk miskin di perdesaan disandang oleh petani. Di Kabupaten Sleman, jumlah penduduk masih tergolong keluarga miskin sebanyak 50.603 KK atau 15,92 persen dari 312.089 KK yang ada atau 1.126.888 jiwa. Berdasarkan data terakhir pemerintah Kabupaten Sleman, pada tahun 2013 terdapat sebesar 13,89 persen penduduk tercatat sebagai keluarga miskin. Atau dari 312.089 Kepala Keluarga, terdapat

45.037 KK sebagai keluarga kurang mampu (Sindonewscom, 18 Januari 2015).

Mengapa petani miskin atau hidup tidak sejahtera?. Meningkatnya petani miskin pada hakikatnya dapat dipandang sebagai kemerosotan kesejahteraan sosial secara umum. Dengan merosotnya kondisi kesejahteraan (sosial ekonomi) maka berdampak pada merosotnya kualitas penduduk secara menyeluruh baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Demikian juga yang berkait dengan kualitas fisik dan non fisik seperti menurunnya tingkat kecerdasan dan kesehatan masyarakat miskin karena kekurangan gizi akibat tidak mampu mengkonsumsi kebutuhan dasar secara layak. Penyebab utama kemiskinan petani adalah karena kepemilikan lahan yang relatif sempit, atau biasa disebut sebagai petani gurem.

Data BPS menunjukkan, rumah tangga petani gurem tahun 2013 sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sebesar 55,33 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan. Rata-rata mereka memiliki lahan di bawah 0,25 ha. Penyebab lain adalah mayoritas pendidikan para petani masih didominasi Sekolah Dasar (SD) dan tidak memiliki akses modal. Hal itu mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari hasil taninya. Kalau tidak ada pinjaman dari perbankan, akhirnya mereka meminjam ke tengkulak. Sementara biasanya tengkulak apabila membeli dari petani dengan sistem ijon. Kondisi ini yang membuat petani tidak sejahtera (Kridanto Priyo. <http://www.agronomers.com>. 13 Agustus 2014.). Diperparah adanya gejala hubungan *patron client* antara petani kaya dengan petani miskin dan buruh tani mulai melonggar, menjadikan petani (miskin dan buruh petani) semakin terpinggirkan.

Kondisi tersebut di atas dialami oleh masyarakat perdesaan, khususnya bagi petani dan buruh petani di desa Sendang Mulyo, Sleman dimana sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan keluarga. Hal tersebut telah memperkecil peluang kesempatan kerja petani,

terutama buruh tani dan petani miskin untuk terus melibatkan diri dalam bidang pertanian (*on farm*). Kalaupun ada frekuensi bekerja atau berburuh menjadi sedikit. Kondisi ini diperparah dengan adanya tekanan (pertambahan) penduduk terhadap tanah pertanian diikuti dengan terbatasnya kesempatan kerja, yang pada akhirnya terjadi penurunan kesejahteraan ekonomi keluarga petani miskin. Penghasilan satu dollar atau setara Rp. 13.500,- per hari tidak lagi dapat menjangkau kebutuhan keluarga sehari-hari yang terus bertambah akibat melambungnya harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Dari kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga berpengaruh negatif terhadap berlangsungnya roda perekonomian dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat, bahwa pekerjaan di lahan pertanian semakin sempit dan sulit memperoleh peluang pekerjaan di sektor pertanian (*on farm*), maka bagi penduduk Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman yang berjumlah 7.153 jiwa, khususnya bagi petani miskin dan buruh tani mencoba berusaha keras menciptakan kesempatan kerja di luar bidang pertanian pada sektor informal dengan jalan mengembangkan *off-farm*, misalnya buruh industri, pelayanan (jasa) membuka warung makan kecil, warung sembako, berdagang kecil-kecilan, peternakan, perikanan keluarga, atau usaha kerajinan keluarga yang melibatkan atau menyerap anggota keluarga. Kegiatan *off-farm* ini pada umumnya dilakukan karena pekerjaan tersebut tidak banyak menuntut modal besar. Di samping itu, bagi sebagian besar petani miskin dan buruh petani, usaha *off-farm* ini telah menjadi pekerjaan sampingan dan sebagai bagian dari mencari nafkah tambahan demi memperbaiki kesejahteraan keluarga.

Implikasi dari permasalahan di atas paling tidak menimbulkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa mereka lebih memilih pekerjaan *off farm*? Bagaimana sumbangan pekerjaan *off farm* terhadap kesejahteraan

keluarga?. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi alasan petani memilih pekerjaan *off farm*. Menggambarkan sumbangan pekerjaan *off farm* terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi empirik Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial RI sebagai salah satu solusi pemecahan masalah kesejahteraan sosial keluarga di perdesaan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian Menggapai Hidup Sejahtera Kegiatan *Off farm* Petani Miskin di Perdesaan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Danzil(2011) penelitian kualitatif mempelajari sesuatu dalam *setting* alami, berupaya memahami dan menginterpretasikan fenomena berdasar makna yang melekat pada informan.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive* dengan memilih sampel secara sengaja sesuai persyaratan yang diperlukan, yaitu 30 petani miskin yang memiliki pekerjaan alternatif di lokasi penelitian. Dalam hal ini Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkait hal tersebut, Moleong (2004:86) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2004).

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan triangulasi yang dalam praktiknya digunakan untuk menjaga kebenaran dan objektivitas hasil penelitian dengan membandingkan dan mengecek data dan informasi yang diperoleh dari sumber data melalui alat pengumpulan data wawancara, observasi, telaah dokumen, dan data penunjang lain. Data dan informasi yang telah terkumpul dari berbagai informan di lokasi penelitian, dianalisis secara intensif dengan menggunakan

teknik analisis data deskriptif kualitatif. Langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2005), yaitu meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Kegiatan *Off Farm* Petani untuk Menca-pai Hidup Sejahtera

Deskripsi Lokasi Penelitian. Desa Sendang Mulyo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Terdiri dari 16 pedukuhan yaitu Prapak Kulon, Mergan, Prapak Wetan, Sembuhan Kidul, Sembuhan Lor, Sumber, Slarongan, Blimbingan, Dondongan, Klepu Kidul, Klepu Lor, Jetis, Kwayuhan, Krompakan, Sragan dan Diro. Luas wilayah desa Sendangmulyo adalah 967 ha. Berjarak 1,5 km dari Kecamatan Minggir, 17 km dari Sleman dan 20 km dari Yogyakarta. Area desa meliputi wilayah persawahan, perkebuan kering dan basah serta lahan kritis. Komoditas yang dimiliki meliputi: tebu, kelapa, dan bambu. Wilayah ini juga menghasilkan kayu jati (<http://dinamikadakwah.blogspot.co.id/2012/08>). Desa yang tercatat mempunyai penduduk sebanyak 7022 orang terdiri dari 2255 Kepala Keluarga. ini, terbagi dalam beberapa dusun, antara lain: Banaran, Blimbingan, Kwayuhan, Jetis, Pakelan, Bero Kwarasan, Krompakan, Diro, Dondongan, Prapag, Sembuhan, Sumber, dan Klepu. Administrasi desa berada di sekitar Dondongan atau di jalan utama Minggir-Kebonagung-Sembuhan. Kegiatan perekonomian masyarakat antara lain pertanian, welut goreng, kerajinan anyaman besek dari bambu, kerajinan bambu anyaman hias. Jenis tanaman pertanian di desa ini adalah padi, kelapa, dan pisang. Desa ini berbatasan di sebelah utara dengan Desa Sendang Agung, di sebelah selatan Desa Sendang Arum, di sebelah barat Desa Progo, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sendang Arum.

Dalam kehidupan sosial budaya keagamaan, penduduk Desa Sendangmulyo bercirikan

budaya Jawa yang mayoritas beragama Islam (4.499 orang atau 62,90 persen), Katholik (2.634 orang atau 36,82 persen) dan Kristen (20 orang atau 0,28 persen). Sebagai masyarakat yang berada di perdesaan, penduduk desa ini masih menganut dan memegang teguh sistem kekerabatan keluarga batih, tempat satu rumah tangga beranggotakan suami-istri, anak dan nenek atau kakek. Hubungan kekerabatan inilah yang membentuk ikatan yang kuat dalam pekerjaan. Hal ini tercermin dari banyak orangtua petani yang menyerahkan pengelolaan tanah pertaniannya kepada anak cucu dan hasilnya dimanfaatkan secara bersama. Sebagai masyarakat desa yang *guyub*, budaya gotong royong, toleransi dan solidaritas sosial masih cukup kuat dipegang teguh dan dijalankan oleh masyarakat. Hal ini antara lain tampak pada bantuan yang diberikan masyarakat secara spontan, baik berupa materi, tenaga maupun saat ada kegiatan hajatan, sambutan, dan kematian serta kegiatan sosial kemasyarakatan lain.

Profil informan. Salah satu cara untuk mendeskripsikan pola penyebaran umur informan adalah dengan melihat kelompok usia yang mencerminkan kondisi produktif atau tidak produktif seseorang, baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Diketahui informan terpusat pada usia produktif, yaitu berkisar antara 20 sampai dengan 39 tahun, sebanyak 18 orang (60 persen). Dari komposisi ini diketahui, bahwa pada dasarnya pengelompokan umur dibedakan menjadi dua, yaitu usia produktif dan tidak atau belum produktif. Rentang usia produktif antara 14 sampai 54 tahun. Namun, bila dipandang dari aspek sosial psikologis, biologis, dan ekonomi rentang usia 20 sampai 39 tahun merupakan puncak dari produktivitas kerja seseorang. Sisanya 12 orang berumur 54 ke atas (40 persen). Ditinjau dari jenis kelamin, 80 persen laki-laki (24 orang) dan 20 persen perempuan (enam orang). Ditinjau dari aspek pendidikan, sebagian besar informan berpendidikan rendah, yaitu sebanyak 18 orang (66 persen) berpendidikan SLTP ke bawah, bahkan ada yang tidak tamat SD dan tidak sekolah

(buta huruf). Sisanya, setingkat SLTA sebanyak 11 orang (36,67 persen) dan sebanyak 1 orang (3,33%) menamatkan sekolah hingga jenjang perguruan tinggi (S1).

Ditinjau dari status perkawinan, diketahui sebagian besar informan berstatus menikah sebanyak 28 orang (93,34 persen), selebihnya berstatus duda dan bujang atau belum menikah masing-masing sebanyak satu orang (3,33 persen). Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan adanya hubungan emosional diantara anggota keluarga, terutama hubungan emosional antara suami istri. Hal ini terlihat dari adanya kekompakan dan saling kontribusi didalam mengatasi permasalahan keluarga, termasuk permasalahan ekonomi dimana istri turut membantu mencari tambahan penghasilan keluarga atas seijin suami. Walaupun istri membantu mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat meningkat taraf hidup keluarga, tetapi suami tetap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dan wajib melindungi anggota keluarga.

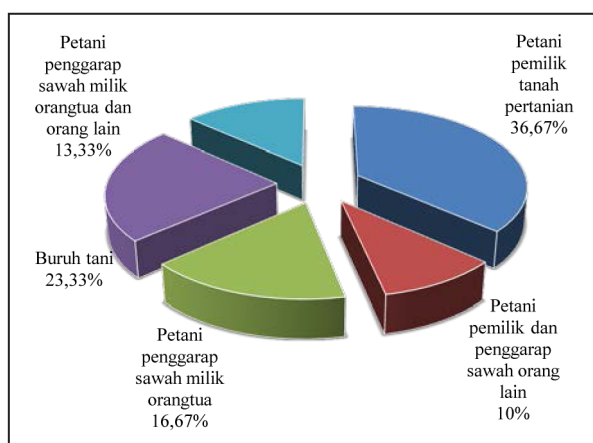
Dilihat dari komposisi keluarga, informan sebagian besar (19 orang atau 63,33 persen) memiliki tanggungan anak antara dua hingga tiga orang anak yang masih berusia sekolah dari tingkat SD hingga SLTA yang memerlukan biaya pendidikan. Sisanya, 11 orang (36,67 persen) memiliki tanggungan empat orang atau lebih. Bila dicermati kondisi ini, menunjukkan beban yang dimiliki informan sangat besar, mereka harus menanggung biaya sekolah anak. Kondisi ini menjadikan kehidupan mereka sehari-hari kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, mereka harus berupaya untuk menambah penghasilan melalui pekerjaan *off farm* guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi beban keluarga dengan mencari atau menambah penghasilan yaitu dengan berternak itik/ayam/kambing, membuka warung/toko kecil, membuat kerajinan bambu, menjadi tukang batu (bangunan), tukang

kayu, tukang ojeg, dan berjualan keliling atau berjualan sayur, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri.

Mengapa mereka lebih memilih pekerjaan *off farm*? Mata pencaharian sebagai petani bukan lagi merupakan satu-satunya pekerjaan pokok yang memberikan penghasilan bagi informan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar keluarga. Masih ada pekerjaan lain yang mereka kerjakan di luar sektor pertanian. Pekerjaan ini dianggap informan sebagai sambilan di luar pekerjaan pokok di luar sektor pertanian (*off farm*) tetapi berperan penting dalam mereduksi kemiskinan. Pekerjaan ini dijalani karena penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan pokok sering menghadapi kesulitan untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga sehari-hari. Dengan demikian persoalan mendasar yang dihadapi oleh informan sebagai petani miskin terhadap pekerjaan pokoknya adalah tingkat penghasilan yang relatif kecil untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari secara wajar.

Keterbatasan ini yang mendorong informan berupaya keras mencari sumber pendapatan lain, salah satunya adalah bekerja di luar sektor pertanian, yaitu pekerjaan *off farm*. Upaya ini lebih banyak diorientasikan untuk menjaga kelangsungan hidup dan menjamin kesejahteraan sosial yang lebih baik. Berkait pekerjaan pokok informan dapat dikelompokkan kedalam lima jenis pekerjaan seperti dipaparkan dalam grafik 1 berikut.

Grafik 1. Status Pekerjaan Pokok Informan



Sumber: Hasil wawancara dan observasi

Berkait status pekerjaan pokok informan, dalam penelitian ini dipahami sebagai pekerjaan usaha tani yang bersifat subsisten (kecil-kecilan), bukan usaha pertanian dalam arti luas. Hal ini perlu dipahami karena apa yang dikenal dengan usaha tani informan di Desa Sendang Mulyo berbeda dengan usaha tani yang dikelola dalam skala besar dengan lahan lebih dari satu hektar.

Sektor pertanian masih memegang peranan yang sentral dan penting dari keseluruhan aktivitas perekonomian Desa Sendang Mulyo. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun karena peranan sektor pertanian semakin melemah sebagai dampak dari keterbatasan kepemilikan lahan, adanya beralihnya fungsi tanah pertanian ke pemukiman penduduk, dan bertambahnya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, serta lahan pertanian yang semakin tidak subur, maka banyak penduduk memutuskan mencari pekerjaan alternatif di luar sektor pertanian yang dipandang dapat membantu memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga, termasuk informan. Pada umumnya usaha yang sering disebut *off farm* ini diusahakan secara sampingan. Tujuan utamanya adalah menambah *income* untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, sedangkan faktor produksi yang digunakan berasal dari anggota keluarga karena tidak memerlukan modal besar.

Secara kuantitas, perkembangan *off farm* ini selain ditentukan oleh kemampuan menyediakan modal juga sangat dipengaruhi oleh struktur sumber daya manusia (pendidikan dan keterampilan) informan. Artinya prospek pekerjaan *off farm* sebagai sumber untuk mencari dan memperoleh penghasilan tambahan terkait dengan kemampuan informan mengatur, mengelola usaha dan waktu antara usaha sektor pekerjaan pokok maupun pekerjaan sambilan. Oleh sebab itu, upaya informan melakukan diversifikasi pekerjaan di luar sektor pertanian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, etos kerja yang baik

dan memperhitungkan kemampuan diri sendiri agar pekerjaan tersebut dapat berkelanjutan dan mampu memberi kontribusi mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari.

Informan sebagian besar memiliki pekerjaan pokok sebagai petani pemilik sawah sendiri dengan luas lahan yang sempit (kurang dari 500 meter persegi), sebanyak 11 orang (36,67 persen). Selebihnya berturut-turut, buruh tani (tani pengolah sawah orang lain) sebanyak tujuh orang (23,33 persen), Petani penggarap sawah milik orangtua lima orang (16,67 persen), Petani penggarap sawah milik orangtua dan orang lain lima orang (16,67 persen), serta petani pemilik sawah dan penggarap sawah orang lain dua orang (6,67 persen). Melihat kenyataan, bahwa tidak banyak peluang kerja karena sempit dan terbatasnya jenis lapangan kerja di desa khususnya di sektor informal, menjadi permasalahan tersendiri bagi informan untuk memaksimalkan pendapatan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar minimum keluarga. Bagi informan (petani miskin), kondisi ini menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Informan dan seluruh keluarga menyadari perlunya penciptaan lapangan kerja mandiri atau bekerja pada orang lain.

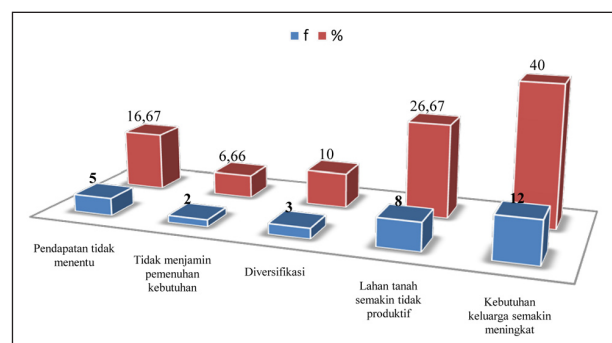
Salah satu penyebab kemiskinan informan adalah tidak tercukupinya kebutuhan dasar keluarga karena penghasilan yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan bertani tidak mampu mengimbangi tuntutan kebutuhan hidup minimal yang cenderung melambung dari hari ke hari. Di sisi lain, pada saat yang sama pekerjaan sektor pertanian di perdesaan semakin berkurang dengan cepat sebagai akibat dari menyempitnya lahan sehingga kegiatan pertanian yang melibatkan penduduk miskin juga berkurang. Alasan lain adalah dari waktu ke waktu rata-rata kesuburan tanah terus berkurang dan semakin tidak produktif, serta lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga petani miskin semakin sempit, sehingga mereka “dipaksa” mencari pekerjaan alternatif *off farm*. Lebih parah lagi ada sebagian penduduk desa Sendang Mulyo yang bekerja

sebagai petani penggarap/buruh tani yang tidak memiliki tanah. Pekerjaan tambahan seperti *off farm* merupakan alternatif yang banyak ditempuh petani untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga.

Hal tersebut mengakibatkan akses pendapatan penduduk/petani miskin semakin berkurang. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, mereka berusaha mencari pekerjaan alternatif pertanian dan di luar sektor pertanian (*off farm*). Dalam kenyataannya, persentase pekerjaan sektor pertanian yang ditekuni informan dari tahun ke tahun cenderung semakin menurun kontribusinya terhadap penghasilan keluarga, meskipun sektor pertanian ini masih merupakan sektor yang sangat penting. Hal ini tercermin seluruh informan menekuni bidang yang berkait dengan sektor pertanian. Sektor pertanian memproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija atau tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Mata pencarian pertanian ini diusahakan di tanah perkebunan, tanah sawah, ladang dan pekarangan. Bagi informan, tujuan penggunaan atau pemanfaatan hasil pertanian sebagian besar dijual dan sebagian lainnya untuk keperluan konsumsi keluarga (100 persen).

Alasan informan menekuni beragam pekerjaan alternatif *off farm* yang digeluti dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagaimana ditampilkan dalam grafik 2 berikut ini.

Grafik 2. Latar Belakang Pemilihan Pekerjaan *off farm*



Sumber: hasil wawancara

Pekerjaan alternatif di luar pekerjaan pokok dijalani informan karena penghasilan yang me-

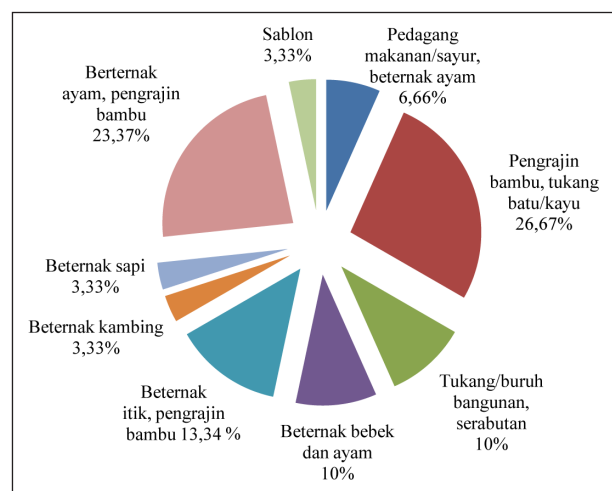
reka peroleh dari pekerjaan pokok (petani dan buruh tani) seringkali tidak menjamin kelangsungan hidup keluarga sehari-hari, dengan demikian persoalan mendasar yang dihadapi oleh rumah tangga petani miskin terhadap pekerjaan pokoknya adalah tingkat penghasilan yang kecil sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Keterbatasan inilah yang mendorong informan berupaya keras mencari sumber pendapatan lain, salah satunya adalah bekerja di sektor pekerjaan alternatif, baik pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pertanian maupun non pertanian. Pekerjaan alternatif ini lebih banyak di sektor informal dan diorientasikan untuk menjaga kelangsungan hidup (*survival*) keluarga.

Sebesar 40 persen informan menyatakan, bahwa pekerjaan alternatif dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan konsumsi, pendidikan, dan kebutuhan lain agar kelangsungan hidup layak lebih terjamin. Atau dengan kata lain, tingginya beban ekonomi keluarga yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan keluarga, tampaknya tidak hanya telah menciptakan tekanan ekonomi melainkan juga tekanan psikologis. Oleh karena itu, usaha pencari pekerjaan lain untuk meningkatkan penghasilan keluarga menjadi hal yang penting bagi keluarga informan, disamping hal ini juga menjadi peluang tersendiri bagi informan yang ingin mengembangkan di luar pekerjaan utama. Salah satu masalah lain yang dihadapi informan sebagai petani di perdesaan adalah semakin tidak produksinya lahan pertanian yang dimiliki. Untuk mengatasi masalah tersebut sebagian informan melakukan berbagai strategi kelangsungan hidup agar stabilitas ekonomi rumah tangga tidak terganggu atau mengalami krisis. Apalagi usaha tani dengan lahan yang kecil sehingga hasil produksi setiap panen kurang optimal. Informan kelompok ini menyadari bahwa, meskipun usaha tani merupakan ujung tombak yang mempunyai peran penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga, namun dengan semakin merosotnya kualitas dan luas tanah,

mengakibatkan menurunnya produksi pertanian sehingga berdampak signifikan terhadap pendapatan keluarga. Berkenaan dengan hal itu, maka untuk menopang kelangsungan hidup keluarga dibutuhkan pekerjaan lain di sektor *off farm*.

Jenis pekerjaan *off farm* yang ditekuni informan mencakup pedagang makanan, beternak ayam, pengrajin bambu, pertukangan batu dan kayu, beternak ayam atau bebek, dan lainnya seperti dipaparkan dalam grafik 3 berikut.

Grafik 3. Jenis Pekerjaan *Off farm* Informan



Sumber: hasil wawancara

Grafik 3 menunjukkan, bahwa jenis pekerjaan alternatif yang dilakukan informan bervariasi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Pekerjaan ini dikerjakan secara tradisional. Pekerjaan yang paling banyak ditekuni informan adalah beternak ayam, pengrajin bambu/besek dan tukang batu/kayu sebanyak 27 orang (90,00 persen), dan selebihnya beternak kambing, beternak sapi dan sablon masing-masing satu orang.

Pada umumnya, *off farm* yang merupakan pola pekerjaan lain non pertanian ini, dilakukan pada saat setelah musim tanam dan sambil menunggu musim panen tiba, seperti berdagang makanan, sayur dan tukang, sebaliknya pekerjaan kerajinan bambu, beternak ayam dan bebek dapat dilakukan secara bersamaan dengan pekerjaan pokok meski dengan waktu yang berbeda. Bagi informan penelitian, pekerjaan *off farm* sudah merupakan bagian integral dari

aktivitas ekonomi keluarga karena menjadi sumber tambahan ketika pekerjaan tani telah selesai dilakukan dan tuntutan kebutuhan pokok lainnya tidak terjangkau. Meskipun pekerjaan *off farm* dianggap berhasil, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya bisa mengatasi masalah kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, perlu pekerjaan alternatif dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga.

Sumbangan pekerjaan *off farm* terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam penelitian ini sumbangan pekerjaan alternatif *off farm* lebih difokuskan dari segi pendapatan atau kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, menurut Harry T. Oshima, peranan pekerjaan alternatif *off farm* secara ekonomi keluarga cukup besar pada keseluruhan *household income*. Hal ini disebabkan petani miskin hanya menggantungkan pada pendapatan usaha tani dengan lahan pertanian yang sempit. Semakin besar kontribusi pekerjaan *off farm* maka semakin tinggi relevansinya terhadap peningkatan penghidupan ekonomi

keluarga, sehingga kesejahteraan sosial petani dimungkinkan terjadi. Sebuah perbedaan mendasar antara pekerjaan sektor pertanian dan pekerjaan *off farm* di Desa Sendang Mulyo adalah aktivitas pekerjaan ini di perdesaan atau sering mengacu pada kegiatan yang mendatangkan hasil dari sektor non pertanian yang dapat melibatkan partisipasi bagi semua anggota keluarga, tanpa menghiraukan apakah rumah tangga petani tersebut memiliki lahan pertanian atau tidak (persawahan, petegalan atau perkebunan). Sebagai pekerjaan alternatif, *off farm* juga mencakup kegiatan yang mendatangkan penghasilan non pertanian di dalam dan di luar perdesaan yang dilaksanakan anggota keluarga petani di perdesaan yang terlibat secara temporer atau sekuler.

Berikut ini ditampilkan data pendapatan pokok bertani dan pendapatan dari *off farm* beserta kontribusinya terhadap pemenuhan sejumlah kebutuhan keluarga informan.

Tabel 1. Sumbangan *Off farm* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

No	Status Informan	Rerata Pendapatan Bersih	Pendapatan Rata-rata <i>Off farm</i>	Sumbangan	
				f	%
1	Petani pemilik tanah (< 500 m ²)	800.000	450.000,-	1.250.000,-	56,25
2	Petani pemilik dan penggarap sawah orang lain	750.000	325.000,-	1.075.000	43,33
3	Petani penggarap sawah milik orangtua	600.000	275.000,-	875.000,-	56,67
4	Petani penggarap sawah milik orangtua dan orang lain	500.000	255.000,-	755.000,-	45,83
5	Buruh tani	370.000	235.000,-	605.000,-	63,51

Sumber: hasil wawancara dan observasi

Hal penting dari *off farm* sebagai pekerjaan komplementer atau sampingan adalah yang berkaitan dengan *income* yang dapat disumbangkan kepada keluarga petani miskin dalam rangka menutup ketidakcukupan penghasilan dari pekerjaan pokok untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dasar keluarga. Inti dari sumbangan (kontribusi) *off farm* ini adalah dengan diketahuinya perbandingan antara *income* dari pekerjaan pokok dengan *income* dari kegiatan *off farm* (*off farm*

activities). Dari hal ini akan diketahui besar kecilnya persentase sumbangan kegiatan *off farm* dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga petani miskin. Tabel 1 menggambarkan bahwa total pendapatan bersih informan pemilik tanah pertanian Rp. 800.000,- dan pendapatan rata-rata dari *off farm* sebesar Rp. 450.000,- setiap bulan. Pada penghasilan ini terjadi penjumlahan uang menjadi total sebesar Rp.1.250.000,-. Hal ini menunjukkan pendapatan dari pekerjaan pokok

masih lebih tinggi dibanding dengan pekerjaan sambilan *off farm*. Meskipun demikian, dalam keadaan seperti yang dijelaskan di atas cukup memberikan gambaran, bahwa telah terjadi sumbangan cukup signifikan dari *off farm* terhadap penghasilan pekerjaan pokok (kesejahteraan ekonomi), yaitu sebesar 56,25 persen.

Untuk mengetahui dan mengukur probabilitas besar kecilnya persentase sumbangan *off farm* terhadap pekerjaan *farm* petani miskin dapat dinyatakan dengan melihat dan membandingkan pendapatan *off farm* (OF) dengan pendapatan *farm* (FA) dikalikan seratus persen, maka perhitungan probabilitas sumbangan OF sebagai berikut, $OF : FA \times 100$ persen. Dengan rumus ini dari informan pemilik tanah pertanian diketahui $Rp. 450.000 : Rp. 800.000,- \times 100$ persen = 56,25 persen. Demikian seterusnya pada informan yang memiliki pekerjaan OF lain seperti ditampilkan pada tabel 1. Dilihat dari tinggi-rendahnya kontribusi, maka kontribusi tertinggi ditemukan pada informan buruh tani (63,51 persen), selanjutnya petani penggarap sawah orangtua (56,67 persen), petani pemilik tanah pertanian (56,25 persen), petani penggarap sawah milik orangtua dan orang lain (45,83 persen) dan Petani pemilik dan penggarap sawah orang lain (43,33 persen). Variasi besaran kontribusi ini dimungkinkan dapat mengurangi beban kemiskinan ekonomi keluarga informan. Selanjutnya apakah sumbangan *off farm* terhadap pekerjaan bertani secara riil dapat menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah kemiskinan, terutama dalam meningkatkan akses petani miskin dalam memperoleh semua kebutuhan fisik dan pokok, antara lain sangat ditentukan oleh faktor harga barang konsumsi dan fluktuasi sejumlah harga barang kebutuhan pokok sehari-hari di lokasi penelitian serta strategi keluarga informan mengelola sumber keuangan keluarga, misalnya menekan pengeluaran melalui serangkaian penghematan terhadap pembelian sejumlah barang kebutuhan pokok.

Kendati demikian, sebagai pekerjaan tambahan atau komplementer, *off farm* secara kuantitas

mampu memperbesar kemampuan kesejahteraan ekonomi yang tercermin dari semakin tingginya penghasilan rumah tangga informan. Pada kenyataannya, terlepas dari besar kecilnya kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga informan, pekerjaan *off farm* yang sering digolongkan dalam *other income* dan banyak ditekuni oleh petani miskin di perdesaan, tetap dibutuhkan sebagai bagian dari strategi melepaskan diri dari ketergantungan pada pekerjaan di sektor pertanian (*on farm*) yang semakin tidak dapat diandalkan.

D. Penutup

Pekerjaan *off farm* sebagai upaya untuk mengatasi dan melepaskan diri lilitan kemiskinan yang dihadapi, telah dilakukan oleh informan petani miskin meskipun masih terbatas pada upaya untuk mengurangi ketergantungan dari pekerjaan pokok, khususnya untuk menutupi kekurangan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga. Setidaknya, pekerjaan *off farm* memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan keluarga. Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi penciptaan pekerjaan *off farm*, diantaranya adalah tingginya beban ekonomi keluarga yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan keluarga. Hal ini tampak pada kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, pekerjaan pokok dan penghasilan yang tidak menentu, lahan tanah pertanian yang sempit, serta semakin tidak produktif. Kondisi ini tidak hanya telah menciptakan tekanan ekonomi tetapi juga tekanan psikologis petani miskin untuk berusaha keras mencari solusi.

Dengan perkataan lain, ketidakmampuan dan keterbatasan kemampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak, mengharuskan mereka mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Dalam kenyataannya, pendapatan dari pekerjaan tersebut lebih diorientasikan atau diprioritaskan kepada upaya untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangga dibanding pada upaya pengembangan usaha *off farm* secara konsisten dan berkesinambungan, serta diupaya-

kan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga informan secara menyeluruh. Dengan demikian, pekerjaan alternatif *off farm* mampu memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan sosial keluarga informan, khususnya terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi, meskipun belum optimal.

Berkait hal itu, sejumlah rekomendasi yang diajukan kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah: Pertama, perlu keberlanjutan pekerjaan alternatif yang dilakukan secara profesional melalui peningkatan kapasitas petani miskin dengan strategi pemberdayaan. Yaitu memberikan peluang bagi penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan kemampuan petani miskin dan keluarganya, bakat, minat keterampilan dan pekerjaan *off farm* yang ditekuni, kebutuhan masyarakat serta potensi sistem sumber kesejahteraan sosial yang dapat dikembangkan menjadi berbagai usaha ekonomi produktif di perdesaan. Kedua, mengintegrasikan informan yang memiliki usaha *off farm* ke dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (Kube) *Off farm*. Tujuannya untuk pengembangan usaha UEP dan memotong rantai kemiskinan dengan cara memberikan bantuan non tunai bersyarat yang bersifat inovatif. Skenario bantuan berupa bantuan tetap untuk modal usaha melalui sistem rekening dan bantuan inovatif berupa pengembangan usaha.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada semua pihak yang telah membantu selesainya tulisan ini. Khususnya kepada Bapak Supriyadi, masyarakat selaku informan, dan aparat Desa Sendang Mulyo yang telah bersedia memberi data dan informasi hingga penelitian ini selesai.

Pustaka Acuan

- Danzil, (2011). *Qualitative Research* 1: 3-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Friedmann, John. (1992). *Empowerment the Political of Alternative Development*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, Three Cambridge Center.
- Heru Nugroho. (2000), *Negara Pasar dan Keadilan Sosial*. Jakarta, Pustaka Pelajar: 2002: 190-192.
- Isbandi Rukminto Adi. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Istiana Hermawati, dkk. (2005). *Studi Evaluasi Efektifitas Kube dalam Pengentasan Keluarga Miskin*. Yogyakarta: B2P3KS.
- Moleong (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers (1985). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Halaman 287-288)
- Sri Yuni Murti Widayanti, dkk. (2015). *Eksistensi kinerja Pendamping Sosial Dalam program Keluarga Harapan (PKH)*. Yogyakarta: B2P3KS.

Situs Internet

- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. BPS: Per September (2016). Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berkurang 0,25 Juta. <http://setkab.go.id> <http://setkab.go.id>. Diakses tanggal 4 April 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 3 Januari 2017. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2016. <https://www.bps.go.id/>. Diakses 3 April 2017
- BPS (2016). Jumlah Petani Miskin Terus Meningkat. <http://villagerspost.com>. diakses 5 April 2017
- Erfanta Linangkung. (2016). Garis Kemiskinan di Yogyakarta Meningkat 5,42 Persen. <https://ekbis.sindonews.com>. 4 Agustus 2016
- Sindonewscom, 45.307 Warga Slemen Hidup di Garis Kemiskinan, 18 Januari 2015.
- Kridanto Priyo (2014). Mengapa Petani Tidak Sejahtera. <http://www.agronomers.com>. 13 Agustus 2014.
- CIDES dalam www.Google.go.id, 21 Agustus 2008. Diakses 3 Februari 2016
- <http://dinamikadawah.blogspot.co.id/2012/08/sekilas-profil-desa-sendangmulyo.html>. Diakses 12 April 2017.

Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat

Condition of Families Receiving Social Assistance to Persons With Severe Disabilities

Ruaida Murni dan Mulia Astuti

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

E-mail: ruaidamurni@yahoo.co.com dan mulia_54@yahoo.co.id

Diterima 12 April 2017, diperbaiki 31 Juli 2017, disetujui 25 Oktober 2017

Abstract

This study is aimed to comprehend the condition of families receiving severe disability social assistant program (ASPDB), which is seen from the economy aspect and family competence aspect in caring for persons with severe disabilities (PDB). Data and information were collected through interviews with families of persons with disabilities, through the observation of the condition of persons with disabilities (PDB) and their families concerned and also through study of documentations. The research was conducted in Padang city and the results showed that the families economic condition of the persons with severe disabilities (PDB) generally made a living with income below Padang city regional minimum wage, which was obtained from permanent jobs and additional jobs. But within this condition, families of PDB said that they were able to fulfill the needs of persons with severe disabilities (PDB), although it still fulfilled at minimal needs as what it is. The families of persons with severe disabilities did not precisely know the specific need of persons with severe disabilities, even once there was a respondent who said that the needs of persons with severe disabilities are merely the same as that of normal people. The families of persons with severe disabilities know where to do the therapy, but the majority of persons with severe disabilities are not given therapy as one of the health care needs under certain reasons as follow: persons with severe disabilities have already been mature, it is difficult to take them to the therapist, and no improvement seen though undergoing therapy. The way the families bring the persons with severe disabilities taking shower reflects that the families concerned have not possessed sufficient knowledge of how to bathe them in accordance with their disabilities. Most of families have never felt disappointed or upset with the condition of their disabilities. Based on the research, it is recommended that families concerned need to enhance the knowledge and skills in providing care and services to persons with severe disabilities.

Keyword : *family condition; social assistants; people with severe disabilities.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi keluarga penerima program asistensi sosial penyandang disabilitas berat (ASPDB), dilihat dari aspek ekonomi dan aspek kompetensi keluarga dalam merawat PDB. Data dan informasi dihimpun melalui wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas, observasi terhadap kondisi PDB dan keluarga yang bersangkutan serta studi dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kota Padang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga PDB pada umumnya di bawah upah minimum regional Kota Padang, yang diperoleh dari pekerjaan tetap dan pekerjaan tambahan. Keluarga mengatakan mampu memenuhi kebutuhan PDB, walau masih pada tahap apa adanya. Keluarga PDB belum mengetahui benar kebutuhan PDB secara spesifik, bahkan ada responden yang mengatakan kebutuhan PDB sama dengan kebutuhan orang normal. Keluarga mengetahui tempat terapi, tetapi sebagian besar PDB tidak diberi terapi sebagai salah satu kebutuhan pemeliharaan kesehatan, dengan alasan sudah dewasa, sulit dibawa ke tempat terapi, dan tidak ada perubahan meski diterapi. Cara keluarga memandikan mencerminkan bahwa keluarga belum memahami bagaimana cara memandikan yang sesuai dengan kondisi PDB. Sebagian besar keluarga tidak pernah merasa kecewa atau kesal dengan kondisi PDB. Berdasar hasil penelitian disarankan bahwa keluarga terkait perlu melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan perawatan bagi PDB.

Kata kunci: *kondisi keluarga; asistensi sosial; penyandang disabilitas berat*

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas berat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama seperti masyarakat lain. Jumlah penyandang disabilitas menurut Direktorat Orang Dengan Kecacatan Kementerian Sosial Republik Indonesia (2015) adalah 3.838.985 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas berat berdasarkan data Susenas BPS tahun 2012 sebanyak 170.120. Penyandang disabilitas pada umumnya membutuhkan perhatian dari segenap pihak, baik dari masyarakat perorangan maupun kelompok dan juga pemerintah. Penyandang disabilitas berat merupakan derajat penyandang disabilitas paling rendah yang memiliki berbagai masalah, karena penyandang disabilitas berat pada umumnya memiliki lebih dari satu ragam disabilitas, seperti disabilitas tubuh dan rungu wicara, tuna netra dan disabilitas tubuh.

Hasil penelitian Lembaga Demografi UI (2013) yang dikutip oleh Fuad. B (2016) menyatakan, bahwa keluarga yang anggota keluarganya terdapat penyandang disabilitas memiliki biaya hidup lebih mahal (*extra cost*) 15-30 persen dibandingkan keluarga tanpa disabilitas. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dari pihak lain terutama pemerintah agar pengasuhan dan perawatan yang diberikan keluarga sesuai dengan kebutuhan PDB artinya hak-haknya dapat terpenuhi. Keluarga yang merupakan orang pertama dan utama dalam mendukung PDB, perlu memberikan perhatian khusus terhadap perawatan dan kebutuhan PDB, keluarga perlu memiliki keterampilan khusus untuk merawat penyandang disabilitas berat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 42 mengamanatkan: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Undang-Undang RI

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan berbagai kepentingan bagi penyandang disabilitas, salah satunya seperti yang tercantum pada pasal 5 (3) Penyandang Disabilitas memiliki hak diantaranya disebutkan pada poin b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, kemudian pada poin d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e) Pemenuhan kebutuhan khusus.

Penyandang disabilitas juga memiliki permasalahan baik secara internal maupun eksternal. Bila ditinjau secara eksternal yang dikatakan oleh Diono. A. (2014), permasalahan penyandang disabilitas adalah a) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas; b) Stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan; c) Kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas dan penanganannya; d) Kurangnya upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan; e) Masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah; f) Masih banyak keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi bila memiliki anggota keluarga disabilitas; g) Peran dunia usaha belum maksimal. Permasalahan tersebut juga yang dialami oleh penyandang disabilitas berat. Melihat permasalahan penyandang disabilitas yang begitu kompleks, perlu perhatian yang serius dari pemerintah, guna memenuhi hak PDB, terutama yang harus dilakukan oleh keluarga maupun lingkungannya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 dan berbagai permasalahan penyandang disabilitas, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mewujudkan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas berat, salah satunya dengan melaksanakan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) sejak tahun 2006. Sampai tahun 2014 sebanyak 28.115 penyandang disabilitas

berat sudah mendapatkan ASPDB, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas berat yang sudah meninggal, pindah alamat dan tidak tepat sasaran yang sudah diganti dengan penyandang disabilitas berat lainnya (Dit. Resos ODK, 2015). Di Provinsi Sumatera Barat terdapat 1.108 PDB penerima asistensi sosial dan khusus di Kota Padang sampai tahun 2015 ada 205 PDB penerima asistensi sosial.

Sejalan dengan hal tersebut keluarga PDB yang telah menerima ASPDB seharusnya tidak lagi mengalami permasalahan tersebut, setidaknya dapat meminimalisir permasalahan PDB baik internal maupun eksternal. Pendamping ASPDB diharapkan memberikan bimbingan kepada keluarga dan lingkungannya, dan dana asistensi sosial yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan PDB. Hasil penelitian Roebyantho H dkk (2012) menunjukkan, bahwa pelaksanaan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (sekarang disebut Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat atau ASPDB) telah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal PDB, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap PDB dan wali dapat menerima apa adanya. Hal ini dapat menimbulkan kesadaran keluarga PDB untuk tidak menyembunyikan lagi PDB dan mampu membuat keluarga untuk membawa PDB berobat ke rumah sakit. Dana ASPDB sebagian dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari seperti susu, *snack* dan lain-lain. Secara umum ASPDB membantu wali PDB meningkatkan kesejahteraan seperti pangan, papan, namun belum mampu memberikan perlindungan sosial seperti biaya untuk terapi dan perawatan kesehatan.

ASPDB diberikan berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, perawatan sehari-hari). Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pada pasal 5 (3) Penyandang Disabilitas memiliki hak diantaranya disebutkan pada poin b) mendapatkan perawatan

dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal. Upaya mendukung berhasilnya tujuan pemberian ASPDB dan untuk mendapatkan tumbuh kembang PDB secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 8 tersebut, tentu harus didukung oleh kondisi keluarga yang memiliki kompetensi dalam memberikan pengasuhan dan perawatan terhadap PDB.

Perawatan penyandang disabilitas berat secara menyeluruh menjadi tanggung jawab keluarga, terutama orangtua. Respon keluarga terutama orang tua terhadap anggota keluarganya yang PDB tidak selalu positif, bahkan mungkin malu memiliki anak PDB, hal ini akan menimbulkan PDB kehilangan hak-haknya. Seperti yang tertulis dalam Rangkuman Eksekutif Keadaan Anak Di Dunia, tentang Anak Disabilitas oleh UNICEF (2013), yang diterjemahkan oleh Agus Riyanto, bahwa anak-anak penyandang disabilitas seringkali terperangkap dalam siklus kemiskinan dan pengucilan. Anak perempuan terpaksa menjadi pengasuh adik-adiknya, bukan pergi ke sekolah misalnya, atau seluruh keluarga mengalami stigmatisasi sehingga enggan untuk melaporkan, bahwa ada anak penyandang disabilitas atau enggan membawanya ke publik.

Anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk pengucilan dan itu mempengaruhi mereka dalam berbagai tingkatan tergantung dari ragam disabilitas yang mereka alami, di mana mereka tinggal dan budaya serta kelas sosial mereka. Anak penyandang disabilitas seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi karena disabilitas berujung pada marginalisasi dari sumber daya dan pembuatan keputusan, dan bahkan pada kematian anak. Pengucilan seringkali muncul dari invisibilitas. Kondisi seperti ini perlu ditelusuri atau diteliti pada keluarga penerima asistensi sosial penyandang disabilitas berat, sehingga dapat dilakukan antisipasi sehingga PDB tidak kehilangan haknya. Bagaimana kondisi kompetensi keluarga penerima asistensi sosial penyandang disabilitas berat dilihat dari

aspek ekonomi dan kompetensi keluarga dalam mengasuh dan merawat PDB?

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang Peran Keluarga dalam Memenuhi Hak-Hak PDB khususnya di Kota Padang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi keluarga penerima asistensi sosial penyandang disabilitas berat, dilihat dari aspek ekonomi dan kompetensi keluarga dalam mengasuh serta merawat PDB.

B. Penggunaan Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa persentase alternatif jawaban responden dan diperkuat dengan data kualitatif yang digali berdasarkan wawancara mendalam, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi orangtua penyandang disabilitas berat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas berat, observasi terhadap kondisi keluarga dan penyandang disabilitas berat serta studi dokumentasi. Jumlah responden dan informan 25 keluarga penerima program ASPDB yang tersebar di 19 kelurahan dari empat kecamatan di Kota Padang. Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif berupa persentase alternatif jawaban dan pengelompokan data kualitatif ke dalam kategori yang telah ditentukan berdasarkan informasi data yang didapat.

C. Analisis terhadap Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat di Kota Padang

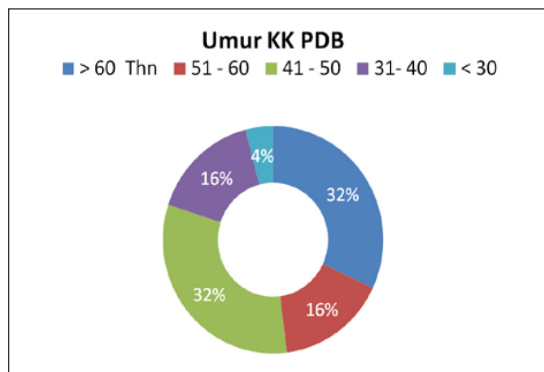
Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasar-

kan kesamaan hak. Penyandang disabilitas berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan, pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, juga menjamin hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memperoleh rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Kondisi keluarga akan mempengaruhi pengasuhan dan perawatan bagi anggota keluarga penyandang disabilitas berat. Kondisi keluarga yang dilihat dalam penelitian ini adalah kondisi ekonomi terkait dengan pendidikan, pekerjaan dan penghasilan keluarga, dan kompetensi keluarga dalam mengasuh dan merawat PDB. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata kondisi diartikan sebagai keadaan atau persyaratan. Kondisi merupakan situasi atau keadaan yang ada pada diri individu, kelompok baik di luar maupun di dalam diri, kelompok itu sendiri. Keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan mengurangi timbulnya masalah sosial (Gunarsa & Gunarsa, 1993). Keluarga PDB berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan PDB dan mengurangi timbulnya permasalahan baru pada PDB tersebut.

Usia kepala keluarga: Usia kepala keluarga atau orang tua ikut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dan hak PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan 32 persen kepala keluarga sudah berusia di atas 60 tahun. Secara rinci usia kepala keluarga dapat dilihat pada diagram satu di bawah ini.

Diagram 1. Umur Kepala Keluarga PDB



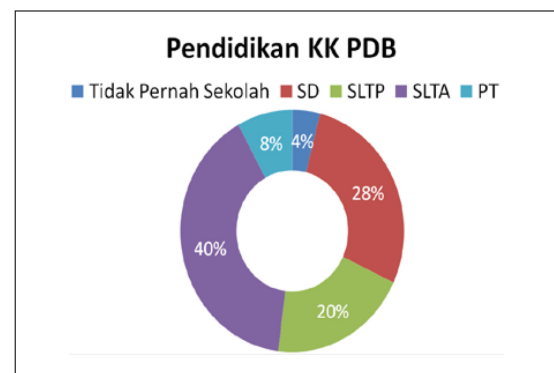
Sumber: Hasil Penelitian 2016

Usia kepala keluarga PDB sebagian sudah berusia lanjut sehingga memiliki kesulitan tersendiri dalam merawat PDB, mengingat kondisi PDB sendiri yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra dalam perawatan. Kepala keluarga yang sudah lanjut kemampuan fisik dan tenaganya semakin berkurang. Kekhawatiran besar dari kepala keluarga yang sudah berusia lanjut ketika dikaitkan dengan pertanyaan keberlanjutan perawatan anggota keluarga yang PDB. Seperti ketika ditanyakan hal berikut “Bu apakah ibu memberikan cukup waktu untuk merawat anak ibu yang PDB”, dikatakan “Saya sayang sama anak saya, sedapat mungkin saya selalu merawat sendiri, saya *kepinginnya* dia duluan yang meninggal, jangan saya, kalau saya yang duluan siapa nanti yang akan mengurus dia, sekarang mesti saya sudah tua bahkan sudah tidak kuat merawatnya, tapi saya masih ada dan bisa merawat sedikit-sedikit, saya khawatir meninggal duluan”. Pertanyaan selanjutnya: “Anak ibu yang lain di mana, kan bisa menggantikan ibu untuk merawatnya.” Dikatakan lagi “Anak-anak saya sibuk dengan keluarganya sendiri, lagi pula siapa yang mau merawat anak seperti ini, harus ditungguin terus, semua harus diurus, bisa-bisa anaknya sendiri tidak terurus.” Hal ini menunjukkan perlu ada orangtua pengganti sebagai pengasuh PDB ketika tidak ada yang mengasuh. Panti khusus untuk penyandang disabilitas berat milik pemerintah dan pemerintah daerah sampai saat ini belum ada, milik swasta sangat terbatas

hanya ada dua itu pun di kota besar. PDB yang sangat membutuhkan cukup banyak dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga PDB: Tingkat pendidikan kepala keluarga PDB tergolong rendah sebagian besar (52 persen) berpendidik SLTP ke bawah. Secara rinci terlihat pada diagram dua berikut.

Diagram 2. Tingkat Pendidikan KK PDB



Sumber: Hasil Penelitian 2016

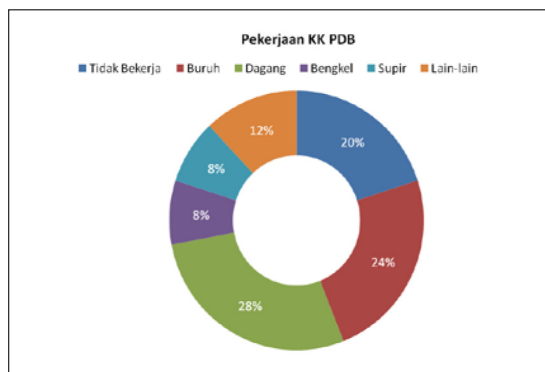
Melihat tingkat pendidikan orangtua, sebagian masih berpendidik rendah $\leq$ SLTP, sehingga membutuhkan tambahan pengetahuan terkait pengasuhan dan perawatan PDB. Pengetahuan merawat PDB tidak diperoleh dari pendidikan formal namun setidaknya dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu menggali atau mencari tahu bagaimana mengasuh dan merawat PDB yang semestinya. Ragam disabilitas anggota keluarga umumnya adalah disabilitas ganda, seperti disabilitas tubuh, wicara dan intelektual; tubuh, netra, rungu wicara dan lain-lain. Jumlah penyandang disabilitas dalam satu keluarga umumnya ada satu orang, hanya dua keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas lebih dari satu orang. Artinya pengeluaran keluarga akan lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota keluarga PDB satu orang.

Ekonomi Keluarga: Kondisi ekonomi keluarga berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan serta pembelanjaan

dan pemanfaatannya. Suami sebagai pemimpin rumah tangga pada dasarnya mengemban tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, termasuk pencari nafkah keluarga. Kondisi ini tidak berarti, bahwa istri tidak dibenarkan turut berupaya membantu mencari penghasilan. Dalam keadaan demikian, tanggung jawab pengadaan dan pengayaan nafkah keluarga utama tetaplah suami (Sulistiani, nn).

Pekerjaan merupakan salah satu kegiatan pokok untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan diperoleh apabila keluarga memiliki pekerjaan, baik pekerjaan tetap maupun pekerjaan tambahan atau sambilan. Sebagian responden (48 persen) memiliki pekerjaan tetap, 52 persen memiliki pekerjaan yang tidak dapat dilakukan setiap hari dalam jenis pekerjaan yang sama, atau keluarga ini memiliki pekerjaan serabutan atau pekerja lepas, kemudian sebagian lagi yang bekerja bukan kepala keluarga tetapi anggota keluarga lain. Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh kepala keluarga PDB adalah sebagai berikut:

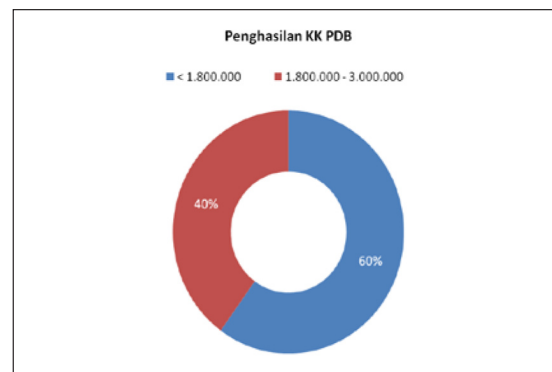
Diagram 3. Jenis Pekerjaan KK PDB



Sumber: Hasil Penelitian 2016

Berdasar jenis pekerjaan diketahui, bahwa keluarga PDB rentan mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada keluarga yang tidak memiliki pekerjaan. Artinya kepala keluarga tidak memiliki penghasilan sendiri. Dari pekerjaan tersebut kepala keluarga memperoleh penghasilan yang beragam, seperti terlihat pada diagram 4 berikut.

Diagram 4. Penghasilan KK PDB

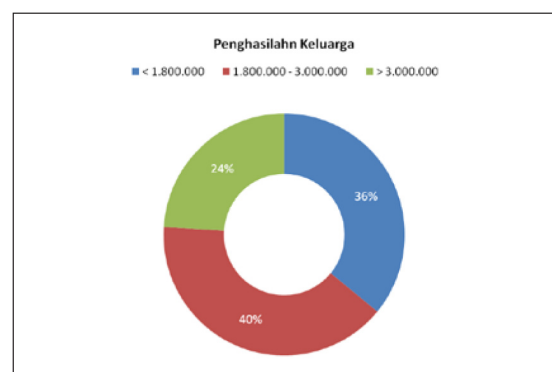


Sumber: Hasil Penelitian 2016

Diagram 4 di atas memperlihatkan besar penghasilan yang didapat oleh kepala keluarga per bulan, kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan termasuk ke dalam penghasilan <1.800.000. Penghasilan kepala keluarga paling tinggi Rp. 3.000.000 dengan jumlah anggota keluarga paling sedikit dua orang, yaitu satu orang kepala keluarga dengan memiliki seorang penyandang disabilitas.

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga PDB tidak hanya dari penghasilan kepala keluarga tetapi juga dari penghasilan anggota keluarga lain, sehingga penghasilan keluarga lebih meningkat, seperti yang terlihat pada diagram 5 berikut.

Diagram 5. Penghasilan Keluarga PDB



Sumber: Hasil Penelitian 2016

Jumlah penghasilan keluarga pada diagram lima terlihat <Rp.1.800.000 berkurang jumlahnya dari 60 persen menjadi 36 persen, yang memiliki

penghasilan Rp.1.800.000 s/d 3.000.000 sebanyak 40 persen, dan yang berpenghasilan > Rp. 3.000.000 ada 24 persen. Pendapatan perkapita Kota Padang merujuk pada data upah minimum regional Kota Padang yaitu Rp1.800.000, artinya pendapatan keluarga tergolong miskin.

Merujuk pada hasil penelitian Demografi UI yang dikutip oleh Fuad. B, bahwa keluarga PD memiliki *ekstra cost* 15-30 persen, maka seyogyanya kepala keluarga PDB memiliki pekerjaan yang mampu menghasilkan lebih dari kepala keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga yang PDB. Dari penghasilan yang didapat, hanya sebagian kecil responden yang mengatakan penghasilan mereka mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian sebagian besar mengatakan kadang-kadang tidak cukup, dan sebagian kecil lain mengatakan kadang-kadang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan, bahwa sebagian besar responden masih memiliki penghasilan yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Sebagian besar responden mengatakan tidak bisa menabung dari penghasilan yang di dapat, hanya satu reponden yang mengatakan bisa menabung setiap bulan dan sebagian kecil kadang-kadang bisa menabung. Hal ini dapat dipahami karena pekerjaan keluarga PDB sebagian adalah pekerja lepas yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya.

Pemenuhan kebutuhan PDB: Dalam kondisi penghasilan keluarga yang tidak menentu, keluarga mengatakan mampu memenuhi kebutuhan PDB, baik kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan pakaian, karena responden adalah keluarga PDB yang telah memperoleh ASPDB di mana setiap keluarga dibantu Rp. 300.000 per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimal PDB. Asistensi sosial (*Social Assistance*) disebut juga sebagai bantuan sosial adalah program jaminan sosial dalam bentuk bantuan tunai bagi penduduk miskin, orang-orang jompo dan anak terlantar (Situmorang, Ch, 2013). Pengertian jaminan sosial yang dikemukakan oleh Ghozie. P (2014) merupakan

bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Menurut Irwanto dkk (2010), upaya perwujudan hak penyandang disabilitas merupakan upaya bersama multi sektoral kementerian dan multi profesional di tingkat pusat dan daerah yang dilakukan secara terintegrasi dan sistematis, termasuk dalam mekanisme pemantuan dan evaluasi pelaksanaannya. Hal demikian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyatakan, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat (selanjutnya disebut ASPDB) adalah salah satu bentuk rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berat sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan selama satu tahun, dapat diperpanjang, dihentikan atau dialihkan pada program lain, hal ini disesuaikan dengan ketersediaan APBN dan kebijakan pemerintah pusat. Tujuan asistensi sosial terhadap penyandang disabilitas berat adalah : 1) Memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat (sandang, pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar; 2) Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat dalam melakukan perawatan dan bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas berat; 3) Tumbuhnya upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas berat (Dit. Resos ODK, 2015). Asistensi sosial diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 12 bulan, yang dibayarkan tiga kali dalam satu tahun. ASPDB merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap PDB yang dapat

dimanfaatkan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan PDB. Pemberian dukungan dan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, diharapkan dapat menghilangkan keterbatasan dan hambatan yang ada sehingga dapat memunculkan potensi-potensi yang dimiliki.

Potensi yang tersembunyi akibat kurangnya dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan kerugian sumber daya bagi Indonesia (Primadi Oscar, 2014). Potensi yang ada pada PDB tentu masih diharapkan dapat dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan derajat disabilitasnya. Penyandang disabilitas berat yang berhak mendapatkan asistensi sosial memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Penyandang disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidup tergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak mampu melakukan aktivitas sosial; 2) Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain); 3) Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar; 4) Berusia antara dua tahun sampai 59 tahun pada saat pendataan awal dan penggantian calon penerima ASPDB; 5) Tidak dapat berpartisipasi secara layak baik dalam aktivitas keluarga di rumah maupun di masyarakat; 6) Tidak sedang mendapat pelayanan dalam panti; 7) Terdaftar sebagai penduduk setempat; 8) Diutamakan penyandang disabilitas berat dari keluarga tidak mampu (Dit. Resos. ODK, 2015).

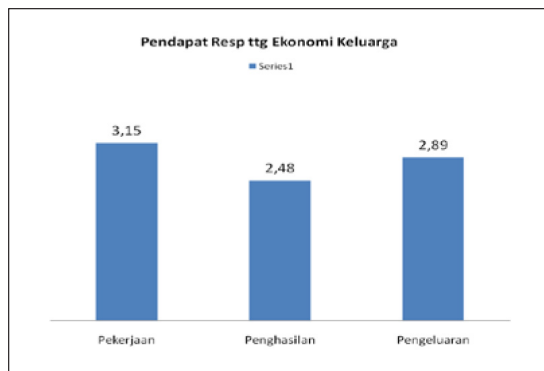
PDB sudah mendapatkan bantuan yang disebut sebagai asistensi sosial, tetapi keluarga PDB masih harus mengupayakan pemenuhan PDB dengan dukungan anggota keluarga, karena dikatakan bahwa ASPDB yang diterima belum mampu mendukung seluruh kebutuhan PDB. Anggota keluarga saling membantu dalam

memenuhi kekurangan pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut. Pemenuhan kebutuhan keluarga ditanggulangi bersama oleh anggota keluarga secara gotong royong. Seperti yang dikatakan oleh responden kepala keluarga bahwa kekurangan kebutuhan keluarga diperoleh dari bantuan anak yang sudah bekerja. Kepala keluarga juga mencari kerja tambahan sebagai buruh lepas dan berhutang, baik ke warung maupun ke saudara dan tetangga. Seperti ilustrasi berikut ini ketika peneliti bertanya “Pak bagaimana cara bapak menanggulangi kekurangan kebutuhan keluarga”, kemudian dijawab “Ibunya anak-anak biasanya minta dulu ke warung bu, habis mau gimana lagi, kami sudah biasa ngutang dulu ke warung.” Pertanyaan berikutnya, “Kalau butuhnya uang gimana pak, untuk berobat misalnya”, kemudian dijawab “Biasanya anak saya yang sudah bekerja yang bantu-bantu, sebenarnya dia juga sudah bantu beli ini beli itu”.

Responden lain ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, menjawab “Saya mencari kerja tambahan bu, kebetulan saya bisa benerin pompa air, genteng yang bocor atau perabotan lain yang rusak, apa sajalah yang disuruh tetangga saya kerjain, saya Satpam bu jadi ada waktu tuk bantu-bantu tetangga, lumayanlah, meski kadang masih kurang juga, karena kebutuhan anak saya ini banyak sekali terutama susu sama pampers”. Percakapan tersebut menunjukkan, bahwa keluarga selalu dan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang disabilitas berat dengan berbagai cara. Menurut responden mereka mampu memenuhi kebutuhan PDB dengan cara-cara seperti yang telah disebutkan.

Dari hasil angket, terkait pendapat responden tentang ekonomi keluarga baik pendapatan, penghasilan, maupun pengeluaran keluarga tersaji dalam diagram 6 berikut ini. Nilai tertinggi adalah empat dan terendah adalah satu yaitu satu sangat kurang, dua kurang, tiga cukup dan empat sangat mencukupi/baik.

Diagram 6. Pendapat Responden tentang Ekonomi Keluarga



Sumber: Hasil Penelitian 2016

Data pada diagram 6 menunjukkan, umumnya keluarga PDB bekerja (3,15), namun penghasilannya dirasa kurang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga (2,48), dan pengeluarannya juga kurang dari cukup (2,89). Berdasar hasil observasi terlihat, pemenuhan kebutuhan PDB belum seperti yang dikatakan kepala keluarga karena yang seharusnya dipenuhi keluarga belum terlihat, seperti kebutuhan makanan yang harus dibedakan dengan anggota keluarga yang bukan PDB, alat bantu untuk mandi, alat bantu gerak, tempat tidur khusus, pengobatan dan kebutuhan akan terapi belum terpenuhi. Keluarga mempunyai alasan tersendiri untuk tidak memenuhi kebutuhan PDB, sebagaimana terungkap berikut, “Kalau mandi kan bisa digendong ke kamar mandi, kemudian dikasih kain dan ditidurkan atau dipangku, trus disiram”. Kenyataan tidak cukup hanya seperti itu, kondisi PDB sudah dewasa membutuhkan kursi roda untuk bisa dibawa ke kamar mandi.

Pengeluaran keluarga penyandang disabilitas, selain untuk kebutuhan pokok keluarga seperti makan, listrik, transportasi, dan kebersihan, juga ada kebutuhan khusus lain. Pengeluaran tersebut akan bertambah banyak karena seorang penyandang disabilitas berat memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh keluarga. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan untuk pengobatan khusus, pakaian khusus (celana sekali pakai), makanan khusus, susu dalam

jumlah lebih banyak, terapi, alat bantu khusus untuk orientasi dan bergerak, alat bantu khusus untuk mandi, dan tidur. Hal ini sesuai skor jawaban responden, yaitu skor penghasilan keluarga 2,48 dan pengeluaran 2,89, artinya pengeluaran keluarga PDB lebih besar dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang ditekuni.

Merujuk pendapat Sulistiati, bahwa dalam satu keluarga bukan hanya suami yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini juga berlaku pada keluarga PDB, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga PDB bukan hanya kepala keluarga yang bekerja tetapi anggota keluarga lain ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun ahirnya masih belum mencukupi. Keluarga PDB sebagian besar pencari nafkah hanya suami atau bapak, bahkan ada yang sepenuhnya dibantu oleh anggota keluarga (anak) yang sudah bekerja. Hal ini karena PDB membutuhkan perhatian khusus dan pendampingan secara terus menerus sehingga ibu atau istri tidak bisa ke luar rumah membantu menambah penghasilan keluarga.

Perawatan kesehatan oleh keluarga begitu penting bagi PDB. Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan, baik fisik maupun mental. Disabilitas banyak dilatarbelakangi masalah kesehatan dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Penyandang disabilitas perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan disabilitas (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014). Berdasar hal tersebut, keluarga penyandang disabilitas berat harus memiliki keterampilan mengasuh dan merawat PDB, baik dari sisi kesehatan maupun perawatan sehari-hari yaitu makan, kebersihan, penyediaan alat bantu yang diperlukan, bagaimana menjangkau fasilitas yang ada baik yang sudah disiapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat bahkan mungkin yang mampu dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Hal ini sesuai yang dikatakan Mujaddid (2014) Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak,

Kementerian Kesehatan. Mengingat sebagian besar anak dengan disabilitas berada di masyarakat, maka perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terutama orang tua dan keluarga dalam penanganan anak dengan disabilitas dan peningkatan kemampuan petugas dalam memfasilitasi orang tua dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan serta perawatan anak dengan disabilitas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjamin terjaganya kesehatan penyandang disabilitas. Sebagaimana tertera pada pasal 139: (1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Mencermati amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Mujaddid (2014) mengatakan, bahwa upaya pelayanan kesehatan perlu dikembangkan untuk memberikan akses bagi anak dengan disabilitas sesuai dengan permasalahannya. Upaya perlindungan anak dengan disabilitas sama dengan anak lain umumnya yaitu dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan dasar anak tersebut meliputi asah, asih dan asuh yang diperoleh melalui upaya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Hal ini tentu bukan hanya merangkum kedua amanah dari Undang-Undang tersebut, tetapi juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi sosial.

Kompetensi Keluarga dalam Mengasuh dan Merawat PDB : Keluarga harus menjadi orang tua pertama bagi PDB, artinya pengasuhan PDB menjadi prioritas bagi orang tua, pengasu-

han dan perawatan PDB tidak diserahkan kepada orang lain, karena sentuhan kasih sayang orang tua saat memandikan, mendekap, memeluk, menyuapi serta berkomunikasi merupakan hal penting untuk kenyamanan dan keamanan PDB. Sentuhan kasih sayang dengan cara memeluk atau menggendong akan memberikan efek positif luar biasa bagi anak (Sulastri. BU, 2015).

Pengasuhan atau yang dikenal dengan *parenting* adalah proses membesarkan dan mendukung perkembangan fisik dan mental yang juga meliputi emosional, spiritual, dan intelektual anak dari bayi hingga dewasa. Pengasuhan bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang cerdas, bukan saja cerdas intelektual tetapi juga cerdas emosional dan spiritual. Gaya pengasuhan terhadap anak juga memiliki peranan penting, anak yang mendapat pengasuhan baik akan memiliki budi pekerti dan sopan santun baik dalam hidup bermasyarakat. Bagi anak dengan disabilitas berat walaupun panca indra dan fisiknya tidak dapat berfungsi secara maksimal, tetapi mereka juga harus diberikan pengasuhan yang maksimal dari keluarga terutama orang tua.

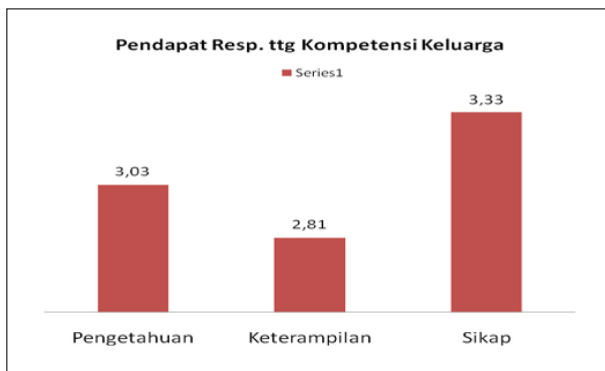
Perawatan keluarga yang komprehensif merupakan proses yang rumit, sehingga memerlukan pendekatan yang logis dan sistematis untuk bekerja dengan keluarga dan anggota keluarga lain. Pendekatan ini disebut proses keperawatan. Dafi Kan (2017) mengutip pendapat Yura dan Walsh (1979) mengatakan, bahwa proses keperawatan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang sistematis untuk menentukan masalah klien, membuat perencanaan untuk mengatasinya, merencanakan tugas tersebut atau menugaskan orang lain untuk melaksanakannya dan mengevaluasi keberhasilan secara efektif terhadap masalah yang diatasi. Hal ini dilakukan ketika bekerja dengan individu, keluarga, kelompok atau komunitas.

Proses adalah suatu aksi gerak yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dari satu titik ke titik lain menuju pencapaian tujuan. Berdasar definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa keperawatan keluarga terhadap PDB

adalah suatu proses yang digunakan untuk pemecahan masalah PDB yang bersifat holistik, sistemik dan interaksional dengan menggunakan kekuatan keluarga. Pengasuhan, keperawatan, bantuan dan asistensi sosial bagi PDB merupakan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dapat diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (UU No. 8 tahun 2016).

Kondisi PDB pada dasarnya sangat membutuhkan bantuan orang lain terutama orang terdekat yakni keluarga. Keluarga merupakan pendamping bagi PDB yang selalu siap mendukung sehingga keluarga perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PDB dan cara memberikan dukungan, memiliki keterampilan, dan sikap yang memadai dalam merawat dan mengasuh PDB. Berikut diuraikan kompetensi keluarga dalam merawat PDB terkait dengan pengetahuan, keterampilan merawat, dan sikap keluarga terhadap PDB.

Diagram 7. Pengetahuan Keluarga Tentang PDB



Sumber: Hasil Penelitian 2016

Pengetahuan tentang PDB perlu dimiliki oleh keluarga, dengan pengetahuan yang cukup maka keluarga mampu mengaktualisasikan dalam merawat PDB. Pengetahuan yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi pengetahuan keluarga tentang kedisabilitas yang mencakup mengetahui kebutuhan PDB, perawatan, akses memperoleh bantuan baik bantuan untuk kesehatan maupun terapi. Secara kuantitatif skor pengetahuan yang diperoleh adalah 3,03. Secara kualitatif

ditunjukkan dengan disebutkannya kebutuhan keluarga yaitu kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi untuk PDB seperti kebutuhan pakaian khusus, jenis makanan khusus, vitamin, dll. Sebagian besar kepala keluarga juga mengetahui ke mana harus mengakses bantuan untuk kebutuhan PDB. Jika ditelusuri satu persatu tentang pengetahuan tersebut, hanya sebagian kecil responden yang mengatakan mengetahui disabilitas berat, bahwa disabilitas berat adalah orang yang karena kecacatannya tidak mampu mengurus diri sendiri, sehingga disabilitas berat membutuhkan perhatian khusus, memiliki kebutuhan khusus harian. Mereka juga mengetahui cara merawatnya, mengetahui tempat terapi dan mengetahui akses memperoleh bantuan untuk PDB. Jika dilihat persentase jawaban responden sebagian besar (56 persen) mengatakan tidak mengetahui secara keseluruhan tentang disabilitas berat, dan mengetahui hanya sebagian dari komponen kebutuhan disabilitas berat. Sebagian kecil lagi mengatakan tahu tentang disabilitas berat, sebagian kecil lain mengetahui kebutuhannya PDB, dan sebagian kecil lagi sama sekali tidak memahami tentang disabilitas berat. Sebagian besar responden mengatakan penyandang disabilitas berat sangat memerlukan perhatian dan sebagian lagi mengatakan PDB memerlukan perhatian khusus. Hal ini dapat diartikan bahwa semua responden memberikan perhatian kepada PDB atau tidak menelantarkan walaupun kondisi ekonomi keluarga sederhana.

Keluarga pada umumnya mengetahui sumber bantuan untuk PDB, baik bantuan untuk kesehatan maupun bantuan yang bersifat barang atau benda. Tidak semua responden mampu mengakses bantuan tersebut. Hal ini dapat dipahami karena terkait kondisi ekonomi keluarga, dan belum mengerti bagaimana cara mengakses bantuan tersebut.

PDB pada umumnya memiliki ragam disabilitas lebih dari satu, misalnya disabilitas netra, rungu wicara dan psikotik, bahkan ada yang disertai dengan berbagai penyakit yang mengikuti, sehingga memiliki kebutuhan khusus, seperti

membutuhkan terapi rutin, minum obat rutin, harus memakai pakaian khusus, membutuhkan alat bantu khusus, dll. Sebagian kecil keluarga mengatakan bahwa PDB memiliki kebutuhan khusus harian, artinya keluarga memahami secara keseluruhan kebutuhan khusus harian PDB. Sebagian besar mengatakan memahami kebutuhan khusus harian PDB, seperti kebutuhan makan, pakaian sehari-hari, namun belum secara spesifik dapat menyebutkan kebutuhan PDB, sedangkan satu responden mengatakan tidak tahu sama sekali kebutuhan khusus harian PDB. Ada responden yang mengatakan kebutuhan PDB sama dengan kebutuhan orang normal. Padahal saat dilakukan observasi, kebutuhan PDB tidak bisa disamakan seperti orang normal, karena kesulitan menelan makanan, butuh susu untuk tambah gizi bahkan membutuhkan vitamin sebagai kekuatan fisiknya, namun karena ketidaktahuan keluarga maka kebutuhan khusus PDB tidak terpenuhi.

Melihat pengetahuan keluarga mengenai kebutuhan khusus harian PDB bisa dikatakan cukup baik dan memiliki skor 3,48 atau 35 persen mengatakan mengetahui kebutuhan khusus PDB, maka memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan PDB. Sebagian besar responden keluarga mengetahui cara merawat PDB, walaupun hanya sebatas merawat seperti yang dia lakukan sehari-hari seperti memandikan, menyuapi, dan berobat ke dokter jika sakit. Sebagian kecil yang lain mengetahui secara keseluruhan cara merawat PDB, namun ketika ditanya apakah semua yang diketahui keluarga tersebut dapat dilakukan dalam merawat PDB di rumah. Dikatakan bahwa keluarga hanya tahu cara merawat PDB akan tetapi tidak semua dapat dilakukan karena ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan perawatan tersebut, seperti kebutuhan akan terapi. Hanya sebagian kecil yang mengatakan tahu tempat terapi (16 persen) selain tempat terapi yang pernah dikunjungi, 28 persen tahu tempat terapi yang pernah dikunjungi dan 36 persen tahu tempat terapi tradisional seperti tukang urut, serta 20 persen responden sama sekali tidak tahu tempat terapi.

Sebagian keluarga mengetahui di mana tempat terapi tetapi sebagian besar tidak melakukan terapi terhadap PDB, padahal terapi adalah salah satu kebutuhan PDB. Terapi hanya dilakukan pada usia PDB masih balita, saat ini tidak dilakukan lagi dengan alasan PDB sudah besar sudah dewasa, sulit untuk dibawa ke tempat terapi, serta tidak mampu mengakses tempat terapi karena terlalu mahal dan alasan lain yaitu tidak ada perubahan walaupun diterapi, sehingga pasrah dengan kondisi yang ada.

Terapi merupakan salah satu upaya pemeliharaan PDB agar tetap hidup sehat dalam kedisabilitasiannya. Ketika ditanya: “Pak kenapa anak bapak tidak diterapi”, kemudian dijawab “Dulu sering diterapi, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, terus tidak dilanjutkan terapinya”. Harapan responden ketika PDB diterapi kondisinya menjadi normal setidaknya mampu mengurus dirinya sendiri. Terapi berfungsi membantu meringankan beban si PDB. Seperti yang dialami oleh salah satu responden keluarga yang mengatakan “Anak saya tadinya tangan dan kakinya kaku, badannya kalau dipangku lurus saja, kaku seperti kayu, tapi setelah rutin terapi seminggu dua kali, jadi lemas, tangan bisa diangkat, kaki juga sama (sambil diperagakan, diangkat dan ditekuk), dan kelihatan lebih seger”. Responden lain mengatakan bahwa anak sudah besar sudah tidak perlu terapi.

Keterampilan Keluarga: Keterampilan keluarga dalam mengasuh dan merawat PDB nilainya 2,81 (diagram 7). Hal ini berarti bahwa keterampilan keluarga dalam mengasuh dan merawat keluarga kurang dari cukup. Keterampilan dalam mengasuh dan merawat PDB sangat penting dimiliki oleh keluarga, mengingat pada umumnya PDB hanya mampu asuh dan mampu rawat, mereka tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain dan pada umumnya disabilitas ganda, sehingga keluarga harus mengerti bagaimana cara mengasuh dan merawat PDB sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang standar. PDB meskipun tidak mampu berkomunikasi tetap memiliki rasa dan keinginan sehingga keluarga harus

mengerti apa yang dibutuhkan PDB dan terampil dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti mampu memandikan PDB sesuai dengan norma dan kebutuhannya. Sedapat mungkin memandikan PDB di ruang tertutup (kamar mandi) dan memberi kenyamanan seperti halnya orang normal.

Sebagian besar responden (56 persen) mengatakan bisa memandikan PDB, kemudian sangat bisa (36 persen), bisa dengan dibantu orang lain dan ada yang mengatakan tidak bisa karena sudah dewasa dan tidak bisa menggendong ke kamar mandi. Hampir semua responden memandikan PDB di kamar mandi, ada yang dua kali dan ada yang satu kali sehari. PDB digendong ke kamar mandi, ditidurkan di lantai dengan alas kain, ada yang dipangku dan ada yang didudukkan di lantai. Bila dilihat dari cara memandikan PDB alat bantu sangat diperlukan, seperti tempat menidurkan PDB, kursi khusus untuk tempat duduk PDB ketika dimandikan, sehingga tidak langsung didudukkan di lantai kamar mandi. Sebagian kecil responden tidak memandikan PDB dengan alasan tidak bisa diangkat ke kamar mandi sehingga setiap hari hanya dilap. Hal ini dapat dimaklumi karena sudah tua sementara PDB dewasa sehingga sulit untuk dibawa ke kamar mandi. Kondisi seperti inilah yang membutuhkan alat bantu bagi PDB agar orangtua bisa memandikan PDB. Dari hasil observasi terlihat bahwa di antara keluarga yang mampu memandikan PDB, masih ada keluarga yang memandikan PDB di tempat terbuka di depan rumah, sementara PDB sudah berusia remaja. Keluarga beralasan PDB sulit dikendalikan dan orang juga memahami kalau anaknya disabilitas, sehingga menurut orang tua tidak masalah kalau dimandikan di depan rumah atau di ruang terbuka. Kata-kata mampu memandikan PDB yang diucapkan oleh responden, sesuai dengan apa yang bisa ia lakukan, bukan sesuai dengan kebutuhan PDB dan tata cara yang benar. Menyikapi kenyataan tersebut, alat bantu mobilitas dari tempat tidur ke kamar dan saat mandi memang diperlukan bagi PDB seperti kursi roda, tempat tidur khusus dll.

Terapi tidak harus dilakukan oleh petugas tetapi dapat dilakukan sendiri oleh keluarga di rumah, bahkan ketika sudah dilatih diharapkan mampu melakukannya sendiri. Namun karena keluarga atau orang tua belum pernah mengikuti pelatihan mengasuh, merawat PDB dan tidak belajar terapi dari tenaga ahli maka sebagian besar keluarga orangtua tidak melakukan terapi sendiri. Hanya sebagian kecil yang melakukan terapi setelah mandi, seperti diurut di bagian tertentu seperti kaki dan tangan atau dibawa ke tukang urut. Hal ini terkait juga dengan pengetahuan keluarga tentang perlunya terapi bagi PDB, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa walaupun keluarga tahu di mana tempat terapi, tetapi karena menurut keluarga PDB sudah tidak perlu diterapi dengan berbagai alasan, sehingga kebutuhan terapi tidak terpenuhi baik dari tenaga ahli maupun dari keluarga. Informasi di atas menunjukkan, bahwa keterampilan terapi diperlukan oleh keluarga dalam merawat PDB agar haknya terpenuhi.

Berkait penyajian makanan bagi PDB sebagian besar mengatakan bisa menyajikan makanan, artinya bisa menyuapi dan menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Hasil observasi dan pengamatan terhadap perawatan dan pelayanan PDB terlihat, bahwa sebagian responden keluarga belum menyajikan makanan sesuai dengan kebutuhan. PDB membutuhkan makanan lembut atau dihaluskan (diblender), tetapi makanan yang disajikan sama dengan anggota keluarga lain. Responden mengatakan karena PDB sudah dewasa tidak perlu makanan yang dihaluskan. Keluarga belum mengkaitkan dengan kemampuan PDB untuk mengunyah dan menelan makanan yang diberikan. Hal inipun terkait dengan pengetahuan keluarga terhadap kebutuhan khusus PDB yang dipenuhi oleh keluarga. Kebutuhan khusus dimaksud salah satunya adalah kebutuhan akan makanan yang berbeda dengan orang normal. Sebagian besar keluarga meskipun mengatakan tahu kebutuhan khusus PDB, namun makanan yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan dan standar kesehatan.

Sikap Keluarga Terhadap PDB : Sikap keluarga terhadap penyandang disabilitas memperoleh nilai rata-rata 3,33. Hal ini berarti sikap keluarga sudah lebih dari cukup. Sikap keluarga terhadap PDB merupakan hal penting untuk memberikan pengasuhan dan perawatan yang dibutuhkan PDB. Bagaimana mungkin keluarga memiliki sikap yang tidak baik terhadap PDB mampu memberikan pengasuhan atau pelayanan perawatan untuk memenuhi hak PDB.

Diagram 7 menunjukkan sebagian besar responden keluarga (96 persen) mengatakan tidak pernah merasa kecewa atau kesal dengan kondisi PDB, bahkan ada yang mengatakan anak yang PDB merupakan berkah dari Allah, seperti yang dikatakan responden berikut, “Pak bagaimana perasaan bapak melihat kondisi anak bapak seperti ini, apa bapak pernah merasa kecewa atau kesal”, kemudian dijawab “Anak saya ini berkah bagi kami bu, walaupun saya harus berhenti bekerja (di luar rumah, saat ini dagang di rumah), karena harus ngurusin dia (PDB), saya tidak pernah merasa kesal apalagi kecewa. Dia tidak pernah saya ajak ke luar rumah, bukan karena saya malu, tapi karna tidak punya kursi roda”. Keluarga lain mengatakan, “Mau diapakan lagi bu, dikasih seperti ini harus diterima”. Hasil observasi juga memperlihatkan kondisi PDB bersih, pakaian rapi dan tempat tidur juga terlihat rapi dan bersih. Sikap yang baik terhadap PDB diikuti kepedulian terhadap kebutuhan PDB. Harapan terbesar adalah ketika sikap keluarga terhadap PDB cukup baik, maka semua kebutuhan PDB akan terpenuhi, hanya saja terhalang dengan pengetahuan keluarga terhadap pengasuhan dan perawatan PDB yang belum sesuai standar kesehatan serta kebutuhan PDB belum memadai. Kebutuhan PDB sama dengan kebutuhan anggota keluarga pada umumnya, tetapi PDB mempunyai kebutuhan dan perlakuan khusus.

D. Penutup

Kesimpulan: Kondisi ekonomi keluarga, pada umumnya bekerja namun penghasilan

hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan dasar minimal PDB. PDB sudah mendapat ASPDB tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan spesifik seperti makanan khusus, perawatan dan kesehatan khusus (terapi).

Kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengasuh dan merawat PDB masih kurang memadai. Hal ini terungkap dari sebagian besar keluarga belum memberikan pengasuhan dan perawatan kesehatan secara spesifik sesuai kebutuhan PDB, seperti terapi, pemberian makan, vitamin, susu, dll. Pengetahuan dan sikap keluarga dalam memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap PDB sudah cukup memadai. Terkait dengan rendahnya keterampilan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan kesehatan dapat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan akan perawatan dan kesehatan.

Di samping itu kondisi keluarga orang tua sebagian sudah berusia ≥ 50 tahun, kondisi fisiknya semakin menurun, PDB yang diasuh semakin besar, sehingga akan mengalami kesulitan dalam merawat PDB. Orang tua khawatir tidak ada yang menggantikan untuk merawat PDB.

Rekomendasi: Melihat kondisi keluarga sebagaimana diuraikan di muka disarankan kepada dinas sosial dan dinas terkait. (1) Mengingat dalam perawatan dan pengasuhan PDB memerlukan keterampilan khusus, sementara belum semua keluarga/orang tua mengetahui kebutuhan PDB secara spesifik dan yang mengetahui kebutuhan PDB secara spesifik belum mampu mengaktualisasikan dalam perawatan PDB sehari-hari, maka perlu ada pelatihan khusus tentang pengasuhan dan perawatan PDB bagi keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat sekitar yang peduli. (2) Meningkatkan penghasilan keluarga PDB melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dengan pendampingan yang intensif dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan yang bisa dikembangkan. (3) Alternatif terakhir perlu mengadakan panti sosial yang memberi pelayanan dan perawatan bagi PDB. Berbagai upaya tersebut bertujuan untuk memenuhi ke-

butuhan perawatan bagi PDB sebagai antisipasi terhindar dari keterlantaran.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh responden dan informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai. Kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Diono, Agus. (2014). *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*. Buletin Jendela, Data dan Informasi Kesehatan. ISSN 2080-270X, Semester II. Kementerian Kesehatan RI.
- Dafi Kan. (2017). *Teori Proses Keperawatan Menurut Yura dan Wals*. <http://fy.blogspot.ci.id/2017/01/makalah-teori-proses-keperawatan.html>
- Fuad, B. (2016). *Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif untuk Penyandang Disabilitas*. Bahan Kajian. Pusat Kajian Perlindungan Anak. (Tidak diterbitkan)
- Gunarsa, SD, & Gunarsa, NY. (1993). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
- Ghozie, Prita. (2014). *Mengenal Jaminan Sosial dan Asuransi*. <https://www.futuready.com/artikel/asuransi-proteksi/Mengenal-Jaminan-Sosial-dan-Asuransi>
- Irwanto dkk. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia : Sebuah Desk- Review*. Pusat Kajian Disabilitas. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok
- Kementerian Sosial RI. (2014). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta
- . (2015). *Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat*. Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan. Jakarta
- . (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan. ISSN 2080-270X, Semester II. Kementerian Kesehatan RI.
- Mujaddid, dr. (2014). *Kesehatan Anak dengan Disabilitas*. Buletin Jendela, Data dan Informasi Kesehatan. ISSN 2080-270X, Semester II. Kementerian Kesehatan RI.
- Primadi Oscar, dr.MPH. (2014). *Sekapur sirih*. Buletin Jendela, Data dan Informasi Kesehatan. ISSN 2080-270X, Semester II. Kementerian Kesehatan RI.
- Roebiyantho, Haryati . Setyo Sumarno, M. Bela Nawane. (2012). *Evaluasi Program. Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (Studi Kasus di Kulon Progo dan Kota Banjar Masin*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Press (anggota IKAPI).
- Sulistiani. DR, Msi (nn). *Pemberdayaan Sosial Keluarga, dalam "Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsep dan Strategi*. Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Situmorang, Ch. (2013). *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia; Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*. Cinta Indonesia, Depok
- Sulastri, Bunda Ucu. (2015). *Golden Touch Parenting. Melambungkan Prestasi dan Membentuk Karakter Anak Lewat Kasih Sayang Nyata*. Adibintang Zaytuna Ufuk Abadi. Jakarta.
- United Nations Children's Fund. (2013). *Keadaan Anak Di Dunia 2013, Anak Penyandang Disabilitas (diterjemahkan oleh Agus Riyanto)*. UNICEP
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat *Fulfillment of People With Severe Disabilities Rights*

Hari Harjanto Setiawan dan Bambang Pudjianto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur

E-mail: hari_harjanto@yahoo.com , bambangalthaf@yahoo.co.id

Diterima 21 Agustus 2017, diperbaiki 17 Oktober 2017, disetujui 27 Oktober 2017

Abstract

Persons with severe disabilities (PDB) as a matter of fact are disabled indeed and their disabilities are not possible to be rehabilitated, thus they can not perform their daily life activities and or throughout their life they depend on the help of others, and they are unable to support their own life by themselves. It describes that persons with severe disabilities depend on and need the help of others along their life in fulfilling their rights. Fulfillment of their rights is somewhat expected much from their family. This study is quantitative research that will address the fulfillment of their rights from their family can be measured by two important indicators, namely the family economy and the family competence. This research was conducted in Jepara which is one of the ASPDB beneficiaries region. The results of this study answer the hypothesis that the influence of family economic condition towards the fulfillment of the persons with severe disabilities rights (PDB) is very little compared to the influence of family competences towards the fulfillment of the PDB rights.

Keywords: *persons with severe disabilities (PDB); family economic, family competence*

Abstrak

Penyandang disabilitas berat (PDB) adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa PDB tergantung dan membutuhkan orang lain seumur hidup dalam memenuhi haknya. Pemenuhan hak PDB diharapkan adalah dari keluarga. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang akan mengemukakan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh keluarga diukur dari dua indikator penting yaitu ekonomi keluarga dan kompetensi keluarga. Penelitian ini dilakukan di Jepara yang merupakan salah satu wilayah penerima bantuan Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Hasil penelitian ini menjawab hipotesis bahwa pengaruh ekonomi keluarga terhadap pemenuhan hak PDB sangat kecil dibandingkan pengaruh kompetensi keluarga terhadap pemenuhan hak PDB.

Kata kunci: *penyandang disabilitas berat; ekonomi keluarga; kompetensi keluarga*

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga Negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas). Menurut BPS pada Susenas 2012 jumlah penyandang disabilitas sebanyak 6.008.600 orang. Sementara menurut PPLS 2011 data penduduk disabilitas yang tergolong rumah tangga miskin sebanyak 1.313.533 orang.

Berdasarkan derajat kedisabilitasannya, penyandang disabilitas dapat dikelompokkan menjadi disabilitas berat, sedang dan ringan. Data diatas, sebagian terdiri dari mereka penyandang disabilitas berat. Jumlah penyandang disabilitas berat berdasarkan data Direktorat Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) tahun 2014 sebanyak 163.232 orang.

Pengertian disabilitas disebutkan pula oleh The International Classification of Functioning (ICF) yaitu *“Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face”* (UNESCO Bangkok, 2009). Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut.

Penyandang disabilitas berat (PDB) adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasiannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri (Kementerian Sosial, 2016). Definisi tersebut menunjukkan, bahwa penyandang disabilitas berat total tergantung dan membutuhkan orang lain semur hidupnya.

Keberadaan penyandang disabilitas merupakan bagian dari keseluruhan komunitas masyarakat yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen terkait di dalamnya (Amalia, 2014). Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan, bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Sinkronisasi dan pembenahan segala bidang mutlak diperlukan terutama masalah penyeraga-

man data jumlah penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas beserta persebarannya yang terintegrasi dengan data kependudukan di wilayah Indonesia (Sholihah, 2016).

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya berbagai upaya nyata agar kesetaraan taraf hidup penyandang disabilitas dengan warga negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas.

Ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Upaya rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ditujukan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasiannya tergolong ringan dan sedang, dimana mereka masih bisa membantu dirinya sendiri dan atau keluarganya. Upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ditujukan bagi mereka yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan seluruh aktivitasnya tergantung pada orang lain sehingga perlu penyuluhan tentang faktor resiko bagi masyarakat (Astuti, W. D., & Budijanto, D. 2009).

Pemenuhan hak penyandang disabilitas berat oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial telah dilaksanakan dalam bentuk Asistensi Sosial bagi PDB (ASPDB) dengan pemberian bantuan langsung berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan selama satu (satu) tahun, yang penyalurannya dilaksanakan dalam

tiga (tiga) tahap. Bantuan disampaikan melalui wali (individu yang bertanggungjawab menjamin hidup PDB) dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan, peningkatan gizi, pembelian sandang, dan perawatan sehari-hari. Kegiatan ini sudah diawali sejak tahun 2006. Sudah 10 tahun program ini diimplementasikan namun belum menjangkau keseluruhan PDB, yaitu baru menjangkau 22.500 orang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan keuangan negara.

Pemenuhan hak PDB, dimasukkan Bappenas kedalam skema perlindungan sosial di cluster satu, dengan target individu dan keluarga. Perlindungan sosial ini berupa bantuan sosial berbentuk cash untuk PDB, diantaranya program ASPDB. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memberikan dukungan agar PDB mampu menjalankan kehidupannya sehari-hari dan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya, tidak menjadikan kehidupannya semakin buruk.

Usaha mempercepat keterjangkauan pemenuhan hak penyandang disabilitas berat perlu adanya kegiatan terobosan. Hasil evaluasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan (2012) dan hasil kajian kebijakan ASPDB yang dilaksanakan Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI Tahun (2013) menunjukkan penerima ASPDB dapat dikelompokkan ke dalam tiga karakteristik. **Pertama**, keluarga sangat miskin 35 persen, dimana pendidikannya juga rendah, tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilannya juga sangat minim atau kurang dari Rp. 750.000,-/per bulan, wali atau orang tuanya tidak potensial untuk dikembangkan karena sudah lanjut usia. **Kedua**, keluarga yang tergolong miskin, dengan penghasilan Rp.750.000,- s.d. Rp.1.500.000,- orang tua masih potensial dalam arti masih bisa dikembangkan potensi mereka dalam penanganan PDB. **Ketiga**, keluarga mampu secara ekonomi jumlahnya yang menerima bantuan tidak begitu banyak karena ada klausul dalam kriteria penerima diutamakan dari keluarga miskin.

PDB disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi fisik, kesehatan, psikis dan sosial.

Keluarga atau wali membutuhkan keterampilan khusus untuk bisa merawat PDB. Mereka memerlukan pembelajaran terkait hal tersebut. Salah satu rekomendasi dari pengembangan kebijakan ASPDB yaitu peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam hal perawatan PDB termasuk *volunteersm* dan peningkatan ekonomi keluarga. Hasil penelitian Demografi Universitas Indonesia menemukan, bahwa pengeluaran ekonomi keluarga disabilitas lebih besar 30 persen dibanding keluarga yang tidak mempunyai anggota penyandang disabilitas. Dapat dipastikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga dengan anggota penyandang disabilitas berat lebih banyak dibanding keluarga tanpa anggota penyandang disabilitas berat.

Pengertian keluarga adalah: “...*may be changing generally but, even within an individual family group, family membership alters as children are born, parent divorce and remarry and grandparents die.*” (Bowes & Hayes, 1999). Pemberdayaan bagi keluarga dan orangtua agar memiliki pengetahuan dan kemampuan perawatan mengasuh anak (Kuntjorowati, 2016). Ada tujuh dimensi dari fungsi keluarga yaitu: *problem solving, communication, role in the family, emotional involvement, behavior control, emotional responses and general functioning* (Al-Krenawi & Graham, 2009, p. 77).

Implementasi rekomendasi tersebut, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD) pada tahun 2015 mengadakan Uji Coba Pengembangan Kemampuan Keluarga dalam Pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial PDB dengan memberdayakan keluarga dalam hal perawatan PDB dan peningkatan ekonomi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar minimal PDB. Untuk mengembangkan peran keluarga dalam kegiatan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial perlu mengadakan penelitian.

Permasalahan disabilitas dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal, yaitu: 1) Permasalahan internal: Pertama, Gangguan atau keru-

sakan organ dan fungsi fisik dan atau mental sebagai akibat kelainan dan kerusakan organ menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Kedua, gangguan, hambatan atau kesulitan dalam orientasi, mobilitas, komunikasi, aktivitas, penyesuaian diri, penyesuaian sosial, kepercayaan diri, gangguan belajar, keterampilan, pekerjaan. 2) Permasalahan eksternal: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas, stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan, kurangnya peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas dan penanganannya, kurangnya upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, masih banyaknya penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan masih sangat rendah, masih banyaknya keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan atau menutupi apabila memiliki anggota keluarga disabilitas dan peran dunia usaha belum maksimal (Diono, 2014).

PDB sangat rentan dalam segala aspek kehidupan, karena semuanya tergantung dari keberfungsian keluarga, wali dan orang di sekitarnya. Penelitian ini akan menjawab tiga permasalahan pokok yaitu: 1) Bagaimana pengaruh ekonomi keluarga terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berat? 2) Bagaimana pengaruh kompetensi keluarga tentang kedisabilitas keluarga terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berat? 3) Bagaimana pengaruh ekonomi keluarga dan kompetensi keluarga tentang kedisabilitas keluarga terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berat?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survai, sedangkan dalam menganalisis data menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008).

Jenis penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2008). Penelitian ini diperkuat dengan data kualitatif melalui wawancara.

Suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tentu saja tidak akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya di lapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional. Definisi operasional variabel berisi indikator-indikator dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data relevan untuk variabel tersebut. Berdasarkan kajian pustaka diatas, variabel, indikator penelitian dapat didiskripsikan berikut ini:

Tabel 1. Variabel, Indikator dan Pengukuran Penelitian

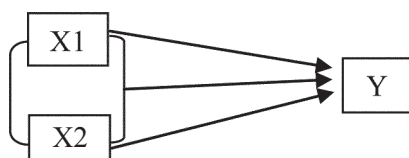
No	Variabel	Indikator
1	Ekonomi Keluarga	a. Pekerjaan b. Pendapatan c. Pengeluaran
2	Kompetensi Keluarga Tentang Kedisabilitas	a. Pengetahuan b. Keterampilan c. Sikap dan Nilai
3	Pemenuhan Hak PDB	a. Sandang b. Papan c. Pangan d. Kesehatan dan Keperawatan e. Perlindungan

Definisi operasional variabel peran keluarga dalam pemenuhan hak PDB adalah sebagai berikut:

- Peran keluarga sebagai variabel bebas (X): ekonomi keluarga sebagai X1 dan kompetensi kedisabilitas sebagai X2. Variabel peran diukur dengan menggunakan empat poin *skala Likert*, responden diminta untuk memberikan konfirmasi atas pernyataan yang diberikan dalam skala satu(tidak setuju) sampai dengan empat (sangat setuju).
- Pemenuhan hak PDB sebagai variabel terikat (Y). Variabel pemenuhan hak PDB diukur

dengan menggunakan menggunakan empat poin *skala Likert*, responden diminta untuk memberikan konfirmasi atas pernyataan yang diberikan dalam skala satu (tidak setuju) sampai dengan empat (sangat setuju).

Masing-masing indikator dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan yang dituliskan dalam kuesioner. Model hubungan antar variabel digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

X1 = Ekonomi keluarga

X2 = Kompetensi tentang kedisabilitas

Y = Pemenuhan hak PDB

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jepara yang ditentukan secara purposive berdasar 1) Lokasi uji coba pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas berat yang dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tahun 2015; 2) Lokasi kegiatan AS-PDB yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006, dimana pada tahun 2016 dilakukan pemutusan kegiatan (*exit strategy*). Jumlah populasi di Kabupaten Jepara ada 261 orang.

Menurut Sugiyono (2008:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus representatif. Berdasar populasi tersebut maka penentuan sampel yang representatif dalam penelitian ini adalah 10 persen dari jumlah populasi yaitu sebanyak 261 orang.

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga simpulan yang diambil adalah benar. Oleh karena itu dalam penelitian, metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik: 1) Angket, digunakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis untuk dijawab dan diisi responden terkait tujuan penelitian. Mengingat kondisi responden yang serba terbatas, maka dalam pengisian angket dibantu oleh enumerator agar tidak terjadi salah persepsi. 2) Wawancara, digunakan untuk menggali data kualitatif yang berfungsi untuk memperkuat data kuantitatif. Agar terstruktur, maka dalam pelaksanaan wawancara digunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap keluarga/wali penyandang disabilitas berat. 3) Studi kepustakaan, dilaksanakan dengan memanfaatkan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, baik berupa surat, catatan harian, laporan, foto, buku-buku, *webside* maupun laporan hasil penelitian. 4) Observasi, dilakukan terhadap kondisi penyandang disabilitas berat, keluarga, lingkungan fisik dan sosialnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Mengorganisir informasi; b) Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode; c) Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya; d) menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori; e) Melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain dan f) Menyajikan secara naratif. Proses pengolahan data yang dilakukan adalah: a) *Edit*, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap ataukah perlu ada pembetulan. b) *Koding*, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden dengan memberikan kode/symbol serta skor menurut kriteria yang ada. Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan *skala Likert* untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001). c) *Tabulasi*, yaitu kegiatan

tan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel dengan memproses hitung frekuensi dari masing-masing kategori, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer.

Suatu instrumen (daftar pertanyaan) dalam kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan tersebut dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi-rendahnya validitas instrumen dapat menunjukkan validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r = 0.3$, jadi jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut tidak valid.

Reliabilitas menunjukkan keterandalan suatu alat ukur. Tujuan dari dilakukan uji reliabilitas adalah agar instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dapat dipercaya (*reliable*). Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *internal consistency*, yaitu mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. *Internal consistency* diukur dengan menggunakan koefisien *Cronbach alpha*. Jika koefisiensi alpha lebih besar daripada 0.60 maka dinyatakan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah handal.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau dengan aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2006: 239). Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan simpulan. Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program SPSS (Statistical Program for Social Science) yaitu suatu program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara tepat dan cepat, menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan.

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dengan menggunakan Spearman mengingat data yang dihasilkan adalah ordinal. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1 = Terdapat pengaruh ekonomi keluarga terhadap pemenuhan hak hidup Penyandang Disabilitas Berat
- H2 = Terdapat pengaruh kompetensi keluarga tentang kedisabilitas keluarga terhadap pemenuhan hak hidup Penyandang Disabilitas Berat
- H3 = Terdapat pengaruh ekonomi keluarga dan kompetensi keluarga tentang kedisabilitas terhadap pemenuhan hak hidup Penyandang Disabilitas Berat

C. Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat

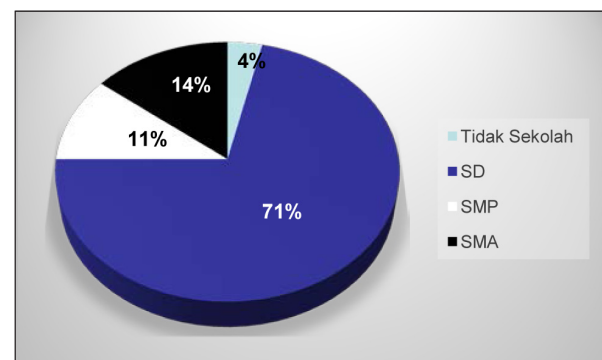
Profil Keluarga

Keluarga yang dimaksudkan adalah mereka yang mengasuh langsung penyandang disabilitas berat, karena ada beberapa diantara mereka tidak diasuh langsung oleh orang tua kandungnya, namun ada yang diasuh oleh saudara, nenek dan bahkan ada orang lain yang mengambil sebagai anak angkatnya akibat diterlantarkan orang tua. Karakteristik penting keluarga responden dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Pendidikan

Pendidikan sangat erat hubungannya dengan pekerjaan, penghasilan dan cara merawat anaknya yang mengalami disabilitas berat. Pendidikan keluarga dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. Pendidikan Responden



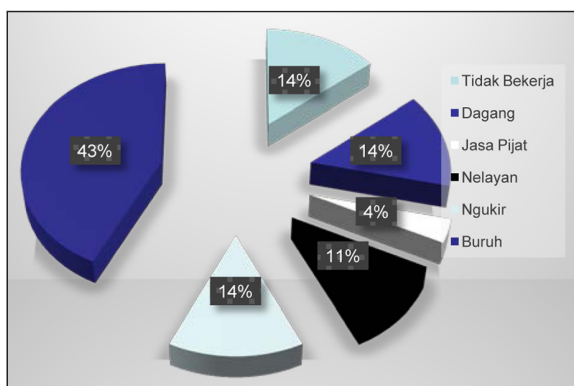
Umumnya tingkat pendidikan keluarga PDB adalah SD yaitu sebanyak 71 persen. Keluarga

yang berpendidikan SMP sebanyak 11 persen dan yang berpendidikan SMA sebanyak 14 persen. Kelompok yang perlu mendapat perhatian adalah sekitar empat persen dari mereka yang tidak sekolah. Pendidikan kepala keluarga PDB berkaitan erat dengan pekerjaan dan penghasilan serta kemampuan dalam memenuhi hak anaknya. Pendidikan keluarga merupakan unit fundamental yang bertanggung jawab dan harus melayani kebutuhan fisik dan psikis anak selama mereka dalam pertumbuhan menuju kedewasaan. Tanggung jawab dimaksud terutama berada dipundak orangtua, sehingga ia dituntut dapat benar-benar berfungsi sebagai pendidik karena ternyata salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pola perilaku anak dalam proses pendidikannya adalah lingkungan keluarga.

Pekerjaan

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam rangka mencari nafkah dan mata pencaharian. Pekerjaan keluarga penyandang disabilitas berat di Kabupaten Jepara, dapat dikelompokkan antara lain; tidak bekerja, dagang, jasa (pijat, kos, menjahit dan ukir), buruh/karyawan, pembantu rumah tangga, sopir, petani/nelayan dan pensiunan. Pekerjaan keluarga akan mempengaruhi kehidupan PDB dan sebaliknya permasalahan PDB akan mempengaruhi pekerjaan.

Gambar 2. Pekerjaan Responden



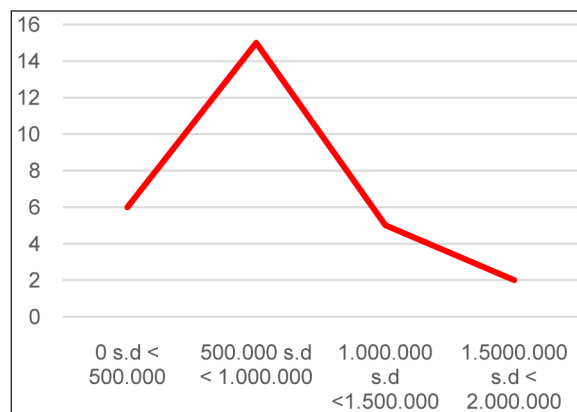
Sebagian besar keluarga PDB adalah buruh dan karyawan yaitu sebanyak 43 persen, bahkan

ada yang tidak bekerja sebanyak 14 persen. Hal ini akan mempengaruhi kondisi pemenuhan hak PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa keluarga penyandang disabilitas berat menghadapi persoalan dalam pembagian peran antara pemenuhan hak PDB dan tuntutan peran ekonomi keluarga. Situasi semacam ini banyak dialami keluarga PDB yang terpaksa mengorbankan pekerjaan demi merawat PDB. Di satu sisi keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, di sisi lain keluarga juga harus merawat PDB secara rutin.

Penghasilan

Karakteristik keluarga selanjutnya yang terkait dengan pekerjaan adalah upah dan gaji. Perbedaan pendapatan dalam upah dan gaji pada rumah tangga timbul dari perbedaan ciri-ciri para pekerja yang ditentukan dari keterampilan, pelatihan, pendidikan, pengalaman dan lainnya. Selain itu juga ditentukan adanya perbedaan pekerjaan antara lain berbahaya, sulit, gemerlapan dan seterusnya.

Gambar 3. Pendapatan Responden



Pendapatan rumah tangga PDB berbeda menurut jumlah anggota rumah tangga dalam angkatan kerja. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja semakin besar juga tingkat pendapatannya. Sebagian besar keluarga PDB berpenghasilan Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-. Penghasilan yang demikian perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan

secara ekonomis namun tidak meninggalkan aktivitas dalam merawat PDB.

Hasil Pengukuran Hubungan Ekonomi Keluarga (X1), dengan Pemenuhan Hak PDB (Y)

Ekonomi keluarga pada dasarnya adalah upaya dari keluarga dalam rangka menggunakan sumber daya manusia yang terbatas guna memenuhi kebutuhannya. Pada penelitian hubungan ekonomi keluarga dengan penyandang disabilitas berat ini ada tiga hal yang diukur antara lain pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran. Secara deskriptif pengukuran hubungan ekonomi keluarga (X1) dengan pemenuhan hak PDB (Y) dapat digambarkan dalam tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Korelasi antara Ekonomi Keluarga (X1) dengan Pemenuhan Hak PDB (Y)

	X1	Y
Pearson Correlation	1	,491**
X1 Sig. (1-tailed)		,004
N	28	28
Pearson Correlation	,491**	1
Y Sig. (1-tailed)	,004	
N	28	28

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Hubungan variabel ekonomi keluarga (X1) dengan variabel pemenuhan hak PDB (Y) diperoleh hasil signifikan. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2, yang menunjukkan, bahwa hasil pengukuran nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 (tingkat Alpa 5 persen). Artinya besarnya tingkat hubungan (signifikansi) adalah 0,491.

Hasil Pengukuran Hubungan Kompetensi Keluarga(X2) dengan Pemenuhan Hak PDB (Y)

Kompetensi keluarga yang dimaksud adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi hak penyandang disabilitas berat. Variabel yang diukur dalam kompetensi keluarga ini adalah pengetahuan keterampilan dan sikap dari keluarga PDB dalam memenuhi haknya. Secara deskriptif dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Korelasi antara Kompetensi Keluarga (X2) dengan Pemenuhan Hak PDB (Y)

	X1	Y
Pearson Correlation	1	,660**
X1 Sig. (1-tailed)		,000
N	28	28
Pearson Correlation	,660**	1
Y Sig. (1-tailed)	,000	
N	28	28

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Hasil Pengukuran Hubungan Ekonomi Keluarga (X1) dan Kompetensi Keluarga(X2), dengan Pemenuhan Hak PDB (Y)

Hubungan antara variabel ekonomi keluarga (X1) dan kompetensi keluarga (X2) dengan pemenuhan hak PDB (Y) dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Korelasi antara Hubungan Ekonomi (X1), Kompetensi Keluarga (X2) dengan Pemenuhan Hak PDB (Y)

	X1	X2	Y
Pearson Correlation	1	,517**	,491**
X1 Sig. (1-tailed)		,002	,004
N	28	28	28
Pearson Correlation	,517**	1	,660**
X2 Sig. (1-tailed)	,002		,000
N	28	28	28
Pearson Correlation	,491**	,660**	1
Y Sig. (1-tailed)	,004	,000	
N	28	28	28

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Berdasar tabel 4 diatas, hasil pengukuran hubungan antara variabel ekonomi keluarga (X1) dan kompetensi keluarga (X2) terhadap pemenuhan hak PDB adalah:

Pertama, hubungan variabel ekonomi keluarga (X1) terhadap variabel pemenuhan hak PDB (Y) diperoleh hasil signifikan. Berdasar pengujian tersebut, maka program pengembangan peningkatan ekonomi keluarga sangat diperlukan.

Kedua, hubungan variabel kompetensi keluarga (X2) terhadap variabel pemenuhan hak PDB (Y) diperoleh hasil signifikan sehingga program peningkatan kompetensi keluarga sangat diperlukan dalam meningkatkan pemenuhan hak

PDB. Peningkatan kompetensi keluarga bisa dimaksimalkan dengan melatih pendamping yang selanjutnya akan diajarkan kepada orang tua.

Ketiga, berdasarkan uji pengaruh yang dilaksanakan secara bersamaan (X1 dan X2) terhadap Y, maka hasilnya adalah signifikan. Artinya, bahwa kedua program tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan. Apabila memilih prioritas, peningkatan kompetensi keluarga lebih prioritas dibanding ekonomi keluarga.

Tabel 5. Hasil Pengujian Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	534,088	2	267,044	10,924	,000 ^b
1 Residual	611,162	25	24,446		
Total	1145,250	27			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan nilai signifikansi dari pengujian Anova yang merupakan gambaran model persamaan garis kebermaknaan secara statistik, maka diperoleh nilai-p 0.000. Artinya nilai-p tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan alpha 0.05 (5 persen) sehingga dapat disimpulkan, bahwa persamaan garis secara statistik adalah bermakna.

Hasil penelitian tersebut diatas menunjukan, bahwa keluarga adalah unsur penting dalam pemenuhan hak PDB. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan keluarga batih atau inti. Keluarga besar masih ada pribadi-pribadi lain seperti nenek, kakek, paman dll. Peran keluarga bagi PDB antara lain: pendidik, pelindung, pemotivasi (motivator), pelayan, tempat curah hati.

Fungsi keluarga antara lain: reproduksi, afeksi, pelindung, pendidik dan keagamaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 32 disebutkan bahwa: (1) Setiap keluarga, yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, wajib melindungi, memajukan, dan menghormati hak asasi penyandang disabilitas. (2) Setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan atau organisasi orangtua penyandang disabilitas dapat dilibatkan

dalam perumusan kebijakan dan program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Pada keluarga yang mempunyai anggota yang mengalami disabilitas berat ada peran pokok yang harus dilakukan yaitu memenuhi hak hidupnya. Dalam memenuhi hak hidup tersebut ada dua peran yang penting keluarga yaitu memperkuat ekonomi keluarga dan menambah pengetahuan disabilitas anaknya.

Ekonomi Keluarga

Pendapatan adalah arus uang atau barang yang menguntungkan bagi seseorang atau kelompok individu, perusahaan atau perekonomian dalam beberapa waktu. Pendapatan tiap keluarga berbeda-beda sesuai dengan pemasukan keuangan oleh keluarga tersebut. Dalam setiap keluarga, kepala keluarga memiliki penghasilan utama sebagai sumber pembiayaan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga dengan pendapatan yang tinggi akan lebih tercukupi kebutuhannya termasuk kebutuhan untuk PDB.

Pendapatan dalam setiap keluarga sangat erat berkaitan dengan pekerjaan anggota keluarga tersebut, terutama ayah sebagai kepala rumah tangga. Pekerjaan yang dimaksud adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencaharian. Berbagai program latihan keterampilan yang diberikan pada orang tua dan anggota keluarga lainnya, dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi PDB dan juga tingkat kesejahteraan keluarga.

Sikap dan Nilai (*Attitude and Value*), Motivasi menjadi pendamping (caregiver) bagi PDB terinspirasi oleh rasa keterpanggilan kemanusiaan. Kesabaran dan keikhlasan sangat diperlukan, karena kondisi keterbatasan yang disandang penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan sesuai dengan kemampuan, menerima kondisi sebagaimana adanya, serta ikhlas dalam menjalankan tugas merupakan suatu bentuk sikap ingin membantu tanpa memikirkan imbalan. Rasa empati, dengan turut merasakan apa yang dirasakan dan menempatkan diri pada kesulitan yang dialami penyandang disabilitas.

tas. Dengan menolong akan melahirkan sikap mengasihi antar sesama, saling mengasihi, serta memperhatikan akan melahirkan kedamaian bagi penyandang disabilitas. Rasa empati, kepedulian, dan solidaritas sosial akan mewujudkan rasa tenggang rasa, toleransi, ikatan emosional, dan persaudaraan antara pendamping dan penyandang disabilitas.

Semangat pengabdian, perhatian, dan komunikatif mempunyai arti ingin memberikan apa yang dimiliki dalam mendampingi penyandang disabilitas. Perhatian dan komunikatif merupakan bentuk dari keterlibatan mental dan emosional, dimana hal ini merupakan salah satu cara dalam menghadapi penyandang disabilitas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemenuhan Hak PDB

Keberadaan penyandang disabilitas telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini. Pada mulanya manusia sering kali mengkaitkan antara kecacatan dengan dosa, sehingga terjadinya kecacatan dianggap dapat membawa aib bagi keluarga atau penyandangnyanya sendiri. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Dalam perkembangannya, orang memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang harus dikasihani. Penyantunan terhadap penyandang disabilitas sering dihubungkan dengan belas kasihan (*charity*), terutama penyandang disabilitas berat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, pasal 5 ayat (2), disebutkan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak: a) hidup; b) kesehatan; c) mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi; d) mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial; e) pendidikan; f) beragama; g) rasa aman; h) keadilan; i) memperoleh pekerjaan; j) memperoleh aksesibilitas; k) berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi; l) budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga; m) berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintahan; n) mobilitas pribadi; o) berkeluarga dan melanjutkan keturunan; p) kebebasan dari eksploitasi,

kekerasan, dan pelecehan; q) kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; r) penghormatan atas integritas; s) perlindungan dari diskriminasi; t) memperoleh kartu identitas diri; u) memperoleh akte kelahiran; dan v) perlindungan khusus.

Pada pasal 9 memuat tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk: a) pelayanan kesehatan; b) pelayanan sosial; c) penyediaan pelayanan pendidikan dan keterampilan; d) bantuan hukum; e) penyediaan akses pekerjaan; f) penyediaan alat bantu; g) memperoleh aksesibilitas gedung dan transportasi; h) memperoleh akses terhadap informasi dan teknologi; i) menyediakan akomodasi yang layak. j) menyediakan kuota untuk dipilih, memilih, dan penyelenggara dalam pemilu/pemilukada. k) menyediakan sarana dan prasarana olahraga; l) menyediakan sarana dan prasarana rekreasi; dan m) menyediakan sarana dan prasarana budaya.

Pada pasal 13 tentang pelayanan sosial untuk penyandang disabilitas dalam memenuhi hak adalah sebagai berikut: (1) pelayanan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas. (2) pelayanan sosial dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial terhadap penyandang disabilitas. Pasal 14 menyebutkan: (1) pelayanan sosial melalui pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a) pemberian bantuan modal usaha; b) pemberian pelatihan ketrampilan; c) pendirian koperasi; dan d) pelatihan usaha mandiri.

Pada pasal 15 ayat (1) rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk: a) motivasi dan diagnosis psikososial; b) perawatan dan pengasuhan; c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d) bimbingan mental spiritual; e) bimbingan fisik; f) bimbingan sosial dan konseling psikososial; g) pelayanan aksesibilitas; h) bantuan dan asistensi

sosial; i) bimbingan resosialisasi; j) bimbingan lanjut; dan/atau k) rujukan. Ayat (2) rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada umumnya responden berasal dari keluarga miskin, memiliki pekerjaan, dan berpenghasilan di bawah UMR. Secara signifikan berpengaruh terhadap pemenuhan hak PDB; (2) Kompetensi keluarga merupakan variabel yang berpengaruh sangat signifikan dalam pemenuhan hak PDB. Kompetensi ini meliputi pengetahuan mengenai PDB, ketrampilan dalam merawat PDB, dan sikap terhadap PDB; (3) Pemenuhan hak yang dimaksud antara lain pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan perawatan, serta perlindungan. Pemenuhan hak pangan sebagian besar responden sudah terpenuhi dengan standar gizi sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Pemenuhan kebutuhan pakaian, masih di bawah kelayakan. Sebagian besar PDB tinggal bersama keluarga, namun tidak memiliki kamar khusus. Kondisi kesehatan dan perawatan menunjukkan, bahwa keluarga PDB sebagian besar tidak memberikan obat dan vitamin serta perawatan kesehatan yang layak (fisioterapi). Aspek perlindungan, sebagian besar responden telah memasukan PDB dalam kartu keluarga, banyak PDB telah memiliki KTP dan akte kelahiran. Sebagian besar keluarga telah memberikan perlindungan PDB dari kekerasan fisik dan seksual. Temuan lain dari penelitian ini adalah: (1) Sebagian besar keluarga PDB belum akses terhadap layanan Posyandu. Hal ini dikarenakan Posyandu belum memiliki layanan home care (kunjungan keluarga) terhadap PDB. Kader kesehatan masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik dengan disabilitas berat; (2) Koordinasi antar instansi terkait belum berjalan dengan baik, untuk mendukung pemenuhan hak PDB sehingga tanggung jawab

pemenuhan hak tersebut hanya bergantung pada program instansi sosial; dan (3) Masyarakat belum memahami program ASPDB sehingga mereka belum berperanserta dalam program.

Rekomendasi: Berdasar hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program terhadap PDB antara lain: (1) Kompetensi keluarga merupakan hal yang penting dan berkorelasi dengan pemenuhan hak PDB. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kebijakan dan program untuk meningkatkan kompetensi keluarga, namun penguatan ekonomi keluarga tetap menjadi perhatian; (2) Prioritas program Kementerian Sosial adalah meningkatkan kompetensi keluarga melalui pendampingan program ASPDB. Dengan melatih pendamping diharapkan secara intensif melatih orang tua PDB. Pelatihan tersebut terkait cara merawat dan terapi dengan supervisi pihak yang berwenang; (3) Kementerian Sosial sebaiknya mengambil peran sebagai mediator bagi kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas; (4) Kementerian Kesehatan diharapkan dapat berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak PDB dibidang kesehatan dan perawatan terutama terapi; (5) Kementerian Koperasi diharapkan dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi keluarga PDB; (6) Kementerian Pendidikan diharapkan dalam mengembangkan pendidikan bagi PDB terutama yang masih usia anak; (7) KPPA diharapkan dapat berperan dalam sosialisasi melindungi kekerasan seksual bagi PDB; (8) Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran masyarakat lingkungan sekitar masih kurang sehingga perlu adanya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam program ASPDB.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada para informan (keluarga PDB) yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Pihak Dinas Sosial dan pendamping PDB di Kabupaten Jepara yang banyak membantu selama proses berlangsung.

Pustaka Acuan

- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2009). *Helping Professional Practice with Indigenous People*. Lanham. Boulder. New York. Toronto. Plymouth, UK: University Press of America, Inc.
- Amalia, A, Diah. (2014). Evaluasi Outcomes Bagi Individu Program Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra: Studi Kasus Empat Alumni, PSBN Wyata Guna Bandung, INFORMASI Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014
- Astuti, W. D., & Budijanto, D. (2009). Tingkat Disabilitas Fisik Berdasarkan Penyakit Degeneratif yang Diderita Menurut Faktor Sosial Dan Demografi (Kajian Isu Publik dalam Formulasi Kebijakan Kesehatan). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 12(4).
- Bowes, J. M., & Hayes, A. (1999). *Children, Families, and Communities Contexts and Consequences* (First ed.). UK: OXFORD University Press.
- Diono, A. (2014). *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas* (Vol. Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan Semester 2 tahun 2014). Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Sosial (2016). *Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDDB)*, Jakarta
- Kuntjorowati, Elly (2016). *Pemenuhan Hak Dasar Penyandang Disabel Fisik*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 2 Juni 2016.
- Santrock, J. W, (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiono, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sholihah, Imas. (2016) Kebijakan Baru Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, Jurnal Sosio Informa, Volume 2, Nomor 02, Mei-Agustus 2016.
- UNESCO Bangkok. (2009). *Teaching Children With Disabilities in Inclusive Setting*. Bangkok.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Perbatasan

Strategy of Education Needs Fulfillment for Children of Indonesian Migrant Workers in the Inter-Country Border Area

Tyas Eko Raharjo F.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. Tlp. (0274) 377265

HP. 08175455989. E-mail tyasekoraharjo@gmail.com

Diterima 31 Juli 2017, diperbaiki 27 September 2017, disetujui 23 Oktober 2017

Abstract

This study describes the strategy of fulfilling the children educational needs of Indonesian Migrant Workers (TKI) in the country-to-country border areas. The research was conducted in Sebatik Tengah sub-district, a border area facing directly to Malaysia. The strategy of fulfilling the children educational needs of TKI is both beneficial either for parents who work as TKI and for local government policy makers in formulating programs to meet the educational needs of children. This study used a qualitative approach and was based on inductive pattern of thinking. The qualitative approach emphasized more on the meaning rather than that of generalization, data was collected through observation, interview, and documentation techniques. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that there were three strategies of fulfilling the children educational needs of Indonesian Workers (TKI) in the border areas of Sebatik Tengah sub-districts, namely the strategy of fulfilling the needs of institution-base education, of family-base, and that of community-base. These three strategies can provide the services for Indonesian Workers (TKI) children in fulfilling their educational needs. It is hoped that the local government is able to construct and to formulate children protection program for Indonesian migrant labor by considering their educational needs and rights.

Keywords: *protection strategy; children migrant labor; country-to-country border areas*

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah perbatasan antarnegara. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sebatik Tengah, daerah perbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan tersebut bermanfaat bagi orang tua yang bekerja sebagai TKI dan pemangku kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan program. Pendekatan penelitian secara kualitatif dan mendasarkan pola berpikir secara induktif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, ada tiga strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak TKI di perbatasan antarnegara Kecamatan Sebatik Tengah yaitu strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan berbasis kelembagaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Ketiga strategi tersebut dapat memberikan layanan bagi anak TKI dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Berdasar ketiga strategi tersebut diharapkan pemerintah setempat dapat menyusun dan merumuskan program perlindungan anak TKI dengan memperhatikan kebutuhan dan hak anak.

Kata kunci: *strategi perlindungan; anak TKI; daerah perbatasan antarnegara.*

A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak anak agar dapat tumbuh hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seseorang disebut anak jika belum berusia 18 tahun dan bayi di kandungan termasuk dalam kategori anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Perlindungan anak masuk dalam bahasan konvensi hak anak yang merupakan wujud

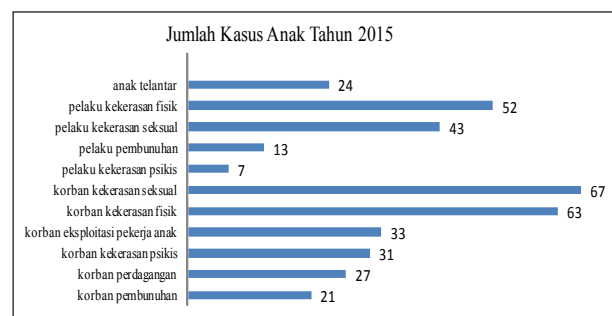
nyata upaya perlindungan terhadap anak agar hidupnya menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban melaksanakan ketentuan dan aturan dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahan.

Upaya pemerintah mendorong kabupaten/kota menjadi tempat yang ramah juga dinilai penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Lebih dari 500 kabupaten/kota pada tahun 2015, 294 diantaranya berkomitmen menjadi tempat yang ramah anak. (Kompas, Minggu, 24 Juli 2016). Pada tingkat keluarga pemenuhan hak anak masih mengalami masalah, perempuan dan anak dianggap sebagai hak milik “aset” yang bisa disingkirkan jika keadaan keluarga memprihatinkan. Jika keluarga mengalami masalah ekonomi dan tidak memiliki biaya maka anak diputuskan berhenti sekolah. Anak perempuan pun menjadi rentan karena bisa dinikahkan demi mengurangi beban keluarga. Anak laki-laki akan mendapat beban membantu menambah penghasilan keluarga dengan bekerja. Kondisi ini membuka kesempatan terjadinya berbagai jenis kekerasan seperti kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi.

Keluarga sebagai kelompok kecil dari masyarakat, merupakan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anggotanya termasuk perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhannya. Ketidakmatangan jasmani dan mental anak diperlukan adanya pengamanan dan pemeliharaan secara khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Anak juga manusia dan sudah selayaknya mendapat perlakuan secara manusiawi dan dijamin terpenuhi haknya. Seringkali anak dipinggirkan karena dianggap belum layak mendapatkan perlakuan seperti orang dewasa. Terlepas dari segala kekurangannya, sebagai manusia anak mempunyai hak yang tidak bisa

diabaikan begitu saja. Mengingat peran strategis anak sebagai generasi penerus, maka sangat penting untuk memberi perhatian lebih. Pemenuhan hak anak menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan keberlangsungannya.

Permasalahan mendasar pada perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah belum terpenuhinya hak anak secara menyeluruh (komprehensif) pada setiap elemen masyarakat. Terbukti pada tahun 2014 tercatat permasalahan sosial yang dialami anak yakni sebanyak 247.610 menjadi korban kejahatan dan mengalami putus sekolah sebanyak 1,67 persen di wilayah perdesaan serta 1,24 persen berada di perkotaan, sebanyak 3.372 menjadi narapidana. Pada tahun 2015 tercatat masalah kesejahteraan sosial anak berkaitan dengan asupan gizi buruk yakni sebanyak 6.455 mengalami gizi buruk.



Banyaknya kasus yang dialami anak tersebut ternyata bertambah pada tahun 2016 yakni terkait dengan kesehatan anak dengan beredarnya vaksin palsu dan diduga dialami ribuan anak, tercatat baru 327 anak yang melakukan imunisasi ulang (per 21 Juli 2016).

Kehidupan anak TKI di Sebatik terkait akses pendidikan membutuhkan perjuangan untuk dapat sampai ke sekolah. Sekitar 70 anak TKI setiap hari harus melintasi perkebunan kelapa sawit yang berada di perbatasan RI dan Malaysia untuk sampai ke Pulau Sebatik, karena perusahaan tempat orang tua bekerja di Malaysia tidak menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak TKI. Permasalahan yang dialami anak TKI kurang mendapat perlindungan dan hak di

bidang pendidikan. Kurang adanya fasilitas bagi anak untuk tumbuh dan kembang baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Anak sering tidak dapat melanjutkan sekolah, bagi orang tua yang penting anak bisa membaca dan berhitung secara sederhana. Orang tua beranggapan sekolah hanya membuang waktu dan menghabiskan uang. Ketika orang tua mengadu nasib di negeri seberang, anak lahir di perbatasan dan hidup di asrama dengan kesederhanaan.

Sulitnya akses pendidikan membuat orang tua mencari cara dan strategi agar anak dapat bersekolah. Anak ditiptikan di asrama dan hidup terpisah dari orang tua, belajar mandiri, dan belajar disiplin. Mereka tinggal di Asrama Susteran PRR Maria Protegente, di Dusun Barjoko, Sebatik Tengah, Kalimantan Utara. Orang tua meninggalkan tempat kelahiran merantau menjadi pekerja kasar dengan harapan memperoleh upah yang lebih baik. Mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan sawit, pabrik “*plywood*”, hingga buruh ladang di Negara Malaysia.

Sebagian TKI yang bekerja di Sebatik Malaysia merupakan TKI ilegal, tetapi ada yang sudah menetap dan tinggal selama dua hingga tiga generasi. Sebagian besar isteri dan anak-anak tidak memiliki dokumen keimigrasian, bahkan tidak memiliki identitas kependudukan seperti KTP dan KK. Jika ada operasi yustisi (*sweeping*) mereka bersembunyi di wilayah perbatasan Indonesia. Anak TKI mengalami kesulitan mendapatkan identitas dan akte kelahiran karena orang tua umumnya juga tidak memiliki surat nikah. Implikasi dari tidak adanya identitas kependudukan dan akte kelahiran akan dirasakan ketika anak memasuki bangku sekolah. Akte kelahiran menjadi salah satu syarat yang harus diserahkan ke pihak sekolah. Akte kelahiran adalah dokumen pendukung untuk klaim usulan pembiayaan sekolah melalui program bantuan dana BOS dan bantuan lain.

Berdasar permasalahan tersebut pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah strategi yang dilakukan dalam pemenuhan ke-

butuhan pendidikan bagi anak TKI di daerah perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak TKI meliputi strategi kelembagaan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Melalui strategi tersebut diharapkan anak dapat terlindungi dan terpenuhi kebutuhannya demi tumbuh kembang anak secara wajar. Penelitian ini memberi manfaat sebagai masukan bagi pemerintah pusat terkait model pemenuhan kebutuhan pendidikan anak TKI di daerah perbatasan, yakni dengan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat. Bagi pemerintah daerah menjadi masukan mengenai penanganan anak TKI di daerah perbatasan dengan memperhatikan segenap elemen kemasyarakatan setempat. Bagi pemerintah setempat yakni Kecamatan Sebatik Tengah memperoleh model pemenuhan kebutuhan pendidikan anak TKI berbasis sistem kemasyarakatan yang tersedia.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan mendasarkan pola berpikir secara induktif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2007), artinya mengungkap tentang strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak TKI yang berada di wilayah perbatasan. Pengumpulan data diperoleh dari informan yaitu aparat pemerintahan di tingkat kecamatan, tokoh masyarakat dan kader pengelola posyandu anak sebanyak 20 orang. Data diperoleh melalui teknik wawancara, untuk mengungkap pelaksanaan kegiatan pemberian layanan anak TKI dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan khususnya anak TKI yang berada di wilayah perbatasan antarnegara. Pengamatan dan observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung pemenuhan kebutuhan anak TKI.

Telaah dokumen dilakukan untuk mengetahui monografi, geografi lokasi penelitian, dan sumber berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Lokasi penelitian ditetapkan se-

cara *purposive* yaitu Kecamatan Sebatik Tengah. Alasan penentuan lokasi karena Sebatik Tengah merupakan wilayah kecamatan yang memiliki daerah perbatasan darat langsung dengan Negara Malaysia. Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif dan dipaparkan dalam bentuk uraian atau naratif. Proses analisis dimulai dengan menghimpun dan merumuskan makna yang disampaikan informan, mengelompokkan data ke dalam klasifikasi berdasarkan kriteria keterangan yang ditetapkan. Menghubungkan pernyataan informan dengan hasil telaah dokumen ataupun hasil pengamatan lapangan, kemudian memaknai data dengan menguraikan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai strategi perlindungan anak TKI di daerah perbatasan antarnegara bagi kesejahteraan anak.

C. Strategi Perlindungan Anak TKI

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Bagi anak TKI kebutuhan makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menyiapkan anak menjadi SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi, memiliki jiwa nasionalisme, dan pekerti luhur. Perlu ada upaya dan strategi untuk melakukan perlindungan bagi anak TKI supaya mereka dapat terpenuhi kebutuhannya demi tumbuh dan kembang anak.

Secara individu, jutaan anak menghadapi resiko busung lapar dan ketidakcukupan nutrisi yang mengancam pertumbuhan dan masa depannya. Anak TKI menghadapi ketidakpastian untuk hal-hal mendasar yang seharusnya menjadi hak mereka seperti kepemilikan akta kelahiran, akses

terhadap pendidikan, terbebas dari perlakuan salah, kekerasan ekonomi, seksual, dan psikis. Secara sosial, anak-anak TKI tidak berdaya menghadapi kehidupan di perbatasan yang orang tuanya bekerja sebagai buruh kelapa sawit dan bermukim di *camp* sawit Malaysia. Kondisi tersebut mempengaruhi perkembangan jiwa anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Komnas Perlindungan Anak melaporkan, bahwa 99,7 persen anak terpapar iklan rokok, hasil survey *Global Youth Tobacco Survey* di Indonesia 12,6 persen siswa SMP adalah perokok, 3,2 persen diantaranya tergolong kecanduan. Hal tersebut bisa terjadi pada anak TKI yang kesehariannya bergaul dengan para pekerja kelapa sawit yang selalu merokok saat istirahat, bahkan orang tua mereka umumnya juga perokok. Pada segi pendidikan pun anak-anak TKI masih banyak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan strategi perlindungan bagi anak agar mereka terpenuhi hak dan kebutuhannya secara wajar, utamanya di bidang pendidikan.

Strategi merupakan cara bagi seseorang atau kelompok untuk mengubah keadaan atau situasi sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi anak TKI yang ditinggal orang tua berhak memperoleh perlindungan secara wajar sebagai anak. Terdapat beberapa strategi dalam melakukan perlindungan anak TKI di Kecamatan Sebatik Tengah, strategi berdasar kelembagaan dapat memberi fasilitas bagi anak TKI supaya mendapatkan haknya. Strategi perlindungan anak berdasar kekeluargaan maka keluarga wajib memberi layanan terhadap anak TKI agar dapat tumbuh kembang secara wajar. Strategi kemasyarakatan juga menjadi cara yang dilakukan para pemangku dan tokoh masyarakat untuk ikutserta dalam memberi layanan bagi anak TKI. Louis C Johnson dalam Abas Basuni dkk, (2001) berpendapat, bahwa strategi merupakan suatu pendekatan dan cara seseorang atau kelompok untuk melakukan perubahan di dalam situasi, strategi berisi peran, tugas untuk dilakukan setiap orang.

Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah beserta jejaring kerja telah berupaya melakukan pemberian perlindungan anak TKI melalui tiga strategi yang memungkinkan dapat memberikan hak anak yang telah ditinggal orang tua bekerja. Tumbuh kembang secara wajar sangat dibutuhkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Upaya pemberian perlindungan anak TKI tersebut dapat disimak pada beberapa strategi berikut.

Strategi Kelembagaan.

Upaya perlindungan bagi anak TKI di Kecamatan Sebatik Tengah melibatkan peranserta aktif seluruh unsur yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan masalah pemenuhan hak anak di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Strategi yang dilakukan dalam perlindungan anak TKI melalui sistem kelembagaan diselenggarakan oleh lembaga asrama dan organisasi sosial yang peduli.

Asrama Susteran. Dikelola oleh persekutuan Biarawati Katolik yang berada di Dusun Barjoko. Pada umumnya anak yang tinggal di asrama susteran adalah anak keluarga TKI yang tidak memungkinkan ikut orang tua tinggal di Malaysia. Mereka tinggal di *camp* pekerja kelapa sawit di Malaysia dan mengalami permasalahan yang kompleks baik untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial. Ketika orang tua mengadu nasib di negeri seberang dan anak lahir di perbatasan maka pertumbuhan anak akan mengalami permasalahan. Sulitnya menjangkau akses pendidikan membuat anak TKI tidak dapat belajar di sekolah, bagi yang tidak melanjutkan sekolah akan bekerja membantu orang tua sebagai buruh di perkebunan sawit. Kondisi tersebut akan mempengaruhi nasib hidup anak di masa mendatang, dikhawatirkan nantinya mereka juga akan menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit. Peranserta masyarakat dan swasta diharapkan dapat memberikan layanan pemenuhan pendidikan bagi anak TKI.

Lembaga Persekutuan Biarawati Katolik yang berada di Dusun Barjoko Kecamatan Sebatik Tengah memberikan pelayanan bagi anak TKI dengan menyediakan asrama sederhana. Asrama tersebut memberikan layanan pendidikan bagi anak TKI dengan cara gotong royong, saling membantu, yang mampu membantu yang kurang. Orang tua lebih percaya menitipkan anaknya untuk mendapat pendidikan sekaligus bekal agama dan keterampilan kemandirian anak. Harapan orang tua dengan mengikuti pendidikan di asrama, anak belajar disiplin sehingga nantinya menjadi orang yang lebih baik dan kehidupannya lebih sejahtera.

Asrama dihuni sebanyak 30 anak TKI, sebagian besar berasal dari wilayah Indonesia timur yang orang tuanya mengadu nasib ke Malaysia menjadi buruh atau pekerja kasar buruh bangunan. Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang Suster pengelola asrama yang menyatakan, “Kebanyakan anak-anak asrama ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang ditinggal orang tuanya bekerja di Malaysia sebagai TKI. Mereka hidup terpisah dari orang tua sejak kecil, mereka mandiri dan belajar disiplin selama tinggal di asrama.”

Pengakuan Suster pengelola asrama tersebut menunjukkan, bahwa anak TKI belum mendapat hak perlindungan atas pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar karena sejak usia tujuh tahun mereka terpisah dengan orang tua. Masa anak merupakan masa di mana anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tua baik fisik, psikis, maupun sosial, karena tuntutan hidup mereka harus hidup terpisah dengan orang tuanya. Asrama sebagai pengganti orang tua diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak terutama kebutuhan bagi masa depan mereka. Upaya pengelola asrama mewujudkan pemenuhan kebutuhan anak tersebut dengan memberi pembinaan dan pengasuhan dalam aspek pendidikan, bimbingan mental, dan kegiatan keterampilan sebagai bekal bagi kemandirian anak.

Camat Sebatik Tengah mengatakan, “Saya selaku Camat di sini mendukung keberadaan

asrama yang di kelola para Suster Katolik di Kecamatan Sebatik Tengah yang menampung anak-anak TKI. Mereka sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur, selama di asrama mereka memperoleh bimbingan mental sesuai kepercayaan yang diyakini anak. Pemberian layanan anak di asrama dapat membentuk kemandirian anak, disamping bersekolah, pengelola juga memberikan bimbingan keterampilan usaha dan pengolahan lahan pertanian.”

Pengakuan Camat tersebut menunjukkan, bahwa mereka mendukung keberadaan asrama yang dikelola para Suster Katolik, dengan harapan bimbingan yang diberikan dapat membantu pemecahan masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan Sebatik Tengah terutama dalam memberikan perlindungan bagi anak TKI di wilayah perbatasan antarnegara. Hal ini meyakinkan bahwa pemerintah kecamatan setempat sangat menjunjung tinggi kepercayaan setiap warganya, sehingga keberadaan asrama yang bernuansa agama Katolik juga mendapat dukungan yang positif.

Hidup di asrama tentu mengalami berbagai keterbatasan, mengingat lokasi asrama berada di perbatasan. Pemenuhan kebutuhan air di asrama dan wilayah Sebatik umumnya mengandalkan air hujan dan air sungai. Kondisi air sungai yang dipergunakan untuk kebutuhan mandi dan cuci masih belum memenuhi syarat kesehatan. Kondisi tersebut mendorong pengelola asrama membuat sumur sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Letak sumur relatif jauh dari asrama sekitar satu kilo meter, sehingga setiap hari anak-anak harus berjalan kaki untuk melakukan kegiatan rutinitas mandi, cuci, kakus. Penerangan listrik belum masuk di lokasi asrama karena memang keterbatasan pemerintah di perbatasan antar negara. Penerangan asrama sementara menggunakan diesel untuk kegiatan belajar anak-anak yakni antara pukul 18.00 sampai dengan jam 21.00 waktu setempat.

Kehidupan mereka serba terbatas tetapi kondisi ini harus tetap dijalani sebagai upaya keluar dari mata rantai kemiskinan kehidupan mereka.

Asrama merupakan tempat belajar bagi anak TKI untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pihak pengelola tidak menetapkan biaya hidup selama anak tinggal di asrama karena sebagai buruh umumnya mereka tidak sanggup memberi donasi dalam jumlah layak kepada asrama. Pengelola asrama harus pandai mengatur menu dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak.

Yayasan ar-Rasyid. Yayasan ar-Rasyid cabang perbatasan melakukan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan bagi anak TKI. Kegiatan pendidikan yang dirintis salah satunya diberi nama “sekolah tapal batas” dengan menampung anak TKI agar mereka dapat memperoleh pendidikan secara layak. Bermula dari ide seorang tenaga sukarela pemerhati anak TKI di perbatasan yang memberi bantuan pemikiran dan ikut dalam pelayanan terhadap anak di perbatasan. Upaya memajukan pendidikan dan aktivitas sosial di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah khususnya di Desa Sungai Limau Yayasan ar-Rasyid Cabang Perbatasan melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kesehatan. Berbagai aktifitas pendidikan yang dirintis oleh Suraidah dengan Yayasan ar-Rasyid di Pulau Sebatik telah melembaga menjadi Sekolah Tapal Batas dan telah bermetamorfosis menjadi Gerakan Pendidikan Tapal Batas. Sekolah ini mewadahi pendidikan formal dan non-formal seperti PAUD.

Sekolah tapal batas salah satu alternatif memberi layanan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak TKI. Orang tua yang bekerja sebagai TKI menitipkan anaknya di sekolah tapal batas untuk mendapatkan pendidikan. Setiap hari anak berangkat sekolah dengan berjalan kaki selama dua jam melewati perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Mereka tinggal di Begosong Sebatik Malaysia tetapi karena berkewarganegaraan Indonesia maka tidak bisa bersekolah di Malaysia. Jumlah anak didik di sekolah tapal batas ada 112 siswa dan sebagian besar adalah anak TKI.

Perjuangan anak TKI untuk mendapatkan pendidikan ditempuh setiap hari dengan me-

lewat tapal batas yang selalu dijaga ketat oleh polisi Sebatik Malaysia. Mereka terkadang harus sembunyi jika sewaktu-waktu ada patroli polisi Malaysia. Seiring berjalannya waktu lama kelamaan sekolah tapal batas mulai dikenal polisi Malaysia sehingga mereka diberi ijin melintas batas antarnegara Indonesia dan Malaysia.

Strategi Kekeluargaan

Keluarga merupakan tempat tumbuh kembangnya beberapa aspek hidup manusia baik fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Terpenuhi-nya kebutuhan keluarga menentukan keberhasilan hidup masing-masing anggotanya. Tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga, sehingga lingkungan keluarga yang kondusif akan menentukan perkembangan pribadi, penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, dan peningkatan kapasitas diri menuju batas kebaikan dan kesempurnaan. Keluarga merupakan lembaga sosial paling awal dikenal dan dekat dengan anak, hal ini menjadikan peran keluarga dalam pendidikan dan proses pembentukan pribadi tampak dominan. Pada dasarnya manusia memiliki potensi yang positif untuk berkembang tetapi potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak sangat ditentukan oleh peran pendidikan dalam keluarga (Sri Lestari, 2012).

Strategi kekeluargaan dapat dimanfaatkan orang tua dalam membimbing anak. Sistem penitipan anak secara kekeluargaan menjadi salah satu strategi orang tua yang bekerja di luar negeri. Menitipkan anak pada keluarga yang tinggal di tanah air sebagai pengganti orang tua merupakan salah satu solusi ketika orang tua harus bekerja. Pendataan terkait jumlah anak TKI yang dititipkan pada keluarga di Sebatik Tengah belum pernah dilakukan, namun berdasar informasi dari beberapa tokoh masyarakat setempat diperkirakan ada sekitar 20 anak yang dititipkan keluarga. Hal tersebut dibenarkan Camat Sebatik Tengah yang menyatakan: “Sudah menjadi hal yang biasa anak TKI dititipkan pada keluarga yang tinggal di Indonesia. Tujuan mereka supaya

anak dapat bersekolah di negaranya sendiri. Saya katakan mereka tidak pernah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Orang tua setiap dua bulan sekali menengok dan mengirim kebutuhan anak.” Pengakuan tersebut diperkuat pernyataan salah seorang tokoh masyarakat sebagai PSM di Desa Ajikuning, “Selama ini keberadaan anak TKI yang dititipkan pada keluarga menjadi rajin, mau membantu keluarga pengganti orang tua. Kebetulan di sebelah rumah saya ada anak TKI yang setiap pulang sekolah membantu menjaga toko, anaknya juga rajin beribadah.”

Pengakuan kedua tokoh masyarakat tersebut menunjukkan, bahwa menitipkan anak pada keluarga yang tinggal di Indonesia dapat dikatakan lebih tepat karena kebutuhan tumbuh kembang anak dapat terpenuhi. Orang tua sewaktu-waktu dapat mengontrol keberadaan anak karena yang mengasuh adalah keluarga sendiri. Oleh karena itu strategi perlindungan anak TKI dengan cara kekeluargaan sering dilakukan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. Strategi perlindungan anak TKI dengan sistem kekeluargaan ini sejalan dengan sistem sumber informal yang disampaikan Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) dalam mengklasifikasikan sumber kesejahteraan sosial. Sistem sumber informal (*natural resource systems*) yang dimaksud adalah keluarga, teman, tetangga, maupun orang lain yang bersedia membantu.

Dilihat dari segi ekonomi strategi ini lebih hemat karena menitipkan anak kepada keluarga sendiri tidak memerlukan biaya banyak, anak merasa lebih aman dan nyaman karena tinggal bersama keluarga. Kondisi ini dipertegas pernyataan salah satu orang tua yang kebetulan sedang berkunjung dan mengirim biaya sekolah anak. Dia menyatakan: “Saya lebih percaya menitipkan anak kepada keluarga kok pak, karena dengan menitipkan anak pada keluarga saya mendapat banyak keuntungan. Pertama saya tidak mengeluarkan biaya sewa rumah, kedua perilaku anak lebih bisa diawasi secara langsung oleh keluarga, ketiga anak bisa belajar hidup

bermasyarakat sebagaimana yang dilakukan keluarga yang ditumpangi, dan masih banyak lagi manfaat yang berguna bagi anak dan saya sendiri”.

Strategi Kemasyarakatan

Menurut Camat Sebatik Tengah selaku informan, pendidikan penting dan menjadi bekal berharga bagi masa depan anak untuk kehidupan yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak TKI dengan strategi kemasyarakatan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyediakan kamar atau rumah untuk disewakan dan dikontrakkan. Strategi ini jarang dilakukan TKI karena membutuhkan biaya untuk sewa kamar atau rumah. Bagi warga yang memiliki kost berusaha memberi perhatian kepada anak yang menjadi penghuni kost sehingga anak tetap merasa aman ketika ditinggal orang tua bekerja. Menurut Dubbois & Milley (dalam Ellen Netting, 2001) strategi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem sumber kemasyarakatan berupa organisasi sosial, dana, pelayanan, pembinaan, sarana prasarana, fasilitas masyarakat dan alat kegiatan dalam memberikan pelayanan secara umum.

Anak TKI yang memilih tinggal di kost beralasan lebih dekat dengan sekolah di Sebatik Tengah, terutama bagi anak yang duduk di bangku SMP dan SMA, yakni ada 13 anak SMP, dan delapan anak SMA. Kondisi ini menunjukkan semangat orang tua dalam mengupayakan pendidikan bagi anak agar nasib mereka menjadi lebih baik di masa mendatang. Hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi agar masa depan anak menjadi lebih baik dibanding orang tuanya. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang agar dapat membiayai pendidikan anaknya sehingga kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Camat Sebatik Tengah menggugah kesadaran dan memotivasi orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak. Salah seorang TKI yang memiliki anak SMP di Kecamatan Sebatik Tengah

menyatakan: “Saya yakin dengan sekolah yang tinggi dan kemauan yang keras, anak akan lebih baik hidupnya di masa mendatang. Saya juga ingat dengan pesan pak Camat pada saat berkunjung ke perbatasan, dia berpesan berilah bekal ke anak dengan pendidikan setinggi mungkin pasti hidupnya akan lebih baik. Pak Camat mencontohkan dirinya adalah anak TKI, dengan segala perjuangan sekarang telah berhasil memajukan masyarakat. Inilah yang selalu saya ingat untuk kemajuan anak kami.” Pengakuan tersebut menunjukkan, bahwa kesadaran orang tua dikarenakan adanya motivasi dari pejabat setempat yang pernah mengalami nasib sama sebagai anak TKI namun dengan perjuangan yang tanpa lelah sekarang diberi kesempatan menjabat sebagai camat dan menjadi orang yang sukses.

D. Penutup

Kesimpulan: perusahaan tempat TKI bekerja di Malaysia tidak menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak. Permasalahan yang dialami anak yakni kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan. Minimnya fasilitas bagi anak untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis, maupun sosial menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah. Mereka beranggapan bahwa sekolah hanya membuang waktu. Anak TKI sulit mendapatkan identitas dan akte kelahiran karena pada umumnya orang tua juga tidak memiliki surat nikah. Implikasi dari tidak adanya identitas kependudukan dan akte kelahiran akan dirasakan ketika anak memasuki bangku sekolah. Akte kelahiran menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki untuk bisa mendaftar sekolah.

Strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak TKI daerah perbatasan antarnegara di Kecamatan Sebatik Tengah dilakukan dengan tiga cara yakni strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan berbasis kelembagaan, kekeluargaan, dan berbasis kemasyarakatan. Melalui ketiga strategi tersebut anak TKI memperoleh perlindungan utamanya dibidang pendidikan. Mereka dapat memilih salah satu strategi terse-

but sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Strategi berbasis kelembagaan dapat memberi perlindungan anak terutama kebutuhan pendidikan. Strategi kelembagaan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah antara lain dilakukan dengan sistem asrama yang di kelola oleh para biarawati Katolik. Penghuni asrama sebanyak 30 anak mendapatkan pelayanan sosial oleh para biarawati.

Selain asrama yang dikelola para biarawati, strategi kelembagaan juga dilakukan oleh organisasi sosial Yayasan ar-Rasyid dengan menyelenggarakan sekolah tapal batas. Sekolah tapal batas menjadi alternatif layanan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak TKI. Kesibukan orang tua bekerja mengakibatkan tidak sempat memperhatikan kebutuhan anak dalam bidang pendidikan. Keikutsertaan organisasi sosial memberi manfaat penting bagi perkembangan anak, sehingga sebagian besar anak TKI dapat mengenyam pendidikan di sekolah tapal batas. Mereka harus bersusah payah untuk bisa bersekolah, harus menempuh perjalanan selama dua jam dengan berjalan kaki melintasi perbatasan negara Indonesia dan Malaysia.

Strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan berbasis kekeluargaan juga dilakukan agar mereka dapat mengikuti kegiatan belajar secara formal di sekolah. Orang tua berupaya menitipkan anak pada keluarga yang bertempat tinggal di Kota Kecamatan Sebatik Tengah supaya anak dapat belajar di sekolah. Strategi kekeluargaan ini juga dapat memberi layanan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak TKI, karena mereka mendapat pengawasan dari keluarga yang mengasuh. Strategi ini dipandang lebih efektif karena anak di samping mendapat pengawasan, juga lebih mempererat hubungan kekeluargaan. Strategi kemasyarakatan dapat menjadi alternatif TKI dalam memberi layanan pendidikan.

Rekomendasi: Berdasar permasalahan anak TKI yang muncul serta pemecahannya di Kecamatan Sebatik Tengah, maka perlu ada beberapa alternatif strategi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak TKI secara konkrit. Rekomendasi

dasi khusus diberikan pada (1) Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, serta instansi terkait untuk melakukan program penguatan organisasi sosial peduli terhadap perlindungan anak TKI; (2) Bagi Organisasi Sosial dan para biarawati Katolik di Kecamatan Sebatik Tengah serta masyarakat yang telah memberi layanan pada anak, agar terus melakukan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya tulisan ini. Khususnya kepada Bapak Harman selaku Camat Sebatik Tengah, tokoh masyarakat selaku informan, Bapak Davit Vite selaku pendamping, para pengelola Orsos pemerhati anak TKI yang telah bersedia memberi data dan informasi hingga penelitian ini selesai.

Pustaka Acuan

- Abas Basuni dkk. (2001). *Praktek Pekerjaan Sosial*, Alih bahasa Abbas Basuni dkk. Bandung: STKS
- Allen Pincus dan Anne Minahan. (1973). *Social Work Practice*. University of Wisconsin Madison
- Bagong Suyanto dan Sutinah, (2007). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ellen Netting. (2001). *Praktik Makro Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS
- Harman. (2014). *Suraidah Pejuang Pendidikan dari Perbatasan*. Pemda. Kabupaten Nunukan.
- Harman. (2014). *Asa Seorang Mantan Anak TKI*. Pemda. Kabupaten Nunukan.
- Huruswati, I., Sutaat, Purwanto, A.B. Pujiyanto, B. & Soeyoeti. (2009). *Studi Masalah, dan Sumber Daya Sosial Daerah Perbatasan dan Tertinggal*, Jakarta: Puslitbang
- Litbang Kompas, (2016). *Jumlah Permasalahan dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Senin 25 Juli 2016.
- Nofal Liata, (2013). *Pelayanan Masyarakat Dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasdian FT. (2006). *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. *Bagian Sosiologi dan Pengembangan Masyarakat*: Institut Pertanian Bogor
- Nurchahyo A. (2008). *Sepotong tentang Pengembangan Masyarakat (community development)*. (Internet).

diakses pada 1 April 2011. dapat diunduh di (<http://islamkuno.com/2008/01/16/sepotong-tentang-pengembangan-masyarakat-community-development/>)

Suharto E. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat* [Internet]. Diakses pada 1 April 2011. dapat diunduh di (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htm)

Sri Lestari. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group

Yanuar Farida Wismayanti. (2012). *Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan*. Jakarta. Jurnal Sosiokonsepsia Vol.17 No. 01, Puslitbangkesos.

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 16 Nomor 3 September 2017, *review* dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A., B.Sw., Ph.D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi, USU)
4. Dr. Tukino (Kesejahteraan Sosial, STKS Bandung)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, dapat lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya, dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS